





---

HAK CIPTA DILINDUNGI  
UNDANG-UNDANG  
DILARANG MENGUTIP ATAU  
MEMPERBANYAK SEBAGIAN  
ATAU KESELURUHAN ISI  
BUKU TANPA IZIN DARI  
PENERBIT

---

# ILMU SOSIAL TERAPAN DARI TEORITIS KE APLIKASI

**EDISI PERTAMA TAHUN 2022**

Editor :

Andriansyah

Taufiqurokhman

Ismail Suardi Wekke

Penerbit :

Moestopo Publishing

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

No. ISBN :



# KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT, buku chapter 01, dengan Judul: **ILMU SOSIAL TERAPAN DARI TEORITIS KE APLIKASI**, telah selesai dilaksanakan yang merupakan bagian dari kolaborasi Konsorsium Ilmu Sosial Terapan: Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Administrasi Publik. Dengan ketua konsorsium, Rektor Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Prof. Dr. Rudy Hardjanto, M.Sn.

Acara Konferensi Nasional dengan tema: Transformasi Digital di Era Pandemi ini alhamdulillah berhasil dilaksanakan dengan sukses melalui media virtual dengan Kynote Speaker adalah Direktorat Jenderal RISTEK dan DIKTI Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pelaksanaan acara konferensi ini masih dalam suasana Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia dan negara-negara lain di dunia internasional. Tak mudah untuk tetap mempertahankan ritme kerja. Hanya karena limpahan karunia kesehatan dan kesempatan dari kuasa Allah swt sehingga penelitian ini bisa sampai pada publikasi di tangan pembaca.

Pertama dan utama, kita wajib bersyukur atas nikmat Allah adalah dengan menyampaikan terima kasih kepada pimpinan empat perguruan tinggi, yaitu Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Nasional Jakarta, STIAMI Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada tim untuk bekerja dalam kolaborasi penelitian. Dengan kesempatan ini, sehingga memungkinkan untuk sampai pada proses publikasi, sebagaimana buku yang berada di tangan pembaca. Institusi perguruan tinggi dinamakan dengan ekosistem keilmuan.

Sebagai sebuah ekosistem, maka tidak dapat berdiri sendiri. Ada pelbagai dukungan yang diperlukan dan didapatkan untuk menjaga kelangsungan perguruan tinggi. Dimana kata kuncinya adalah kolaborasi. Itu pulalah yang termaktub dalam borang akreditasi dalam skala nasional Indonesia. Sementara dalam skala global, wujud dalam bentuk pengukuran kinerja perguruan tinggi yang kemudian salah satu tolok ukuranya adalah capaian pelbagai bidang, diantaranya publikasi ilmiah.

Baik Universiti Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Universitas Nasional, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Institut STIAMI, menjadikan kolaborasi penelitian dalam

skala lintas institusi merupakan bagian dari usaha untuk mendorong ikhtiar dalam menyemai kolaborasi akademik dalam skala yang lebih luas. Untuk itu, ini menjadi mercu tanda. Selanjutnya, komunikasi terjalin secara berkesinambungan.

Semasa pagebluk Covid-19 mendera tanpa menyisakan satu negarapun, pengumpulan data sudah dilakukan sehingga dilanjutkan dengan penulisan dan juga diskusi melalui aplikasi daring untuk triangulasi data. Pandemi Covid-19 sekaligus menguji daya tahan dan juga kemampuan dosen dan tim peneliti di perguruan tinggi. Dengan segala keterbatasan, dan juga adanya kekangan dalam beberapa hal, perlu diatasi sehingga tetap memungkinkan untuk mewujudkan karya yang sebagaimana yang sudah diprogramkan sebelum datangnya wabah.

Penelitian ini kemudian sampai pada pengecekan naskah, dan selanjutnya menuju pada publikasi yang tersedia dalam bentuk buku yang ada di tangan pembaca saat ini. Apa yang menjadi pesan dari uraian kami? Bahwa sebuah proses penelitian tidak akan terlaksana dalam waktu yang singkat. Ada komunikasi yang berterusan dan juga ikhtiar dari kedua belah pihak dalam melangkah, setapak demi setapak.

Penelitian kolaboratif lintas perguruan tinggi, dan bahkan lintas negara memberikan latihan dan juga pengalaman untuk membangun diskursus dalam skala global. Tidak lagi hanya setakat di tingkatan perguruan tinggi masing-masing, tetapi sudah perlu merentasi batas-batas teritorial kenegaraan bahkan mulai mengenali bagaimana sebuah diskursus keilmuan yang sudah terbentuk. Inilah yang menjadi buah tangan, tidak saja kami para penulis, tetapi kita di empat universitas. Dengan adanya penelitian ini akan menjadi sebuah sumbangsih dalam mengokohkan pengembangan kelembagaan dan juga turut berkontribusi dalam proses akreditasi yang dilaksanakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Jalinan Kerjasama antar dua perguruan tinggi membuktikan bahwa platform keilmuan akan menjadi sebuah tanda aras bagi kedua pihak. Sekaligus mulai menjadi sebuah wujud dimana selama ini, kalangan perguruan tinggi di Indonesia terdapat rendah diri yang menjadi penghalang kemajuan. Padahal, dengan limpahan karunia alam yang diperoleh, tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak bersanding dengan kolega secara global. Apa yang ada dalam buku ini, sejatinya

merupakan sebuah percakapan yang jamak. Hanya saja, selama ini tidak dituliskan dan dijadikan sebagai sebuah tulisan yang dapat dijadikan sebagai manuskrip.

Empat kampus menjadi sebuah institusi yang memberikan keleluasaan untuk berkarya. Atmosfer akademik seperti ini, menjadi sebuah daya dukung sehingga civitas akademika memiliki kesempatan untuk terus berkarya, dan memberikan sumbangsih terbaik masing-masing. Bantuan para tim panitia pelaksana yang memberikan dukungan dalam dua tahun terakhir sehingga kita bisa mewujudkan penelitian ini menjadi sebuah buku. Dimana proses yang dilalui kadang memerlukan waktu dimana kendala teknis jaringan komunikasi. Begitu pula dengan kesibukan masing-masing, kemudian dapat dihimpun menjadi gerak langkah bersama sehingga dapat diselesaikan juga sesuai dengan target penelitian.

Tak terhitung dan tidak tersebutkan satu persatu, betapa banyak orang yang sudah membantu untuk sampai terbitnya buku ini. Ketika sudah berada di tangan pembaca, maka ini sudah menjadi milik khalayak ramai. Kamipun senantiasa tetap menunggu saran perbaikan, dan koreksi. Walaubagaimanapun, kami sudah berupaya sedaya upaya untuk memastikan semuanya tetap akurat sampai pada penerbitan.

Hanya saja sebagai manusia, selalu saja ada kemungkinan kesilapan dan kekeliruan sehingga kami tetap menanti tegur sapa dari para kolega, dan juga masyarakat cendekia untuk perbaikan pada edisi-edisi mendatang.

Jakarta, 11 November 2021

**Andriansyah**

**Erna Ermawati Chotim, M.Si**

**Ismail Suardi Wekke**

# KATA PENGANTAR

	Hal
1 Analisis Kolaborasi Sistem Logistik Nasional melalui NLE di Era New Digital <i>Notika Rahmi - Institut STIAM I</i>	1-18
2 Analisis Efektivitas Komunikasi Digital sebagai Media Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada PT. Ellisa Kreatif Indokarya di Jakarta Pusat) <i>Wuwuh Andayani, Heru Sudinta Jevo, Krishantoro, Oki Wahyudi - Institut STIAM I</i>	19-36
3 Model Kolaborasi Sistem dengan Pendekatan Metode Open API pada Pengembangan National Logistics Ecosystem <i>Ratih Kumala - Institut STIAM I</i>	37-62
4 Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKS) di Era Pandemi Covid-19 di DKI Jakarta <i>Budiharjo, B.; Nenobais, H.; &amp; Rachmatsyah, T.H. - Moestopo</i>	63-75
5 Strategi Pembelajaran Daring di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang <i>Franky, F.; Utama, Z.M.; Wartiningsih, W. - Moestopo</i>	76-94
6 Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Semangat Kerja terhadap Kinerja Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (Bersama) <i>Budiharjo, B.; Nenobais, H.; &amp; Rachmatsyah, T.H., Taufiqurokhman, - Moestopo</i>	95-110
7 Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Jilid-I dalam Konteks Manajemen Bencana (Studi di Kota Jakarta Selatan) <i>Bhakti Nur Avianto; Muhammad Burhan Kamil - UNAS</i>	111-129
8 Program Pembinaan Anak Terlantar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 (Studi Kasus di Kota Bekasi) <i>Yuswarni Y.; Dhea Apelya - UNAS</i>	130-137
9 Pengaruh Partisipasi Penumpang Pesawat Udara Terhadap Efektivitas Penggunaan Aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC) <i>Erna Ermawati Chotim; Vira Rahma Amelia - UNAS</i>	138-154
10 Analisis Implementasi Kebijakan Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Timur Tahun 2015-2018 <i>Winda Wulandari; Vivi Kurniawati - Institut STIAM I</i>	155-166

# ANALISA KOLABORASI SISTEM DENGAN PENDEKATAN METODE *API COLLABORATION* PADA PENGEMBANGAN *NATIONAL LOGISTICS ECOSYSTEM*

Dartono 1, Notika Rahmi 2, Pebriana Arimbhi 3, Ryan Nugraha 4, Ratih Kumala 5  
Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma1, Institut Ilmu Sosial  
dan Manajemen STIAMI2345

1 dartono@customs.go.id\*; 2 notika.rahmi@gmail.com;

3 pebrianasusanto@yahoo.co.id; 4 ryand.nugraha@gmail.com;

5 rhaty07@gmail.com

\* corresponding author

---

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Article history

Received

Revised

Accepted

### Keywords

*Orchestrator Platform*

*API Collaboration*

*Omnichannel*

Perkembangan teknologi yang terus berlangsung secara masif ditambah pandemi Covid-19 telah mendisrupsi semua industri di Indonesia, tak terkecuali sektor logistik, berbagai entitas logistik *private sector* berinovasi dengan menciptakan inovasi dan potensi bisnis baru dengan mengembangkan platform-platform digital untuk memperluas market dan merampingkan penyampaian produk ke pelanggan secepat mungkin. Tak terkecuali Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan transformasi digital pada area domain, melalui *National Logistics Ecosystem* (NLE) Bea Cukai berupaya menyediakan infrastruktur TIK untuk mengkolaborasikan/ mengorkestrasikan platform logistik baik pemerintah maupun swasta. dengan model bisnis *orchestrator platform* sebagai pengumpul informasi, mengkonsolidasikan dan menghubungkan *Supply* dan *Demand* dari pelbagai platform *aggregator*. Pendekatan kolaborasi NLE menggunakan konsep *API (Application Programming Interface) Collaboration*, dengan pendekatan ini semua entitas logistik memiliki kesempatan untuk berinovasi dan kontrol yang sama, sharing informasi dan pengambilan keputusan bersama menjadikan ekosistem tidak bergantung pada suatu entitas tunggal sehingga *competitiveness* dan transparansi akan tercipta secara sehat. Standar dan konsep *API*

*Collaboration* transaksi logistik mencakup penyelenggaraan kerjasama/ kolaborasi yang menyalurkan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang, berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses bisnis, dan menciptakan inovasi yang didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait dan menghubungkan sistem - sistem logistik yang telah ada. dengan konsep NLE sebagai *Orchestrator Platform* memungkinkan user/ customer dapat melakukan transaksi logistik melalui banyak saluran (*Omnichannel*)

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah RI telah menyusun kerangka kerja berdasarkan enam pendorong utama yang menghasilkan beberapa pencapaian melalui SISLOGNAS tahun 2012 yang terbagi dalam 6 Key Drivers dan Pencapaian Utama Untuk Mengurangi Biaya Logistik. Upaya tersebut terus dilakukan untuk memperbaiki kinerja logistik Indonesia secara keseluruhan melalui Penentuan Komoditas Utama, Pembangunan Infrastruktur Logistik, Membantu Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik, Penerapan Infrastruktur TIK, Transformasi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Regulasi dan Aturan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Indonesia masih memiliki biaya logistik yang tinggi jika dibandingkan dengan negara lain yang berdampak pada daya saing perdagangan internasional. Sebagai indikator dari permasalahan dimaksud, dapat terlihat tingginya biaya logistik sebesar 24,64% dari Pendapatan Domestik Bruto dan juga dapat terlihat dari skor *Logistic Performance Index* (LPI) dan *Trade Across Border* (TAB) pada rentang tahun 2015–2019. Bank Dunia mencatat bahwa skor LPI Indonesia selalu di bawah negara Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Dari sisi biaya dan waktu yang diperlukan untuk kegiatan ekspor dan impor, Bank Dunia juga mencatat bahwa tidak ada pengurangan waktu dan biaya secara signifikan selama tahun 2015–2019. Selain biaya logistik yang tinggi terdapat berbagai macam tantangan dan peluang untuk mencapai sistem logistik nasional yang efisien. Beberapa pain point logistik di Indonesia adalah *Maritime*

*Connectivity, Infrastructure, dan Information and Communication Collaboration Technology.*

Beberapa permasalahan logistik di Indonesia pada penyediaan infrastruktur TIK adalah 1) *No Idle Capacity Sharing*, Ketersediaan resources dari komponen logistik tidak dapat diakses dengan mudah oleh calon pengguna. (jumlah truk, kapasitas warehouse, jadwal kapal yang akan berangkat ke tujuan tertentu, dll) , 2) *Less Transparent* dimana Sistem pricing ditentukan melalui kontrak tertutup, belum ada sistem yang mampu menampilkan komparasi harga antar penyedia, *Historical Performance/Quality* dari penyedia logistik tidak dapat diakses oleh calon customer berikutnya, Minim kompetisi untuk saling meningkatkan kualitas dan menekan cost; Rantai distribusi yang seolah-olah panjang. 3) *Silo - Masing-masing entitas memiliki platform yang tidak saling tersambung (B2B)*. Contoh : *platform e-trucking, e-warehousing, e-shipping* tapi belum ada kolaborasi antar platform, Integrasi antar sistem di Government belum menyeluruh (G2G). 4) *Not Digital At All* Sebagian komponen logistik belum ada sistem dan masih manual. Contoh : Depo Kontainer Pemanfaatan teknologi seperti RFID , QR Code , AI CCTV untuk mempercepat proses operasional dan pengawasan belum maksimal, Belum ada integrasi dengan rantai pasok global seperti *supply chain* berbasis *Blockchain*.

Selain permasalahan yang diuraikan diatas, tumbuhnya platform *aggregator* logistik saat ini belum terintegrasi secara menyeluruh secara *end-to-end*, sehingga, customer masih kesulitan dalam mencari partner untuk melakukan transaksi logistik. hal ini diperlukan peran nyata pemerintah yang mampu menjadi enabler untuk segera mempertemukan seluruh entitas logistik yang ada dalam bentuk wahana digital berupa trusted platform yang dikelola oleh pemerintah. Melalui *National Logistics Ecosystem* berupaya mengorkestrasikan platform-platform *aggregator* yang sudah ada menggunakan pendekatan *Open API (Application Programming Interface)*. API sebenarnya bukan sesuatu yang baru, API sudah ada sejak teknologi jaringan komputer berkembang. Namun di era semua benda-benda teknologi bisa berhubungan satu sama lain atau yang dikenal dengan *Internet of Things (IoT)*, peran API menjadi semakin penting dan menggerakkan *economy* dengan caranya sendiri Utilisasi API untuk mendesain pola hubungan antar sistem, menciptakan produk/ potensi bisnis baru atau memperkaya fitur dari yang sudah

ada ini juga bisa meliputi berbagai bidang kehidupan, sehingga ide-ide kreatif dan potensi inovasi bisa timbul dari bidang apa saja dan dari mana saja.

Integrasi sistem adalah suatu konsep sistem yang saling berhubungan antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya disesuaikan dengan keperluan. Hal ini sangat bermanfaat untuk keberlanjutan dari suatu sistem informasi yang diperlukan juga oleh sistem yang lainnya atau output suatu sistem menjadi input sistem yang lainnya. Dalam konteks sistem informasi, sistem terintegrasi (*integrated system*) merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem informasi maupun aplikasi baik secara fisik maupun secara fungsional (Mohammadi, M., Muchtar, M., 2013). Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-sub sistem ke dalam satu sistem informasi yang menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. *Supply Chain Collaboration (SCC)***

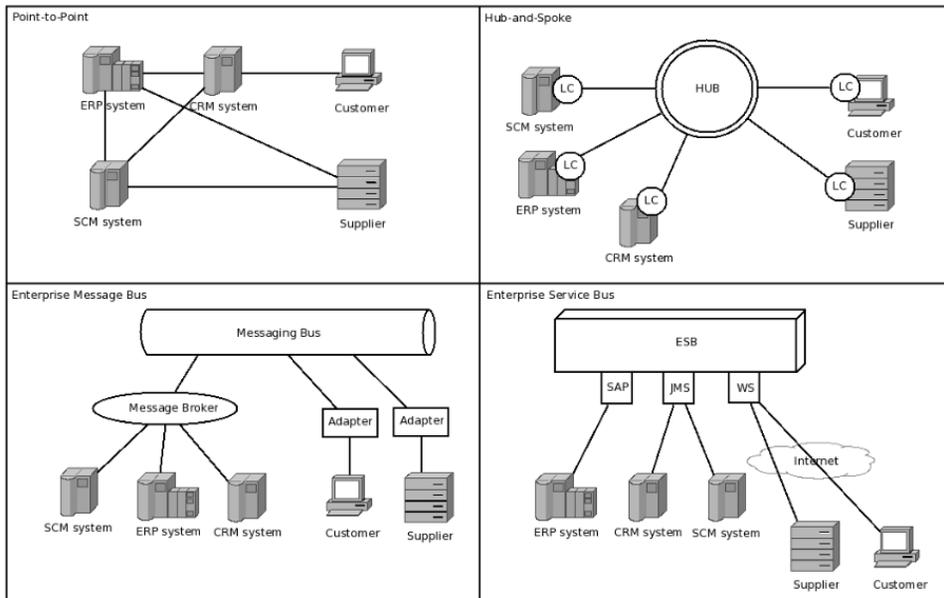
Simatupang & Sridharan (2005) mendeskripsikan konsep SCC diukur dari tiga dimensi yang saling terkait, yaitu *information sharing*, *decision synchronisation* dan *incentive alignment*. *Information sharing* mengacu kepada sejauh mana anggota rantai pasok saling berbagi informasi pribadi mengenai kegiatan operasional dari waktu ke waktu. Poin utama dari *information sharing* adalah bagaimana informasi yang didapat harus digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik (Frankel et al., 2002). *Decision synchronisation* mengacu pada pengambilan keputusan bersama dalam konteks perencanaan dan tingkat operasional. Sedangkan *incentive alignment* menunjukkan sejauh mana anggota rantai pasok saling berbagi kerugian, resiko dan manfaat. (Venska Stefani, Oki Sunardi, 2014)

### **2.2. Integrasi Informasi**

B. D. Kus'ak, (2010) menjelaskan integrasi informasi ini sebagai sebuah evolusi yang terdiri dari empat tahap yaitu: *point-to-point*, *hub-and-spoke*, *enterprise messaging bus* dan *enterprise service bus*. Istilah evolusi dalam konteks ini menekankan pada situasi bahwa model integrasi yang muncul belakangan

merupakan upaya untuk memperbaiki model yang telah ada sebelumnya. Artinya, praktik-implementasi dari model yang ada bergantung pada kebutuhan setiap organisasi yang terlibat, tidak selalu model yang terbaru adalah yang paling sesuai dengan semua situasi

Gambar 1: Komparasi metode integrasi informasi (Agung Darono, 2017)



### 2.3. Open API (*Application Programming Interface*)

Teknologi telah mengubah pusat gravitasi untuk sistem logistik tradisional. Pendekatan berbasis blockchain yang sedang berkembang saat ini dapat bertindak sebagai katalis untuk mematahkan pendekatan monolitik dan terintegrasi secara vertikal. *Application Programming Interface* (API) adalah konsep fungsi antarmuka pemrograman aplikasi, yang menjadi salah satu cara agar suatu aplikasi dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa mengubah struktur kode utama maupun database sistem, serta memudahkan komunikasi antar sistem meskipun berbeda platform (Wijonarko & Mulya, 2018). API menyediakan cara simple untuk menghubungkan, mengintegrasikan dan memperluas sistem perangkat lunak (*software*). API digunakan dalam mesin untuk komunikasi mesin dan integrasi dua atau lebih sistem perangkat lunak.

## 2.4. Model Bisnis

Model bisnis menggunakan pendekatan Open API saat ini sangat beragam, seperti contoh integrasi pada konsep *Open Banking* ada tiga yaitu “*aggregator*”, “*distributor*” atau “*orchestrator*”. Dalam model *aggregator* maka platform *aggregator* bersama-sama dengan penyedia layanan (*third-party provider*) bertindak sebagai agen yang mengumpulkan produk/layanan dari penyedia pihak ketiga untuk meningkatkan penawaran produk dan pengalaman pelanggan, model *distributor* adalah platform bertindak sebagai penyedia layanan untuk penyedia layanan pihak ketiga yang memiliki antarmuka klien, sedangkan model *orkestrator* adalah menyediakan platform (marketplace) yang mengintegrasikan produk dari platform itu sendiri dan produk pihak ketiga dan menawarkan semuanya kepada semua user/ customer.

Gambar 2: Model Kolaborasi *Open Banking*

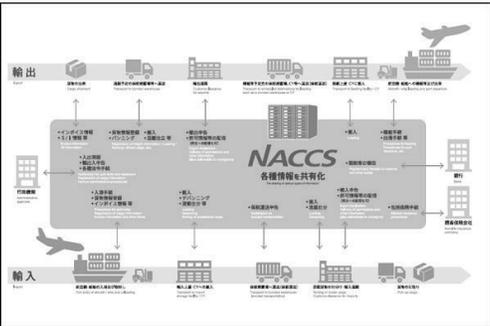
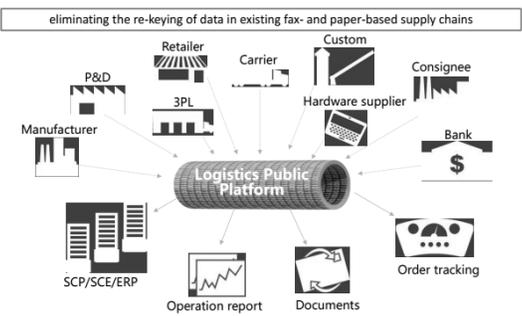
ARCHETYPES	DESCRIPTION	VISUALIZATION	EXAMPLES
<b>AGGREGATOR</b>	The bank aggregates products/services from third-party providers to enhance the bank's offerings and customer experience	<p>The diagram shows a Client icon on the left with an arrow pointing to a Bank icon (a classical building) labeled "Owns client interface". From the Bank, an arrow points to a Third-party provider icon (a gear with a plus sign) labeled "Operates product/service". A separate arrow points from the Client to the Third-party provider labeled "Buys product/service".</p>	<p>The logo for YOLT and ING, enclosed in a dashed box.</p>
<b>DISTRIBUTOR</b>	The bank acts as a service provider for a third-party provider which owns the client interface	<p>The diagram shows a Client icon on the left with an arrow pointing to a Third-party provider icon (a gear with a plus sign) labeled "Owns client interface". From the Third-party provider, an arrow points to a Bank icon (a classical building) labeled "Operates product/service". A separate arrow points from the Client to the Third-party provider labeled "Buys product/service".</p>	<p>The logo for Citi and SAP, enclosed in a dashed box.</p>
<b>ORCHESTRATOR</b>	The bank provides a platform (marketplace) which integrates the bank's own and third-party products offering these to all clients in the market	<p>The diagram shows a Client icon on the left with an arrow pointing to a large cloud-like shape labeled "Bank's platform". Inside the cloud are various icons representing different services. Below the cloud is the text "Orchestrate products/services". A separate arrow points from the Client to the cloud labeled "Buys products/services".</p>	<p>The logo for atpbank and Alipay, enclosed in a dashed box.</p>

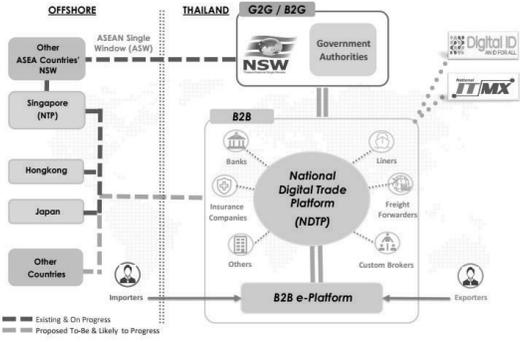
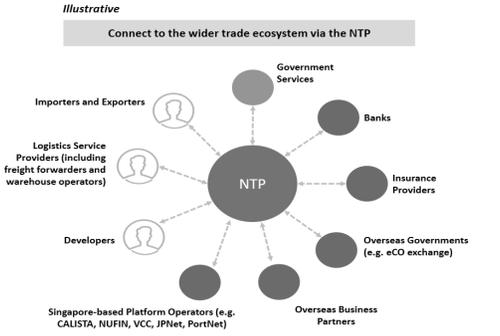
Sumber: <https://www.bankinghub.eu/innovation-digital/open-banking-stays>

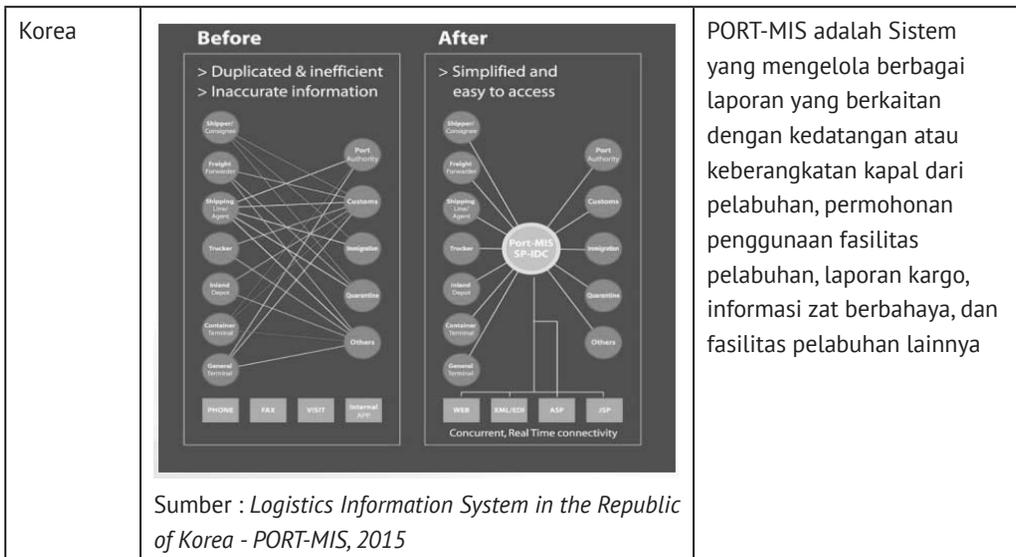
## 2.5. Best Practice Logistics Regional

Beberapa negara di dunia telah melakukan inovasi kolaborasi berkaitan dengan aliran data. Sebelum data diintegrasikan, aliran informasi dilakukan secara langsung dan terpisah oleh masing-masing instansi. Setelah proses kolaborasi, pemerintah melalui lembaga / badan khusus berperan sebagai kolaborator dan posisinya berada di tengah tengah aliran informasi. Berikut merupakan inovasi kolaborasi data dari Jepang, China, Thailand, Singapura dan Korea

Tabel 1: Model Kolaborasi Logistik Berbagai Negara

Negara	Model Kolaborasi	Keterangan
Jepang	 <p>Sumber : <a href="https://www.naccs.jp/e/aboutnaccs/aboutnaccs.html">https://www.naccs.jp/e/aboutnaccs/aboutnaccs.html</a></p>	<p><i>Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System (NACCS)</i> adalah sistem untuk pemrosesan online untuk kedatangan/ keberangkatan kapal dan pesawat atau kargo impor/ ekspor. sistem ini merupakan penggabungan antara (Air-NACCS) dan (Sea-NACCS)</p>
China	<p>eliminating the re-keying of data in existing fax- and paper-based supply chains</p>  <p>Sumber: <i>National Transport and Logistics Information Platform in China, Director of Transport and Logistics Research Center of Research Institute of Highway, Ministry of Transport, China, 2015</i></p>	<p><i>National Transport &amp; Logistics Public Information Platform (LOGINK)</i> , adalah Jaringan Pertukaran Informasi Logistik yang terbuka, publik, dan berbagi, yang dikelola oleh Kementerian Transportasi Republik Rakyat Tiongkok &amp; Pemerintah Rakyat Provinsi Zhejiang.</p>

<p>Thailand</p>	 <p>Sumber : <i>Thailand National Digital Trade Platform Presentation, 2019</i></p>	<p><i>National Digital Trade Platform (NDTP)</i> adalah Platform pertukaran informasi satu atap yang memungkinkan eksportir dan importir untuk berinteraksi dengan semua mitra bisnis dan pemangku kepentingan dalam transaksi perdagangan internasional yang akan meningkatkan produktivitas, transparansi, meningkatkan daya saing, dan mengungkap peluang baru lainnya</p>
<p>Singapura</p>	 <p>Sumber : <i>Sharing At Seminar on Intelligent Integration: The Future of Chile's Trade Facilitation Agenda 26 Sept 2018</i></p>	<p><i>Networked Trade Platform (NTP)</i> adalah ekosistem perdagangan dan logistik satu atap yang mendukung upaya digitalisasi dan menghubungkan para pemain di seluruh rantai nilai perdagangan – di Singapura dan luar negeri</p>



### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur, dan *participatory observation*. Sumber data untuk penelitian studi literatur berasal dari berbagai laporan/kesimpulan seminar, catatan/rekaman diskusi ilmiah, peraturan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku/manual maupun digital. Sedangkan metode *participatory observation* adalah metode penelitian dimana penulis atau peneliti tersebut ikut serta dalam kegiatan yang berlangsung didalam suatu organisasi. Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengamatan objek penelitian yaitu menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan kepada Tim NLE terkait kolaborasi sistem. Sedangkan instrumen untuk melakukan pengujian sistem dilakukan dengan metode Focus Discussion Group dengan memberikan kuesioner kepada pengguna dan Tim Pengembang NLE

Literatur (J. W. Creswell, 2013) mendefinisikan pendekatan penelitian sebagai suatu rencana dan prosedur yang harus dilaksanakan untuk penelitian meliputi beberapa hal berikut: asumsi filosofis, rancangan penelitian dan metode penelitian, termasuk di dalamnya adalah teknik analisis data dan penyajian hasil penelitian. Terkait dengan batasan tersebut, penelitian ini menyatakan asumsi filosofinya

adalah interpretif. Artinya, penelitian ini memandang permasalahan penelitian, dalam konteks ini berupa implementasi infrastruktur TIK pada sektor logistik, sebagai suatu realitas sosial yang perlu dipahami dan ditafsirkan sebagai jalan untuk menjawab masalah tersebut. Sebagai penelitian kualitatif maka penelitian ini mengajukan kesimpulannya dengan berdasarkan pada data kualitatif berupa uraian (teks) dengan cara memberikan pemahaman yang mendalam (*verstehen*) dengan menggunakan sudut pandang *emic* yang pada dasarnya meminta peneliti untuk menelaah masalah penelitian sebagai “orang dalam” yang mempunyai keterlibatan, bukan semata-mata pihak eksternal yang menjaga jarak dengan objek penelitiannya [M. D. Myers, (1997), T. E. Costantino, (2008)].

Sejalan dengan tujuan dan masalah penelitian yang telah diuraikan, rancangan penelitian yang dipilih adalah kombinasi antara studi kasus (*case study*) sebagai strategi penelitian dengan analisis kebijakan interpretif (*interpretive policy analysis/ IPA*) sebagai kerangka analisis datanya. Metode studi kasus adalah inkuiri empiris dengan analisis kualitatif yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam terutama apabila batas antara fenomena tersebut dan konteksnya tidak terlihat secara jelas [8:4, 9:18]. Sementara itu, IPA merupakan serangkaian metode yang mencakup upaya untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan: elemen yang relevan dengan kebijakan, siapa yang memutuskan dan bagaimana makna yang terkandung di dalamnya dikomunikasikan dengan mendudukan peneliti-analis sebagai pihak yang terlibat secara mendalam dan sekaligus memiliki kesempatan untuk menginterpretasikan makna tersebut dengan pengetahuan dan pengalamannya sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan hasil analisis [D. Yanow (2007), J. Glynos, D. Howarth, A Norval, and E. Speed, (2009)].

Penelitian ini menggunakan prosedur inkuiri berupa studi dokumentasi, yaitu prosedur sistematis untuk menelaah dokumen untuk kemudian diinterpretasikan sehingga akan didapatkan pemahaman darinya dapat dikembangkan pengetahuan empiris. Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat menjadi bagian dari (atau digabungkan dengan) teknik analisis data lain sebagai cara untuk memahami fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, studi dokumentasi merupakan bagian dari analisis kebijakan interpretif yang berkaitan dengan fenomena yang dipilih sebagai kasus. Dokumentasi dalam hal ini dapat berupa ketentuan hukum/

perundangan, prosedur/manual operasional, ataupun berbagai media release yang berkaitan dengan topik penelitian [L. K Prior, (2008), G. A. Bowen, (2009), R. Bohnsack, (2014)].

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1. Analisis Masalah**

Analisis masalah dalam pembahasan penelitian ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pertukaran data/informasi dan integrasi antar aplikasi yang berbeda platform, sehingga aplikasi atau sistem informasi yang ada di pada sektor logistik dapat terintegrasi dan saling berkomunikasi. Lingkup analisis masalah yang akan dituangkan dalam bentuk objektif-objektif yang harus dicapai dalam pertukaran data dan integrasi antar platform yang terdapat di ekosistem logistik, sehingga fokus penelitian adalah menentukan model kolaborasi antar sistem dari berbagai platform logistik baik pemerintah maupun swasta, fokus pemecahan masalah logistik bukan untuk merubah proses bisnis yang saat ini sudah jalan terutama pada sektor private, namun fokus model yang akan dikembangkan melalui NLE adalah cara berinteraksi antar platform

### **1.2. Analisis Kebutuhan Pengguna**

Analisis kebutuhan yang memiliki keterkaitan langsung dengan platform yang akan dibangun. Analisis kebutuhan dalam membangun kolaborasi sistem ini diperoleh dari hasil wawancara, pembuatan studi kasus bersama dengan para entitas platform logistik maupun customer logistik di Indonesia. sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pergeseran pola pelayanan publik saat ini berbanding lurus dengan perkembangan teknologi, dimana tidak hanya layanan perusahaan dari private sektor saja yang cenderung berubah, layanan sektor publik saat ini juga dituntut fokus kepada kemudahan, kenyamanan dan keamanan customer, model NLE diharapkan hadir tidak untuk mengambil layanan pada area private, kehadiran NLE tidak akan menggantikan sistem atau platform yang saat ini sudah ada, kehadiran NLE akan meningkatkan tumbuh kembangnya ekosistem digital pada sektor logistik, dimana fokus area pelayanan menggunakan pendekatan *customer centric*.

Sesuai pembahasan *best practice* platform logistik yang terdapat di berbagai negara telah banyak yang melakukan transformasi dengan menghubungkan seluruh proses logistik menjadi sebuah kesatuan atau ekosistem digital logistik, dari berbagai model tersebut ada dua model besar yaitu konsep single window (single channel) dan konsep banyak saluran (omnichannel) yang memungkinkan user/ customer melakukan transaksi logistik dari banyak saluran.

### **1.3. Analisis API**

Analisis API merupakan tahapan untuk menganalisis permasalahan dan mengidentifikasi perkembangan API kedepan sebagai solusi permasalahan bisnis. Trend perkembangan API saat ini mengarah pada open API dan Web API sesuai hasil riset Gartner yang memprediksi bahwa 50% dari B2B *collaboration* akan berlangsung melalui web API. API dapat berperan menjadi “*new revenue generator*” bagi perusahaan yang bertransformasi ke arah digital dengan cara menyediakan open platform & open API dalam melakukan kerja sama dengan partner and *digital ecosystem* untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan solusi/layanan baru, inovasi dan model bisnis baru. Pemanfaatan konsep Open API di Indonesia saat ini sudah dimulai oleh Bank Indonesia dengan konsep *Open Banking* yang memungkinkan bank dan *fintech* untuk membuka data dan informasi keuangan yang terkait dengan transaksi pembayaran dari nasabahnya secara resipikal (prinsip kesetaraan). hal ini memicu tumbuhnya platform fintech di Indonesia.

### **1.4. Model Kolaborasi *National Logistics Ecosystem***

Penyusunan model kolaborasi berdasarkan studi literatur, *participatory observation* pendapat ahli dan hasil dari analisis maka pengembangan *National Logistics Ecosystem* dikembangkan dengan model sebagai berikut:

#### **1. *Open API Collaboration***

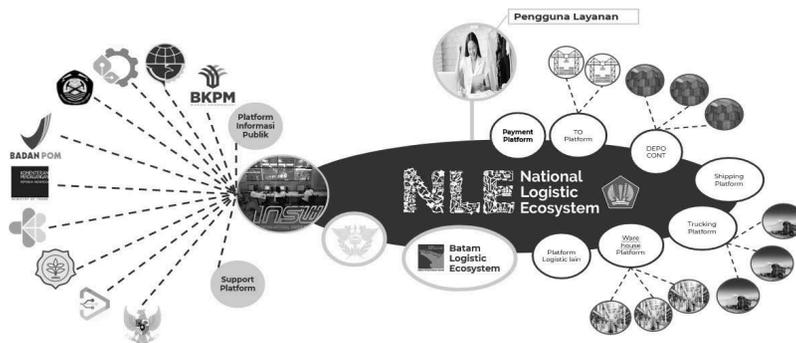
Platform *aggregator* logistik saat ini telah berkembang dengan sangat pesat, platform tersebut memiliki spesifikasi teknis yang berbeda-beda, dengan menggunakan Open API maka NLE dapat berperan menjadi kolaborator dengan cara menyediakan open platform & open API dalam melakukan kerja sama antar

partner & digital ecosystem yang memiliki sistem yang berbeda-beda sehingga memungkinkan kolaborasi dan komunikasi data antar entitas. Sebagai platform pemerintah NLE berusaha memperluas potensi inovasi, serta meningkatkan dan memperluas penawaran produk atau jasa logistik, dengan Open API sebagai salah satu solusi. Arsitektur Digital Platform API yang tepat akan meningkatkan efisiensi pengembangan dan manajemen API bagi pemerintah, mengurangi effort dan waktu untuk pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan sehingga dapat mengurangi risiko teknis (diantaranya: kinerja, ketersediaan, dan speed-to-market)

## 2. Orchestrator Platform

NLE sebagai *Orchestrator Platform* yang membentuk ekosistem yang mengorkestrasikan pola hubungan antar platform *aggregator* yang saat ini telah tumbuh dan berkembang. NLE sebagai Platform Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap tumbuh kembangnya *platform digital logistic* dari *private sector* seperti platform trucking, platform shipping line, platform terminal operator, platform warehouse, platform payment dan platform *aggregator* logistik lainnya. NLE tidak melakukan transaksi logistik, NLE hanya menjadi Hub API dan kolaborator antar entitas platform *aggregator*, baik platform pemerintah maupun platform swasta, semua transaksi logistik dilakukan di masing-masing platform yang terhubung dengan NLE

Gambar 3: Model *Orchestrator Platform*

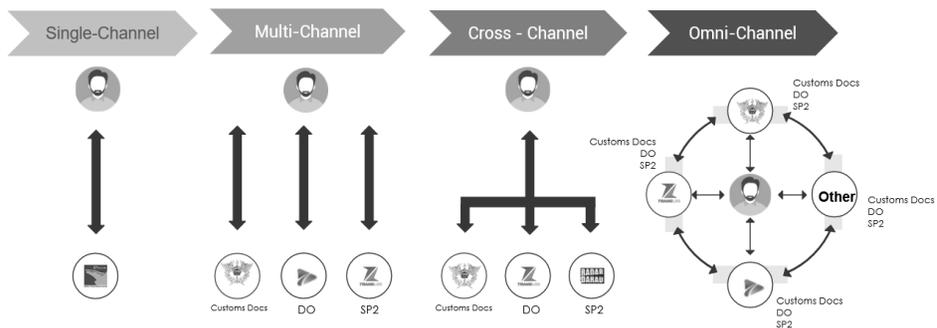


Sumber: Tim *National Logistics Ecosystem*, 2021

### 3. Omnichannel

Dengan perkembangan teknologi dengan adanya berbagai model integrasi informasi, yang sudah dijelaskan pada studi literatur tentang integrasi informasi maka dengan model Enterprise Message Bus memungkinkan NLE menerapkan model interaksi atau komunikasi dengan konsep *Omnichannel*, *Omnichannel* adalah model interaksi antara user/customer dengan penyedia layanan melalui banyak saluran, merupakan kebalikan dari single channel yang hanya berinteraksi hanya lewat satu saluran. Konsep *Omnichannel* sudah diterapkan di dunia B2B sebagai contoh untuk memesan kamar hotel, memesan tiket pesawat dapat dilakukan dimana saja. konsep ini Mendorong peningkatan hubungan B2B yang saling menguntungkan , sebagai contoh entitas bisnis logistik A yang tidak memiliki kompetensi di teknologi digital dapat berkolaborasi dengan platform X yang core business nya di dunia digital. Konsep *Omnichannel* paling sesuai diterapkan dalam pendekatan ekosistem seperti NLE, dikarenakan seharusnya di dalam ekosistem kewenangan dikontrol secara kolektif (seperti konsep blockchain) tidak ada keharusan melakukan transaksi hanya pada kanal tunggal, customer diberikan pilihan kepada anggota ekosistem untuk memilih akan melakukan transaksi melalui platform manapun.

Gambar 4: Konsep *Omnichannel*



Sumber: Tim *National Logistics Ecosystem*, 2021

## 5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini diperoleh suatu desain model kolaborasi sistem logistik dengan pendekatan metode open API, model integrasi sistem menggunakan model *Enterprise Message Bus* yang memungkinkan komunikasi antar banyak platform *aggregator* secara bersamaan. berdasarkan analisis kebutuhan pengguna, proses bisnis logistik saat ini sudah berjalan melalui berbagai macam platform *aggregator*, maka fokus pengembangan NLE saat ini adalah bagaimana mengorkestrasi pola komunikasi antar platform *aggregator* yang sudah ada. platform NLE memudahkan dan memberikan banyak pilihan kepada user/ customer untuk melakukan transaksi logistik melalui banyak channel (*Omnichannel*)

Transformasi digital yang saat ini sedang terjadi hampir di seluruh sektor termasuk sektor logistik maka NLE menciptakan ekosistem digital untuk mempermudah dan mempercepat pengembangan inovasi dan model bisnis baru pada sektor logistik. ekosistem yang terbentuk dikontrol secara kolektif dan tidak di kontrol oleh entitas tunggal, Salah satu kunci sukses keberhasilan NLE adalah terciptanya *end to end visibility*, sehingga *availability* dan *visibility* suatu layanan pada ekosistem tidak disandarkan hanya pada kemampuan satu entitas tunggal tetapi melalui mekanisme kolaborasi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi model dan diterapkan selain pada sektor logistik, Penelitian ini mempunyai keterbatasan-bawaan karena hanya mengandalkan studi literatur dan *participatory observation*. Untuk itu, studi lanjutan tentang hal ini diharapkan dapat dilakukan dengan dilengkapi dengan metode pengumpulan data yang belum dapat dilaksanakan tersebut dan menghasilkan rekomendasi yang lebih detail.

## References

- Simatupang T. M. & Sridharan, R. (2005). The collaboration index: a measure for supply chain collaboration”, *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 35(1), 44 – 62
- B. D. Kus'ak, (2010). “Comparison of Enterprise Application Integration Platforms,” Master Thesis, Department of Software Engineering - Charles University in Prague, Prague.
- Wijonarko, D., & Mulya, B. W. R. (2018). Pengembangan Antarmuka Pemrograman Aplikasi Menggunakan Metode RESTful pada Sistem Informasi Akademik Politeknik Kota Malang. *SMATIKA JURNAL*. <https://doi.org/10.32664/smatika.v8i02.202>
- Venska Stefani, Oki Sunardi, (2014) Peran Dependency, Commitment, Trust dan Communication terhadap Kolaborasi Rantai Pasok dan Kinerja Perusahaan: Studi Pendahuluan : *Jurnal Manajemen Teknologi*
- Frankel, R., Goldsby, T.J. & Whipple, J.M. (2002). Grocery industry collaboration in the wake of ECR. *International Journal of Logistics Management*, 13(1), 57 – 72
- Agung Darono, (2017) Implementasi Government Service Bus oleh Organisasi Pemerintahan di Indonesia: Perspektif Institutional Arrangement
- Mohammadi, M., Muchtar, M., (2013), A Review of SOA Modeling Approaches for Enterprise Information Systems, The 4th International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI), *Procedia Technology* 11 (2013) 794 – 800
- J.W.Creswell (2013), *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

D. Yanow (2007), "Interpretation in policy analysis: On methods and practice," *Critical Policy Studies*, 1:1, vol. 1, pp. 110-122.

J. Glynnos, D. Howarth, A Norval, and E. Speed, (2009) "Discourse Analysis: Varieties and Methods," ESRC National Centre for Research Methods Review,.

M. D. Myers, (1997) "Qualitative Research in Information Systems," *MIS Quarterly* (21:2), June 1997, pp. 241-242. MISQ Discovery, archival version, vol. 21, pp. 241-242.

T. E. Costantino, (2008) "Constructivism," *The Sage encyclopedia of qualitative research methods*. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, California, pp. 116-119.

L. K Prior, (2008) "Document analysis," *The Sage encyclopedia of qualitative research methods*. SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks, California, pp. 230-232,2008.

G. A. Bowen, (2009) "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal*, vol. 9, no. 2, pp. 27- 40,2009.

R. Bohnsack, (2014) "Documentary Method," dalam *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*, U. Flicks, Ed. London: SAGE Publications Ltd, pp. 217-232.

Sharing At Seminar on Intelligent Integration: The Future of Chile's Trade Facilitation Agenda 26 Sept 2018

Thailand National Digital Trade Platform Presentation, 2019

National Transport and Logistics Information Platform in China, Director of Transport and Logistics Research Center of Research Institute of Highway, Ministry of Transport, China, 2015

Logistics Information System in the Republic of Korea - PORT-MIS, 2015

Tim *National Logistics Ecosystem*, 2021

[https://www.pimcity.eu/?page=Citizens&id\\_article=107](https://www.pimcity.eu/?page=Citizens&id_article=107)

Developing Logistic Software Platforms: E-Market Place, a Case Study

<https://www.naccs.jp/e/aboutnaccs/aboutnaccs.html>

# ANALISIS EFEKTIVITAS KOMUNIKASI DIGITAL SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA PT. ELLISA KREATIF INDOKARYA DI JAKARTA PUSAT)

Wuwuh Andayani<sup>1</sup>, Heru Sudinta Jevo<sup>2</sup>, Krishantoro<sup>3</sup>, Oki Wahyudi<sup>4</sup>

Institute of Social Science and Management STIAM<sup>1234</sup>

wuhanku1112@gmail.com<sup>1</sup>, herutvone@gmail.com<sup>2</sup>,

krishantoro69@gmail.com<sup>3</sup>, gouwoki@gmail.com<sup>4</sup>

---

## Abstract

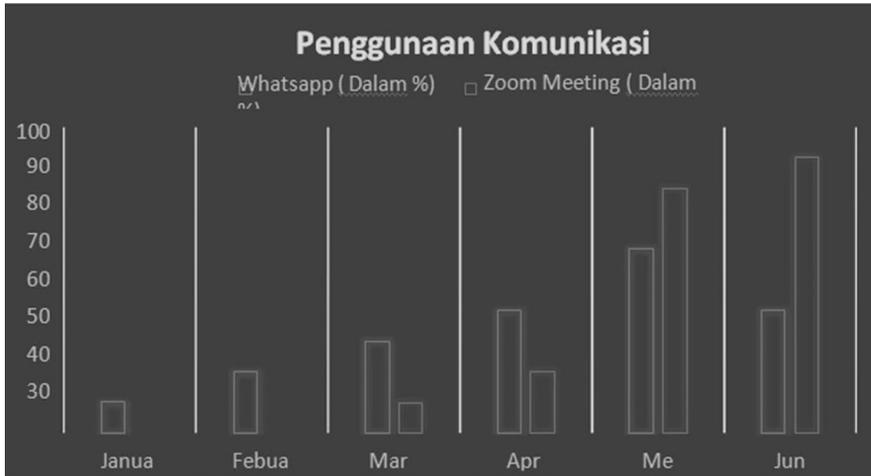
*All sectors experienced the impact of the corona virus outbreak e.g. education, economy, tourism and others. This has also shifted direct interpersonal communication system to digital media communication system (online). By the existence of Covid-19 virus, PT. Ellisa Kreatif Indokarya Central Jakarta received a notice from the government to implement PSBB (Large-Scale Social Restriction) and to keep social distancing where all employees of PT. Ellisa Kreatif Indokarya Central Jakarta were required to perform their work and day-to-day operations at home -- called WFH (Work From Home). The purpose of this research was to identify and analyze the effectiveness, constraints and solutions of Digital Communication during covid-19 pandemic at PT. Ellisa Kreatif Indokarya. This research was conducted by employing qualitative approach and descriptive method. The results from the research showed the effectiveness of Digital Communication during the Covid-19 pandemic (a case study at PT. Ellisa Kreatif Indokarya in Central Jakarta) with few constraints such as internet connection speed and task delivery or meeting affected PSBB (Large-Scale Social Restriction) as a government policy.*

Keywords: *Effectiveness, Digital Communication, Covid-19 Pandemic.*

## Pendahuluan

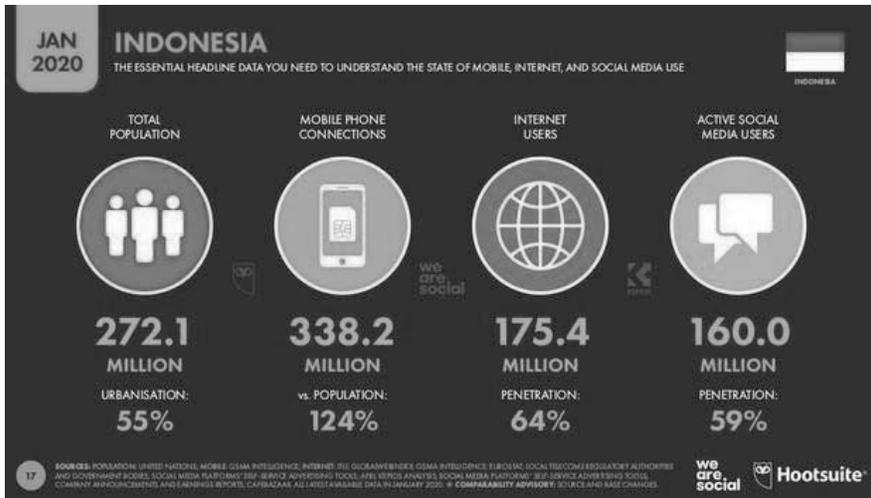
Pada periode awal tahun 2020, mewabahnya Corona virus yang disingkat sebagai Covid-19 sangat banyak diperbicangkan oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Semua sektor merasakan dampak dari Corona virus, seperti sektor pendidikan, ekonomi, sosial, wisata, transportasi dan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan sistem komunikasi interpersonal yang pada mulanya secara langsung (tatap muka) sekarang berganti menjadi sistem komunikasi melalui media digital daring (dalam jaringan) atau online. Dengan adanya virus Covid-19, PT. Ellisa Kreatif Indokarya Jakarta Pusat mendapatkan surat pemberitahuan dari pemerintah untuk melakukan PSBB (Perbatasan Sosial Berskala Besar) dan harus menjaga jarak (*social distancing*) sehingga seluruh karyawan PT. Ellisa Kreatif Indokarya Jakarta Pusat dalam melaksanakan pekerjaan dan kegiatan operasional kantor sehari-hari terpaksa harus dilaksanakan dari rumah yaitu WFH (Work From Home) atau bekerja di rumah dengan memanfaatkan komunikasi digital yang ada sebagai media komunikasi seluruh karyawan. Dalam menyikapi situasi dan informasi yang terus berkembang mengenai penyebaran Covid-19, Kementerian Keuangan juga telah mengambil berbagai kebijakan terkait pandemi Covid-19, diantaranya adalah dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi kebijakan bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) bagi para pegawai Kementerian Keuangan secara bergantian sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 5 tahun 2020. Peningkatan penggunaan komunikasi digital pada PT. Ellisa Kreatif Indokarya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Data Peningkatan Penggunaan Komunikasi Digital Di PT Ellisa Kreatif Indokarya Jakarta Pusat Tahun 2020



Sumber: PT Ellisa Kreatif Indokarya, 2020

Gambar 1. Riset Perusahaan Platform Perkembangan media sosial di Indonesia Media **We Are Social** bekerja sama dengan **Hootsuite**



Sumber: <https://www.hootsuite.com/id/resources> diakses pada 22 April 2021

Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan penggunaan internet dan komunikasi digital pada warna Indonesia pada umumnya dan pada karyawan PT. Ellisa Kreatif Indokarya pada khususnya. Hal ini sekali lagi menunjukkan adanya transformasi komunikasi, dari komunikasi langsung ke komunikasi digital (*online*).

Namun pada pelaksanaannya, penerapan *Work From Home* ternyata memiliki tantangan dan kendala yang tidak mudah, karena tidak semua sektor pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan *Work From Home* atau bekerja di rumah seperti ketiadaan alat kerja yang lengkap, kurangnya koordinasi, gangguan domestik lingkungan di rumah tangga, dan faktor-faktor lainnya. Kepatuhan Internal merupakan unit yang bertugas untuk memantau pelaksanaan pengendalian internal dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam hal ini terjadi kebijakan yang bersifat tidak biasa seperti halnya WFH (*Work From Home*) atau bekerja dari rumah ini, tentunya diperlukan strategi tertentu dalam melakukan pemantauan, pelaksanaan, pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan juga fungsi Organisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis sejauh mana komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19 pada PT. Ellisa Kreatif Indokarya.

## **Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimanakah efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19 pada PT. Ellisa Kreatif Indokarya?
2. Apakah kendala-kendala komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19 pada PT. Ellisa Kreatif Indokarya?
3. Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemic Covid-19 pada PT. Ellisa Kreatif Indokarya?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19 pada PT. Ellisa Kreatif Indokarya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19 pada PT. Ellisa Kreatif Indokarya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi dalam menghadapi kendala efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19 pada PT. Ellisa Kreatif Indokarya

## Kajian Pustaka Komunikasi

Istilah komunikasi sendiri berpangkal pada bahasa Latin *communis* yang memiliki arti ‘membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih’. Komunikasi sendiri juga berasal dari akar kata dalam bahasa Latin *communico* yang artinya ‘membagi’.

## Bentuk Komunikasi

Susanto (2010) menyatakan bahwa ada lima konteks komunikasi, yaitu: komunikasi intrapersonal (*intrapersonal communication*), komunikasi antarpersonal (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok (*group communication*), komunikasi organisasi (*organizational communication*) dan komunikasi massa (*mass communication*). Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Komunikasi ini umumnya membahas proses pemahaman.

## Komunikasi Massa

Salah satu dari definisi komunikasi massa yang dikemukakan oleh Nurudin (2014:3), juga mengartikan komunikasi massa, yakni komunikasi lewat media massa (media cetak dan elektronik) yang diproduksi lewat teknologi modern.

Komunikasi masa berasal dari pengembangan kata *media of mass communication* (media komunikasi massa).

## **Media Massa**

Menurut Tamburaka (2012), media massa ialah medium penyajian komunikasi dan informasi dengan pengedaran informasi dalam jumlah besar maka mampu di akses untuk umum. Effendy juga mengungkapkan bahwa media massa bak keserampakan koneksi atas sebesar luas penghuni ketika jangka renggang dari komunikator (Ardianto, dkk. 2017).

## **Efektivitas**

Menurut Islahuzzaman (2012: 44), efektivitas adalah berdaya guna.

Kemampuan suatu unit untuk mencapai atau melampaui sasaran, target, atau tujuan yang diinginkan (yang telah ditetapkan lebih dahulu).

Menurut Mardiasmo (2014:32) pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Evektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

## **Pandemi Covid - 19**

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris: *Coronavirus disease 2019*, disingkat Covid -19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS- CoV-2. Wabah COVID- 19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.

## **New Media (Media Baru)**

Menurut Baran (2011), teori komunikasi massa juga terbuka terhadap perubahan paradigma dan munculnya media baru. Keadaan dapat mengubah situasi komunikasi massa secara fundamental (Morissan, 2015). Munculnya

internet menjadi faktor utama yang menyebabkan turunnya media cetak. Pola kehidupan masyarakat pun berubah sedikit demi sedikit karena hadirnya internet. Kehadiran berbagai alat komunikasi dan alat elektronik canggih lainnya semakin memudahkan masyarakat. Internet membawa pengaruh besar pada pola pikir dan perilaku masyarakat. Dewasa ini, semakin dibutuhkan informasi yang mudah diakses dan disajikan secara (*real time*).

## **Metode**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Menurut Sugiono (2011), penelitian kualitatif adalah metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah kemanusiaan.

#### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (Bungin, 2007). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah karena dengan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu yang lain, atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Dalam teknik ini penulis akan mewawancarai sumber yang penulis anggap memahami dan mengerti akan efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19. Sehingga hasil dari wawancara tersebut dapat diakui dan dipercaya dan bisa dijadikan acuan sebagai data yang akan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

### **2. Pengamatan/observasi**

Dalam teknik ini penulis melakukan pengamatan atau observasi pada masyarakat di PT. Elissa Kreatif Indokarya yang bertujuan agar penulis dapat lebih memahami dan mengetahui cara kerja dari efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19 tersebut agar memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

### **3. Dokumentasi**

Dalam teknik ini penulis melakukan dokumentasi terkait dengan apa saja yang penulis temukan di lapangan yang terkait dengan efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19. Sehingga dapat memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi dan juga dapat dijadikan sebagai bukti penelitian/observasi yang dilakukan Penentuan Informan.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam langkah awalnya adalah mengumpulkan data yang ada, kemudian menyusun data tersebut dengan sistematis, selanjutnya mempresentasikan hasil dari penelitiannya kepada orang lain. Analisis data model Milles dan Huberman (1992) terdiri dari:

### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar (belum di sempurnakan) yang muncul dari catatan lapangan.

## **2. Penyajian data**

Penyajian data merupakan pendeskripsian dari sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan keputusan.

Dalam penyajian data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan yang disusun untuk menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang sesuai dan mudah dimengerti.

## **3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi**

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah kegiatan akhir dalam penelitian kualitatif. Penulis harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi dari segi makna maupun kebenarannya dari kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Hasil Penelitian**

Dalam penentuan ini menentukan data yang telah didapatkan oleh penulis dari lapangan sudah mencapai tingkat kebenarannya maka, penulis melakukan penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat merupakan unit pelayanan di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat bertempat di JB Tower Jalan Kebon Sirih No. 48-50, Jakarta Pusat untuk mengumpulkan mengelola data yang bersangkutan serta membangun kepercayaan. Penulis berhasil memperoleh data primer berupa hasil wawancara terbuka yang dilakukan kepada 3 (tiga) informan wawancara, yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara lisan dilakukan secara langsung dan juga penulis memperoleh data sekunder berupa dokumen.

## Pembahasan

Dalam tahap ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk pembahasan, yakni akan peneliti paparkan sebagai berikut:

### 1. Efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi dimasa pandemi Covid-19 (Studi kasus PT. Ellisa Kreatif Indokarya)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan guna memperoleh dan mengumpulkan data yang lebih valid berupa dokumentasi yang berhubungan dengan efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi dimasa pandemi Covid-19 (Studi kasus PT. Ellisa Kreatif Indokarya). Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah: “Ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program.” Maka di dalam proses penganggaran mulai diarahkan untuk berorientasikan pada keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) melalui ukuran efektivitas. ada 4 teori Aspek Efektivitas berikut adalah beberapa aspek yang mempengaruhi efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi dimasa pandemi covid-19 (Studi kasus PT Ellisa Kreatif Indokarya):

#### a) Aspek Tugas dan Fungsi

Sebuah Lembaga ataupun perusahaan dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya dengan baik. Dalam hal ini efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19 di PT. Ellisa Kreatif Indokarya adalah sudah efektif dikarenakan satu satunya cara dalam mengatasi keadaan pandemi Covid-19 PT. Ellisa Kreatif Indokarya sudah melakukan fungsi dan tugas komunikasi digital sebagai media komunikasi yang tepat di masa pandemi ini serta ini adalah satu-satunya cara di saat semua perusahaan dari berbagai macam sektor manapun sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah di berlakukan terpaksa seluruh yang bekerja harus melakukan pekerjaannya di rumah (*Work From Home*) melalui komunikasi digital sebagai media komunikasi yang bisa membuat perusahaan tetap terus berjalan dan menjalin komunikasi kepada seluruh civitas di PT Ellisa Kreatif Indokarya serta melakukan aktivitas perusahaan yang dilakukan

sehari-hari walaupun memang bekerja di rumah tetapi hal ini adalah sudah efektif dan efisien serta sangat memudahkan masyarakat Indonesia khususnya bagi karyawan yang melakukan pekerjaan di rumah, masyarakat yang menjalin silaturahmi dari rumah, serta mahasiswa ataupun pelajar yang mengikuti kegiatan belajar mengajar melalui daring (*Online*) dikarenakan sesuai peraturan pemerintah hal yang di maksud dengan bersangkutan seperti melakukan pertemuan, pekerjaan, ataupun pembelajaran sudah bisa dilakukan dimana saja dan kapan yang bebas dilihat dari kondisi kesibukan masing-masing melalui digital di zaman yang sudah modern ini di Revolusi Industri 4.0.

### **b) Aspek Rencana atau Program**

Dalam efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19, yang dimaksud rencana atau program adalah pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif. Dalam hal ini efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi covid-19 di PT. Ellisa Kreatif Indokarya adalah sudah efektif sebab PT. Ellisa Kreatif Indokarya dalam menjalankan penerapan komunikasi digital sebagai media komunikasi ini selalu membuat rencana pencapaian dalam setiap pertemuan yang dilakukan atau ada hasil dalam setiap pertemuan serta PT. Ellisa Kreatif Indokarya membuat program secara terurut dan rutin seperti perencanaan harian, perencanaan mingguan, perencanaan bukaan, perencanaan tahunan.

### **c) Aspek Ketentuan dan Peraturan**

Efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga keberlangsungan proses kegiatannya. Jika aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan aturan telah berlaku secara efektif. Dalam hal ini efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19 di PT. Ellisa Kreatif Indokarya adalah sudah efektif dikarenakan dalam pelaksanaannya meeting atau rapat dan pertemuan melalui komunikasi digital yaitu *Zoom Meeting*. PT. Ellisa Kreatif Indokarya membuat ketentuan dan peraturan dalam menjalankan kegiatan pertemuan ini

seperti memberi kabar kepada seluruh civitas PT. Ellisa Kreatif Indokarya satu hari sebelum dilaksanakannya pertemuan tersebut dan menentukan *background* yang di gunakan dalam pelaksanaan *meeting* tersebut serta mewajibkan peserta yang mengikuti pertemuan melalui komunikasi digital *Zoom Meeting* ini untuk menyalakan kamera agar terlihat .

#### **d) Aspek Tujuan dan Kondisi Ideal**

Aspek Tujuan dan kondisi ideal adalah suatu program dapat dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Dalam menjalani efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di PT. Ellisa Kreatif Indokarya Karyawan PT. Ellisa Kreatif Indokarya juga tidak perlu mengeluarkan ongkos, biaya parkir, sarapan dan waktu serta hal lainnya untuk datang ke kantor dan melakukan aktivitas pekerjaan kantor lainnya. Hal ini dikarenakan semuanya dilakukan dari rumah secara *online* dan ini sudah sangat efektif serta efisien sekali apalagi di era Revolusi Industry 4.0 dimana zaman sangat cepat berubah dan juga teknologi terus berkembang.

Dan dengan adanya wabah virus Covid-19 ini dimana semua orang bekerja dari rumah dan juga belajar di rumah karena kita harus menjaga jarak dengan yang lainnya, dalam hal ini komunikasi digital sebagai media komunikasi terutama penggunaan pada aplikasi *Zoom Meeting* dan *Whatsapp group* sangat dibutuhkan sekali.

Dengan adanya efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19 sudah sangat efektif bagi karyawan PT. Ellisa Kreatif Indokarya, masyarakat maupun mahasiswa dalam melakukan kegiatannya melalui *Online* atau daring dan ini juga sedikit banyaknya dapat membantu pemerintah dalam mengurangi masalah penyebaran ataupun penularan virus Covid-19.

## **2. Kendala-kendala efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19 (Studi kasus PT. Ellisa Kreatif Indokarya)**

Kendala ataupun hambatan dan ancaman yang dihadapi dalam Efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi dimasa pandemi Covid-19 ini dimana semuanya serba daring dan melalui digital adalah gangguan sinyal yang terus terjadi akan mengakibatkan kesalahpahaman dalam penyampaian pesan informasi *input* dan *output* yang dilakukan melalui komunikasi digital saat melakukan pertemuan ataupun *meeting* karena gangguan sinyal sedikit sulit di atasi karena tergantung dari daerah dan kuota data internet yang dimiliki oleh karyawan karena masing-masing daerah memiliki kecepatan sinyal yang berbeda beda.

Kendala lainnya adalah kurangnya persiapan yang dilakukan oleh karyawan PT Ellisa Kreatif Indokarya saat melakukan pertemuan melalui *Zoom Meeting* seperti ada yang sedang di jalan, ada yang *off camera* karena sedang melakukan kegiatan lain, dan terganggu suara bising dari karyawan lainnya saat memulai pertemuan atau rapat melalui komunikasi digital sebagai media komunikasi ini. Dalam penggunaan komunikasi digital sebagai media komunikasi ini memerlukan data internet yang tidak gratis dan berbayar, hal ini merasa menjadi beban oleh karyawan atau karyawan merasa terbebani walaupun memang tidak perlu mengeluarkan ongkos dan biaya lainnya untuk bekerja di rumah (*Work From Home*) akan tetapi jika di kalkulasikan mungkin lebih besar biaya kuota internet di bandingkan dengan biaya ongkos lainnya dan hal ini yang membuat karyawan, masyarakat apalagi mahasiswa merasa sangat terbebani.

## **3. Solusi dalam mengatasi kendala-kendala pada Efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi dimasa pandemi Covid-19 (Studi kasus PT. Ellisa Kreatif Indokarya)**

Solusi atau upaya yang dilakukan oleh PT Ellisa Kreatif Indokarya dalam mengatasi kendala-kendala pada Efektivitas komunikasi digital sebagai media komunikasi dimasa pandemi covid-19 seperti kurangnya persiapan yang dilakukan oleh karyawan yaitu dengan cara memberikan informasi kepada seluruh karyawan

di hari dimana H-1 (Satu hari sebelumnya) sebelum pertemuan rapat ataupun *meeting* melalui komunikasi digital sebagai media komunikasi agar seluruh karyawan di saat memulai pertemuan *meeting online* ini sudah mempersiapkan diri dari segi peralatan seperti menyiapkan ruangan yang tidak dapat diganggu dan juga menyiapkan waktu memang khusus untuk *meeting* jadi tidak ada alasan lagi di jalan ataupun melakukan kegiatan lainnya dikarenakan memiliki tanggung jawab kepada perusahaan serta mempersiapkan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam pertemuan agar tidak terjadi gangguan sinyal ataupun gangguan komunikasi lainnya yang dapat memperlambat jalannya pertemuan atau *meeting* ini.

Solusi lainnya yang dilakukan oleh PT. Ellisa Kreatif Indokarya adalah dengan memberikan atau membiayai kuota internet yang dikeluarkan karena melakukan pekerjaan dan mengumpulkan pekerjaan melalui *online* atau daring ini agar karyawan tidak merasa semakin terbebani di saat melakukan pekerjaan dari rumah (*Work From Home*) dan membuat karyawan menjadi lebih bersemangat dalam bekerja di rumah.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Efektivitas Komunikasi Digital Sebagai Media Komunikasi di masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT Ellisa Kreatif Indokarya), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Komunikasi Digital Sebagai Media Komunikasi di masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Ellisa Kreatif Indokarya) sudah efektif dikarenakan dengan adanya komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19, PT Ellisa Kreatif Indokarya dalam mengadakan rapat atau pertemuan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan atau perusahaan melalui *Zoom Meeting* dan juga dengan adanya komunikasi digital sebagai media komunikasi dapat memberikan informasi dan tugas melalui *Whatsapp Group*. Dengan demikian adanya komunikasi digital sebagai media komunikasi di masa pandemi Covid-19 di PT. Ellisa Kreatif Indokarya sudah efektif, dengan *Zoom Meeting* dan *Whatsapp Grup* di masa pandemi bisa memudahkan komunikasi perusahaan dalam menyampaikan tugas ataupun rapat sudah tidak terhalang oleh waktu dan tempat.

2. Hambatan yang dihadapi pada Efektivitas Komunikasi Digital Sebagai Media Komunikasi di masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT Ellisa Kreatif Indokarya) yaitu disebabkan karena tidak bisa bertemu langsung dikarenakan adanya peraturan PSBB (Perbatasan Sosial Berskala Besar) oleh pemerintah mengharuskan seluruh karyawan PT Ellisa Kreatif Indokarya menggunakan efektivitas komunikasi digital. Kendalanya adalah penggunaan komunikasi digital memerlukan data atau internet yang harus di beli dan tidak gratis, serta koneksi atau kecepatan internet berbeda beda tergantung situasi, tempat, kondisi, ataupun cuaca dan hal tersebut adalah yang menyebabkan kesalahan pendengaran dalam penyampaian informasi ataupun pending dan samar-samar jika terjadi sinyal yang salah. Perbedaan sinyal dari setiap daerah masing-masing merupakan suatu kendala yang membuat berjalannya rapat melalui komunikasi digital sebagai media komunikasi terutama melalui *Zoom Meeting* menjadi terhambat ataupun terganggu dikarenakan gangguan sinyal yang berbeda tersebut.
3. Solusi dalam mengatasi kendala pada Efektivitas Komunikasi digital Sebagai Media Komunikasi di masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT Ellisa Kreatif Indokarya) adalah dengan cara melakukan pemberitahuan pelaksanaan pertemuan ataupun rapat ataupun *meeting* dan pertemuan lainnya melalui komunikasi digital sebagai media komunikasi *Zoom Meeting* dengan cara menyampaikan informasi melalui *Whatsapp Group* H-1 (satu hari sebelumnya) sebelum pertemuan dilakukan agar civitas PT Ellisa Kreatif Indokarya dapat mempersiapkan waktu agar tepat waktu disaat pertemuan dan juga mempersiapkan sesuatu hal sebelum pertemuan *Zoom Meeting* seperti dengan persiapan yang matang seperti mempersiapkan latar belakang atau *background* agar terlihat rapih, mempersiapkan sinyal yang di gunakan agar tidak terjadi gangguan sinyal atau meminimalisir gangguan sinyal yang menyebabkan *noise* (Gangguan) dalam komunikasi saat pertemuan dimulai, mempersiapkan tempat yang nyaman dan juga tidak ada gangguan suara dari luar lainnya saat pertemuan agar di saat pertemuan melalui *Zoom Meeting* berjalan dengan baik tanpa gangguan suara dari luar.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abimanyu, A. (2015). *Buku pelajaran marketing untuk anda yang ingin tapi malas belajar marketing*. Surabaya: PT Elex Media Komputindo.
- Ardianto, E. (2011). *Metodologi penelitian untuk public relations kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baran, S. J. (2011). *Pengantar komunikasi massa literasi media & budaya*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Humanika.
- Baran, S.J. & Davis, D. K. (2010). *Teori komunikasi massa, dasar pergolakan, dan masa depan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Bungin, B. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, O. U. (2011). *Ilmu komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamid, F. & Heri B. (2011). *Ilmu komunikasi: sekarang dan tantangan masa depan*. Jakarta: Kencana.
- Hermawan, A. (2012). *Komunikasi pemasaran*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ismaniar, H. (2015). *Administrasi kesehatan masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kotler, P. & Keller, K. L. (2012). *Manajemen pemasaran jilid i edisi ke 12*. Jakarta: Erlangga.

- Kriyantono, R. (2010). *Riset komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik praktis riset komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- La O. A., Sudarmanto & Ismail S. W. (2018). *Tata kelola perguruan tinggi berbaris akreditasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Morissan (2011). *Manajemen media penyiaran: strategi mengelola radio dan televisi*. Jakarta: Kencana.
- Mulyani, S. (2016). *Metode analisis dan perencanaan sistem*. Bandung: Abdi Sistematika.
- Mulyaningsih, E. (2011). *Evaluasi proses suatu program*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Richard West & Lynn H.T. *Pengantar teori komunikasi: analisis dan aplikasi*. Buku 1 edisi ke-3 Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika, 2009, hlm. 103.
- Rakhmat, J. (2013). *Psikologi komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Rivers, W. L, et al. (2012). *Media massa & masyarakat modern. Edisi kedua. Cet ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rochajat, Harun & Elvinaro A. (2011). *Komunikasi pembangunan & perubahan sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, S. (2010). *Teori psikologi sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Susanto, E.H. (2010). *Komunikasi Manusia Esensi dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik, Edisi 1*. Jakarta: Mitra Waacana Media.

Tamburaka, A. (2013). *Literasi media "Cerdas bermedia khalayak media massa"*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

## **Jurnal**

Ardiyanti, H. (2020). "*Komunikasi Media Yang Efektif Pada Pandemi Covid-19*". Vol. XII, No. 7/1/Puslit/April/2020.

El Junus, R. (2020). "*Digital Marketing During the Pandemic Period: A Study of Islamic Perspective*". ISSN: 2716-4810 (print) ISSN: 2716-4802 (online).

Keomorakath P, & Wahyu S. (2020). "*The Performance of Information System in Facilitating Work Communication By Online - Based Application During Covid Crisis*". Vol.1 No.1 June 2020 ISSN: 2722-5062, DOI10.20473/ajim.v1i1.19398.

Komalasari, R. 2020. "*Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19*". TEMATIK Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Vol. 7, No. 1 Juni 2020.

Livari S. S & Netta. (2020). "*Digital transformation of everyday life–How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care?*". *Ventä-Olkkonen International Journal of Information Management*, 55 (2020) 102183.

Ni'matul R & Nurliya. (2020). "*Media Sosial Sebagai Media Alternatif Manfaat dan Pemuas Kebutuhan Informasi Masa Pandemi Global Covid 19 (Kajian Analisis Teori Uses And Gratification)*". *Al-l'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* p-ISSN 2598-8883 | Vol. 4, No 1, September 2020, pp. 1-16 e-ISSN 2615-1243.

Puti Nova, S. (2018). "*Efektivitas Komunikasi Aplikasi Telegram Sebagai Media Informasi Pegawai PT Pos Indonesia (Persero) Kota Pekanbaru*". *JOM FISIP*, Vol. 5 No. 1 April 2018.

# TRANPARANSI PERKEMBANGAN KONSEP KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH

By:

Taufiqurokhman<sup>1</sup>, Andriansyah<sup>2</sup>, Evi Satispi<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof.Dr. Moesopo (Beragama),  
jalan Hanglekir I Nomor 8 Jakarta.

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta,  
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat , Cireundeu, Ciputat Tim., Kota Jakarta Selatan.

Email:

taufiqurokhman@dsn.moestopo.ac.id<sup>1</sup> dan evi.satispi@umj.ac.id<sup>2</sup> dan  
andriansyah@dsn.moestopo.ac.id<sup>3</sup>

---

## Abstraksi

Keterbukaan dalam perkembangan pengambilan kebijakan menjadi keharusan dalam pemerintah daerah guna melaksanakan pelayanan publik yang baik sesuai dengan Good Governances. Tujuan penelitian adalah melihat perkembangan konsep administrasi ke administrasi public dalam pelaksanaan keputusan pemerintah daerah. Sehingga keterbukaan sebuah kebijakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat menghasilkan kepuasan terhadap pelayanan public untuk masyarakat luas. Methodology penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap permasalahan keterbukaan perkembangan kebijakan dalam pelayanan public oleh pemerintah daerah. Hasilnya, masyarakat dapat menikmati dan merasakan adanya keterlibatan partisipasi dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah daerah. Dasar hukum atas pengambilan pelaksanaan kebijakan public oleh pemerintah adalah adanya azsa desntralisasi yaitu pemberian otonomi daerah untuk pemerintah daerah. Seperti dijaminin dalam Undang-undang Nomor 32/2004 pasal 14 terhadap urusan wajib pemerintah daerah.

**Key Word:** *Transparansi, Perkembangan Konsep Kebijakan, Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah.*

## A. Background

Transparansi dalam pengambilan analisa Kebijakan publik yang telah diadopsi dan dilegitimasi oleh pemerintah dan lembaga legislatif, sudah semestinya dilaksanakan melalui sistem administrasi publik, tak terkecuali mengenai kebijakan desentralisasi oleh pemerintah daerah, Abdul Wahab, Solichin, (1997),. Masalah ini dikemukakan oleh Heaphey yang menjelaskan, keputusan-keputusan seringkali tidak dibuat di lapangan dan segala petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis) selalu berasal dari kantor-kantor pusat departemen. Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah dilaksanakan dalam sistem administrasi publik baik di tingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kebijakan publik kurun waktu 2001 - 2004 telah dievaluasi kembali dan kedua Undang-Undang tersebut kemudian direvisi dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Melihat substansi undang-undang yang baru, terlihat adanya penguatan partisipasi sipil dalam pengambilan sebuah kebijakan, (Chandra, Eka, dkk. (2003). Sehingga nampak terjadinya perubahan dan improvisasi sehingga otomatis akan membawa perubahan pada tahapan pelaksanaan kebijakan publik dalam penyelenggaraan otonomi daerah, merupakan sebuah langkah inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk lebih meningkatkan partisipasi dan pelayanannya, Hatifah Sj. Sumarto. (2004) dan Lalolo, Loina. (2003) akan pentingnya akuntabilitas dari pemerintahan daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 telah ditegaskan secara terperinci urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang meliputi 16 urusan wajib yaitu : (1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; (2) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; (3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) Penyediaan sarana dan prasarana umum; (5) Penanganan bidang kesehatan; (6) Penyelenggaraan pendidikan; (7) Penanggulangan masalah sosial; (8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan; (9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan

menengah; (10) Pengendalian lingkungan hidup; (11) Pelayanan pertanahan; (12) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan; (14) Pelayanan administrasi penanaman modal; (15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; (16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di samping urusan wajib tersebut, di dalam ayat (2) Pasal yang sama dijelaskan pula mengenai urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya penulis akan menjelaskan hasil dan diskusi dari konsep administrasi negara perkembangan menjadi sebuah administrasi dan menghasilkan kebijakan public, Subarsono. (2005) serta adanya paradigma administrasi negara, perkembangan dari administrasi negara ke administrasi publik serta konsep teorinya seperti di bawah ini.

## **B. Result and Discussions**

Penulisan penelitian ini penulis akan lebih melihat dari sisi konsep perkembangan kebijakan publik yang diawali dari perkembangan konsep administrasi negara, kemudian berkembang menjadi administrasi kebijakan publik. Sehingga penulis mengawali hasil penelitian ini akan mengupas tentang konsep administrasi negara, dimana dalam perkembangannya banyak mendapat sorotan dari para ahli terutama dalam penggunaan istilah administrasi negara atau administrasi publik. Hal ini disebabkan adanya pergeseran titik tekan dari Administration of Public ke Administration by Public. Dimana dalam Administration of Public negara sebagai agen tunggal dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan atau pemerintahan.

Konsep ini menekankan fungsi negara atau pemerintahan lebih berfokus public service (pelayanan publik) atau disebut Administration for Public). Sementara Administration by Public menurut Utomo (2008:7) berorientasi bahwa publik demand are differentiated, dalam arti fungsi negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada putting the customers in the driver set. Dimana menurut Utomo bahwa determinasi Negara/Pemerintahan tidak lagi merupakan faktor utama atau sebagai driving forces, Edwar III, George C. (1980).

Untuk itu penulis mengemukakan beberapa pengertian dari berbagai ahli tentang istilah administrasi publik. Istilah ini sangat beragam tergantung dari perspektif mana para ahli melihatnya apakah menggunakan istilah Administrasi Negara atau Administrasi Publik: (1) Administrasi negara ialah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. (Siagian, 1996:8); (2) Douglas dalam Stillman (1992:2) mengemukakan "Public administration is the produced of good and service designed to serve the need of citizen"; (3) Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3), mengemukakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan public; (4) Dubnick and Romzek (1991), Thea practice of public policy administration involves the dynamic reconciliation of various forces in government"s efforts to manage public and program; (6) Menurut John M. Pffifner dan Robert V. Presthus (1960:4,5,6) mengemukakan sebagai berikut: "Public Administration involve the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies. Artinya bahwa administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badanbadan perwakilan politik. Dan "Public Administration may be defined as the coodination of individual and group effort to carry out public policy. It mainly occupied with the dayti work of government. Artinya bahwa administrasi negara dapat didefenisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Selanjutnya penulis akan menjabarkan terhadap paradigme perkembangan administrasi negara yang berkembang menjadi tiga paradigme seperti di bawah ini.

## **1. Perkembangan Paradigma Administrasi Negara**

Prinsip ilmu pengetahuan itu bersifat nisbi, yaitu dapat berubah atau berkembang kapan dan dimana saja. Perubahan atau perkembangan inilah yang disebut dengan paradigma. Menurut Thomas Kuhn (dalam Keban, 2008:31) mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai, metode-

metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Administrasi Negara sebagai suatu disiplin ilmu tidak terlepas dari perubahan dan perkembangan paradigma itu sendiri.

Perkembangan atau pergeseran paradigma secara garis besar dikemukakan Keban (2008:31), bahwa telah terjadi lima paradigma dalam administrasi negara, diuraikan sebagai berikut: Paradigma I (1990-1926) dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Pemisahan antara politik dan administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak rakyat. Badan yudikatif dalam hal ini berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Senada dengan itu Ibrahim (2009:5), fokus administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasipemerintahan, sedangkan masalah pemerintahan, politik, dan kebijakan merupakan substansi ilmu politik dalam filsafat administrasi, Siagian, Sondang, P, (1996).

Sebagai tonggak sejarah yang dapat dipergunakan sebagai momentum fase paradigma ini ialah tulisan dari Frank J. Goodnow dan Lenald D. White (dalam Thoha:2010:18), bahwa didalam bukunya *Politics and Administration*, Frank Goodnow berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lain. Dua fungsi pokok tersebut ialah politik dan administrasi sebagaimana yang tertulis dalam judul bukunya. Politik menurut Goodnow harus membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan atau melahirkan keinginan-keinginan negara. Hal ini dikuatkan oleh Hidayat, Misbah.L. (2007). Sementara administrasi diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, Gortner, Harold F. (1984). Dengan demikian pemisahan kekuasaan memberikan dasar perbedaan antara politik dan administrasi. Badan Legislatif dengan ditambah kemampuan penafsiran dari badan yudikatif mengemukakan keinginankeinginan negara dan kebijaksanaan formal. Sedangkan badan eksekutif mengadministrasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut secara adil dan tidak memihak kepada salah satu kekuatan politik. berarti penekanan paradigma I ini adalah pada locus-nya, yakni memperlakukan di mana seharusnya administrasi negara ini berada. Jelas disini Gordon dan pengikut-

pengikutnya berpendapat (dalam Thoha. 2010:19) bahwa administrasi negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan.

Paradigma 2 (1927-1937) disebut sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. Dalam paradigma ini fokus administrasi negara ialah penekanan pada prinsip-prinsip administrasi negara yang dianggap berlaku secara universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Tahun Irfan, M. (1994).menerbitkan bukunya yang berjudul *Principles of Public Administration*. Buku ini merupakan buku teks kedua yang membahas secara penuh dibidang administrasi negara, Presthus, (1960), dan Leonal D.white yang termasuk paradikma pertama. Prinsip-prinsip administrasi negara dikemukakan oleh Willoughby ini memberikan indikasi terhadap trend baru dari perkembangan bidang ini. Sekaligus membuktikan bahwa prinsip-prinsip itu ada dan dapat di pelajari. Dengan demikian, adminsitrator-administrasi bisa menjadi ahli dan cakap dalam pekerjaannya kalau mereka mau mempelajari bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut. (Thoha:2010:21).

Pada fase paradigma kedua ini terdapat beberapa karya yang menonjol antara lain sebagaimana dikemukakan oleh Thoha (2010:22) disebutkan: Mary Parker Foller, menulis *Creative Experience* (1930), Henry Fayol, *Industrial and General Management* (1930), James D. Mooney dan Alan C. Reiley, *Principles of Organization* (1939), dan berbagai tulisan-tulisan lainnya yang megemukakan prinsip-prinsip administrasi negara tersebut.

Analisa Thoha dalam bukunya *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* (2008:24) dan Sugandha, Dann. (1989).lebih lengkap mengemukakan bahwa bersamaam dengan timbulnya tantangan terhadap dikotomi tradisional antara politik dan administrasi, maka timbul pula suatu perselihan yang lebih mendasar yakni tentang prinsi-prinsip admnistrasi. Tahun 1946, Herbert Simon mendahului bukunya *Administrative Behavior* menulis suatu artikel dalam *Publik Administartion Reviue*, berjudul "The proverbs of Administration" pada tahun berikutnya, Rober A.

Paradigma ketiga (1950-1970) adalah paradigma administrasi negara sebagai Ilmu Politik. Menurut paradigma ini tidak sepatasnya ada dikotomi antara politik dan administrasi negara karena memang tidak realistis. Dalam konsteks ini, administrasi negara bukannya value free atau dapat berlaku dimana saja

tetapi justru dipengaruhi nilai-nilai tertentu. Paradigma ini menganggap studi administrasi negara adalah bagian dari ilmu politik, hanya saja berbeda titik beratnya. Ilmu politik berfokus pada proses penyusunan kebijakan kekuatan sosial politik di luar birokrasi, administrasi negara berfokus pada penyusunan kebijakan dalam tubuh birokrasi, tetapi tidak terlepas dari sistem politik yang berlaku. (Ibrahim,2009:6) Terkait dengan itu Thoha, (2010) secara singkat dikatakan bahwa fase paradigma ketiga ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dengan ilmu politik. Hal ini dikuatkan oleh John dan Valderama, Camilo. (2001) tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap negara dalam pengambilan sebuah keputusan.

Akan tetapi, konsekuensi dari usaha ini ialah keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan fokus keahliannya yang esensial. Itulah sebabnya tulisan-tulisan administrasi negara dalam tahun 1950-an penekanan pembicaraannya pada wilayah kepentingan (area of interes) atau sebagai sinonim dari ilmu politik. Administrasi negara sebagai suatu bidang studi yang dapat diidentifikasi memulai perjalanan yang panjang menurun bukit yang berputar-putar.

## **2. Dari Administrasi Negara ke Adminisitrasi Publik**

Perkembangan ilmu Administrasi Negara akhir-akhir ini telah mengalami pergeseran titik tekan dari Administration of Public ke Adminisitrion by Public dimana dalam Administration of Public negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi negara/pemerintahan. Konsep ini menekankan fungsi negara/pemerintahan bertugas sebagai public service (Adminisitration for Public). Sementara Administration by Public berorientasi bahwa publik demand are differetianted, dalam arti fungsi negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada putting the customers in the driver set. Dimana determinasi negara/pemerintah tidak lagi merupakan faktor atau aktor utama sebagai driving forces. (Utomo, 2008:7).

Dampak pergeseran tersebut menurut Utomo, telah mengakibatkan perubahan makna public sebagai negara, menjadi public sebagai masyarakat. Dengan demikian pendekatan ilmu administrasi negara tidak lagi berorientasi kepada negara tetapi

kepada masyarakat atau Customer's Oriented atau Customer's Approach. Dan hal ini menjadi tuntutan perubahan dari government yang lebih menitikberatkan kepada otoritas menjadi governance yang menitikberatkan kepada kompatibilitas di antara para aktornya ialah : Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat.

Dikalangan masyarakat istilah Public Administration selalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Administrasi Negara. Terjemahan bebas inilah yang sering menimbulkan pertanyaan di kalangan akademisi seiring dengan perubahan masyarakat yang semakin dinamis. Terjemahan bebas ini tentunya dilandasi dengan kondisi faktual yang dilihat dari pengelolaan negara yang berorientasi pada kekuasaan. Orientasi kekuasaan yang dilakukan oleh negara inilah yang telah menimbulkan persepsi tentang pengertian Public Administration dikonotasikan dengan Administrasi Negara. Namun dalam perkembangan kemudian, istilah ini telah bergeser sesuai dengan pergeseran corak berfikir serta realita perubahan pengelolaan negara itu sendiri.

Dengan demikian sesungguhnya telah terjadi perubahan makna public sebagai negara, menjadi public sebagai masyarakat. Dalam arti bahwa administrasi negara bukan lagi terlalu berorientasi kepada aktivitas oleh negara, tetapi menjadi oleh, untuk dan kepada masyarakat. Pendekatan administrasi negara tidak lagi kepada negara tetapi titik tekannya kepada masyarakat.

Utomo, (2008:8) mengatakan bahwa proses, sistem, prosedur, hierarchi atau lawfull state tidak lagi merupakan acuan yang utama meskipun tetap perlu 35 diketahui dan merupakan skill. Tetapi results, teamwork, fleksibilitas haruslah lebih dikedepankan disebabkan oleh tekanan, pengaruh, adanya differentiated public demand. Sedangkan sebagai seorang administrator atau mereka yang mendalami administrasi publik dituntut untuk memiliki pengetahuan, skill, kemampuan, profesionalisme, kapabilitas untuk mengembangkan konsep organisasi dan manajemen serta mengorganisir dan memanager aktivitas dan infrastruktur dalam memahami tuntutan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah sebabnya mengapa mereka ini tidak dituntut untuk tidak saja memiliki responsibility dan accountability tetapi juga harus memiliki responsiveness, transparency, integrity dan impartiality. Dari penjelasan di atas tidak berarti bahwa

administrasi publik (negara) melepaskan atau terlepas sama sekali dari kehidupan atau permasalahan negara.

Meskipun administrasi negara (publik) tidak lagi berdasarkan pada paradigma I (Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi), tetapi tidak berarti tidak terkait atau dikaitkan dengan negara atau pemerintah.

## **C. Concept of Public Policy and Transparations**

### **1. Konsep Kebijakan Publik**

#### **a. Perkembangan Konsep Kebijakan Publik**

Isitilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undangundang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (policy makers) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Syafie (2006:104), mengemukakan bahwa kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafie mendefenisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah, Kadji, Yulianto.(2008).

Kamus Besar bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). Mustopadidjaja (1992:30) menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan, Richard J, (1992).

Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Sementara itu Parsons (2006:15), memberikan gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik. Menurutnya kata policy mengandung makna kebijakan sebagai rationale, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. Artinya menurut Suhirman. 2003, sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Langkah ini merupakan sebuah wujud langkah kongkrit melaksanakan reformasi dalam kebijakan public, Sinambela, Poltak, Lijan. (2006).

Makna kebijakan seperti yang dikutip oleh Jones (1996:47) dalam pandangan Prof Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, yang menyatakan bahwa kebijakan itu ialah : —a standing decision characterized by behavior consistency and repetiveness on the part of both those who make it and those who abide by it”.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para pakar di atas, penulis berpendapat bahwa kebijakan publik identik dengan regulasi atau aturan atau dapat diartikan sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus dipahami secara utuh dan benar. Kebijakan publik diawali dengan adanya issue yang menyangkut kepentingan bersama dimana dipandang perlu untuk diatur melalui formulasi kebijakan dan disepakati oleh legislatif dan eksekutif untuk ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah, maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

## **b. Tingkatan Perkembangan Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho (2006:31), menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni : (1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu (a) UUD1945, (b) UU/Perpu, (c) Peraturan Pemerintah,

(d) Peraturan Presiden, dan (e) Peraturan Daerah. (2) Kebijakan Publik yang bersifat (meso) atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota. (3) Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dari gambaran tentang hirarki kebijakan di atas, nampak jelas bahwa kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjabar atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan. Sedangkan menurut Younis (1990:3), membagi kebijakan publik atas tiga tahap yakni : formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan Gortner (1984:30-40), menjelaskan ada lima tahapan dalam proses terjadinya kebijakan, yakni pertama identifikasi masalah, kedua formulasi, ketiga legitimasi, keempat aplikasi dan kelima evaluasi.

Dengan memahami pendapat para pakar tentang kebijakan tersebut, setidaknya terdapat butir-butir yang merupakan ciri penting dari pengertian kebijakan. Butir-butir tersebut adalah : (1) Kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. (2) Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. (3) Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana. (4) Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. (5) Kebijakan adalah produk hukum yang harus ditatapi dan berlaku mengikat terhadap warganya, Shafritz, J.M. and E.W. Russel. (1997).

## 2. Konsep Tranparansi

Transparansi dalam Good Governance Sebelum menjelaskan tentang Konsep Transparansi dirasa perlu menelaah tentang konsep Good Governance. Konsep Good Governance sesungguhnya masih kelabu dan berkembang terus dalam berbagai perbincangan akademik.

### a. Konsep Good Governance

Pada awalnya Bank Dunia mendefinisikan “Governance” sebagai “the exercise of political power to manage a nation”s affair (Davis and Keating, 2000). Bank Dunia juga menambahkan karakteristik normative tentang Good Governance, yaitu: “An efficient public service, and independent judicial system and legal frame work to enforce contract; the accountable administration of public funds; an independent public auditor, responsible to a representative legislature; respect for law and human rights at all levels of government; a pluralistic institutional structure; and free press”, Lewis, Phillip, Organizational Communication, Columbus, Ohio: Grid Publishing, Inc, (1980).

Sementara itu UNDP mendefinisikan Good Governance sebagai “The Exercise of political, economic, and administrative authority to manage the nation”s affair at all levels. OECD dan WB mensinonimkan Good Governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar bebas, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan kepastian hukum dan suasana politik untuk tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Selanjutnya UNDP juga mensinonimkan Good Governance sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (LAN, 2000:7).

Atas dasar inilah, maka disusun Sembilan karakteristik Good Governance, yaitu; (1) Partisipation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi isntitusi legitimasi yang mewakili kepentingannya; (2) Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk azazi manusia; (3) Transparency. Tranparansi di bangun atas dasar kebebasan arus informasi

yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan; (4) Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders; (5) Consensus Orientation. Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur; (6) Equity. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka; (7) Effectiveness and efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin; (8) Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders; (9) Strategic Vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Bappenas dalam Modulnya Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (2007:13) mengemukakan bahwa konsep tentang government, good governance dan good public governance. Menurutnya secara umum istilah government lebih mudah dipahami sebagai “Pemerintah” yaitu lembaga beserta aparatur yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat.

Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. UN Commission on Human Settlements (1996) menjelaskan bahwa governance adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negara dan para lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan umum mereka. Hal ini merupakan sebuah proses yang berkesinambungan dimana segala jenis kepentingan maupun kebutuhan dapat diakomodasikan dan tindakan korektif diterapkan. Termasuk pula didalamnya lembaga dan regim formal yang dikuasakan untuk menegakkan kepatuhan, maupun pengaturan secara informal sehingga masyarakat dan lembaga memiliki kesepakatan atau kesamaan kepentingan.

Governance juga dapat diungkapkan oleh Mustopadidjaja (2003) sebagai : 1) Kepemerintahan, 2) Pengelolaan pemerintahan, 3) Penyelenggaraan pemerintahan, 4) Penyelenggaraan negara, dan 5) Administrasi negara.

## **b. Konsep Transparansi dalam Good Governance.**

Dalam era reformasi dimana pilar-pilar Good Governance telah menjadi sesuatu yang urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka saat itu pula transparansi penyelenggaraan pemerintahan sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Persoalan pokok dan menjadi sebuah pertanyaan dalam kajian ini adalah mengapa perlu transparansi dalam Good Governance? Untuk itu, sebelum kita lebih jauh berupaya menemukan format dan konsep transparansi mungkin pertanyaan di atas perlu dijawab terlebih dahulu. Sebagai ilustrasi dapat di kemukakan ketika kandidat Kepala Daerah maupun kandidat legislatif mencalonkan diri dalam Pilkada maupun Pileg, maka suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri mereka akan menawarkan seperangkat janji kepada para pemilih, demikian juga halnya para calon anggota legislatif juga akan memberikan seperangkat janji kepada konstituennya. Selanjutnya setelah mereka terpilih sebelum melaksanakan tugasnya mereka akan mengangkat sumpah. Hal itu semua merupakan seperangkat janji yang harus dipenuhi kepada para pemilih ataupun kepada diri sendiri.

Oleh sebab itu, menyimak ilustrasi diatas maka seharusnya yang menjadi sasaran utama penyelenggaraan pemerintahan adalah kepercayaan. Artinya ketika sang kandidat masuk dalam sistem pemerintahan, maka seperangkat janji-janji yang diucapkan dalam kampanyenya harus direalisasikan demi terbangunnya kepercayaan terhadap publik atau konstituennya.

Kepercayaan akan tumbuh karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan. Kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau commitment kepada orang lain atau diri sendiri tersebut adalah tanggung jawab (responsibility) . Dengan demikian pemerintah yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada publik maupun konstituennya.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik , maka salah satu cara dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi (keterbukaan). Transparansi penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti yang sangat penting dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Bahkan dengan adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Ini berarti bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan makna yang sangat berarti yakni disamping sebagai salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, kecuali itu pula dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance dan juga dapat mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Disinilah kuncinya mengapa transparansi sangat diperlukan dalam Good Governance bahkan merupakan salah satu syarat penting. Mungkin masih segar dalam ingatan kita, bahwa salah satu yang menjadi persoalan diakhir masa masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi. Dan salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan ini adalah manajemen pemerintah yang tidak transparan. Transparansi (transparency) secara harafiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tranparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Dalam arti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan baik informasi keuangan maupun lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan, Humaniora Anderson, James, A. (1997).

Arief, Syaiful, (2006), mengemukakan dalam dunia demokrasi bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Selanjutnya Tjokromidjoyo (2003:123), menjelaskan bahwa transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi dan badan usaha. Good Governance tidak membolehkan manajemen pemerintahan yang tertutup, Said Zainal, (2004).

Itulah sebabnya perlu ada perumusan kembali tentang pemerintahan yang baik atau good governance tersebut, agar kita memiliki kesepahaman yang sama. Karena sering pemerintahan yang baik dapat diartikan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan aturan perundangundangan dengan memperhatikan aspirasi publik atau hanya memenuhi aspirasi publik. Disinilah pentingnya kesepahaman bersama tentang istilah pemerintahan yang baik atau good governance dalam konteks otonomi daerah. Perlu dipahami bahwa konsep otonomi daerah secara filosofis telah mengubah makna government yang berorientasi pada otoritas kepada governance yang berorientasi pada interaksi antara pemerintah (government), masyarakat (public) dan swasta (privaty sector).

### **3. KebijakanTransparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

#### **a. Konsep Pemerintahan Daerah**

Istilah pemerintah menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin (2004:51), berasal dari kata dasar perintah yang mendapat sisipan eml yang berarti suatu system dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan social, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negara. Dikuatkan kembali oleh Koontz, Harold and Cryill O'Donnel. (1972) terhadap pentingnya mengatur atau menege kekuasaan dalam pemerintah daerah.

Istilah pemerintan ini pula yang oleh kebanyakan kalangan menyepadankan dengan istilah government (bahasa Inggeris) dan gouvernement (bahasa Perancis) yang keduanya berasal dari perkataan Latin gubermaculum, yang artinya kemudil. Istilah pemerintah ini sering pula disinonimkan dengan penguasa, kadang juga diartikan sama dengan eksekutif, yakni pemegang atau yang melaksanakan pemerintahan secara riil dan ada pula yang mengistilahkan pemerintah dengan jawatan atau aparatur dalam susunan pemerintah, Mardiasmo, (2002),. Sementara itu, istilah pemerintahan dalam bahasa Inggeris dikenal dengan “administration” yakni proses, perbuatan atau cara memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Selanjutnya Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Mustopadidjaja, AR. (2003), mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif.

Menurut Bagir Manan (1994) dengan mengacu kepada beberapa pendapat para sarjana, menjelaskan pula bahwa secara yuridis ada perbedaan yang sangat nyata antara Inegaral dan Ipemerintahl. Negara adalah sebuah badan (body), sedangkan pemerintah adalah alat kelengkapan negara (organ) dalam melaksanakan sebuah keputusan atau kebijakan serta pembuatan kebijakan harus dilaksanakan secara membumi, Tangkilisan, S Nogi, Hessel. (2002).

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, dapat dikonstruksikan bahwa pemerintah dalam arti luas dalam konteks Indonesia adalah keseluruhan alat kelengkapan negara, yaitu Lembaga Tertinggi (MPR), dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara (DPR, Presiden, MA dan BPK). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah Presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif yang selain atau tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan dari pemahaman di atas, maka dapat diberi restriksi seperti yang diungkapkan oleh Grindle, S. Merilee, (1980). Bahwa kebijakan itu terdiri dari Konteks dan kontensnya dalam pelaksanaannya. Sehingga pemahaman dari kebijakan diatas dapat di simpulkan sebagai berikut: : 1) Kalau pemerintah hanyalah eksekutif yang menjalankan pemerintahan dalam arti sempit, sedangkan pemerintahan meliputi seluruh unsur atau fungsi penyelenggara Negara baik eksekutif, legislative maupun yudikatif. 2) Kalau pemerintah menunjuk ke suatu badan pemerintahan, sedangkan pemerintahan merupakan proses atau cara dalam memerintah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jhon Willy Hamengkubuwono ke X, Sultan. 2007

## **b. Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Format dan konsep transparansi adalah sebuah hasil dari regulasi kebijakan seperti diungkapkan oleh Smith, Rex Deighton. (2004). yang akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari salah satu azas-azas umum penyelenggaraan negara seperti yang diungkapkan oleh Mustapadijaja. (1992). Dan sebagaimana diatur oleh UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Bahkan dengan diberlakukannya UURI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik, maka sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan penyelenggaraan negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara. Selain pentingnya peningkatan partisipasi dan pengabdian masyarakat dalam memberikan masuknya pada pemerintah daerah, Kusnaka & Hikmat, Harry. (2003).

Azas keterbukaan (transparansi) menurut Roumeen. (2006). dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan azas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah jaminan kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui "siapa mengambil keputusan apa beserta alasannya". Menurut Utomo, (2006:77), formulasi dan implementasi otonomi daerah tidak menyimpang dari makna dan the ultimate goal, akan memberikan warna good governance bagi pemerintahan di daerah. Maksudnya bahwa pemerintahan yang penuh dengan kompatibilitas antar komponen, responsif, responsible, akuntabel dan transparans terhadap keberadaan, keinginan, tantangan dan tuntutan daerah.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat menjamin bahwa kemandirin daerah dalam menciptakan masyarakat madani, Naihasya, Syahrir. (2006). Sehingga keinginan terhadap sebuah kebijakan untuk masyarakat akan segera dapat cepat terealisasi. Senada dengan itu Sultan Hamengkubuno ke X dalam bukunya Merajut Kembali ke Indonesia Kita (2007:230), mengemukakan bahwa transparansi akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggraan administrasi publik. Disamping itu transparansi akan mampu mendorong munculnya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan.

Menurut Krina. P makna transparansi yang dikutipnya dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, (2002:18. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (<http://www.goodgovernancebappenas.go.id/konsepfiles/good%20governance.pdf>, Diakses, 06 November 2006).

Dengan demikian transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

#### **D. Methodology**

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dengan menggunakan teori Straus, Ansel L dan Yulief Corbin. (1990). Desaint penelitian mengunaan deskriptif. Data diperoleh secara purpose, melalui obsrvasi dan wawancara. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menonjolkan pengungkapan fenomena menurut persepsi subyek penelitian yang berkedudukan terkait dengan obyek penelitian serta memahami masalah dan kompeten untuk mengurai obyek penelitian secara mendalam. Alasan ini merujuk pada pendapat Denzim and Lincoln (1994), menjelaskan: Equally, all qualitative research tradition give as much attention to the inner as well as the outer states of human activity, Jacob (1987), for instance, notes the “subjective perceptions,” “emotions,” “reflective interpretations,” and “mental standards,” that can be include within the “characteristics” of qualitative research, Denzin, Norman K., dan Yonna S. Lincoln. 2009.

Penelitian dilaksanakan dengan pandangan yang mengacu pada pandangan Creswel, John. W. (1994), yaitu sebagai berikut : (a) Qualitative researchers is the concerned primarily with process, rather than outcomes or product; (b) Qualitative researchers are interested in meaning – how people make sense of their lives, experiences, and their structures of the world; (c) The qualitative researchers is the primary instrument for data collection and analysis. Data are mediated through this human instrument, rather than through inventories, questionnaires, or machines;(d) Qualitative researchers involve fieldwork. The researcher sprucely goes to the people, setting, site, or institution to observe or record behavior in its natural setting;(e) Qualitative research is descriptive in that the researcher is interested in process, meaning, and understanding gained through world or picture; and The process of qualitative research is inductive in that the researcher builds abstractions, concepts, hypotheses, and theorities from detail, Dye R Thomas. (2008).

## **E. Conclutions and Recomendatios**

Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan setelah penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian kemudian disimpulkan beberapa hasil, yang menyangkut Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik, yaitu: (1) Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian beberapa konsep Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Publik, dalam pengambilan kebijakan publik masih ada yang belum bersifat defenitif atau masih dalam tahap pembahasan dan ada yang sudah dalam tahap pelaksanaan tapi dalam pelaksanaanya kurang dirasakan oleh masyarakat luas. (2) kebijakan pemerintah pusat ada yang dinamakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Propinsi dan Kota serta kabupaten yang akan dan sudah diundangkan berupa Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah (SPMD) yang kebijakan tersebut masih sementara dalam agenda penyusunan. SPM atau Standar Pelayanan Minimal, seperti diketahui merupakan suatu acuan yang dipakai untuk mengukur kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang diberikan. Problem proses perkembangan konsep kebijakan publik yang dikeluarkan serta dianalisis terkait

kurang maksimalnya jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, serta disposisi atau sikap yang diberikan terhadap pelayan publik yang dianggap sebagian masyarakat masih perlu peningkatan pelayanan public guna dirasakan oleh masyarakat, dalam hal ini ketersediaan tenaga administrasi publik perlu ditambah untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat dirasakan secara efektif dalam pelaksanaannya.

Pelayanan publik pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, karena itu pelayanan publik oleh pemerintah daerah membutuhkan proses kebijakan publik untuk bisa dilaksanakan dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Rekomendasi dalam penulisan penelitian ini adalah, (1) dalam membuat sebuah kebijakan publik menyangkut pelayanan yang optimal pada masyarakat, sebaiknya partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan masukan secara langsung melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah dapat menangkap pesan publik yang disuaran guna melakukan perbaikan pelayanan pada masyarakat. (2) Untuk menuju perubahan pelayanan yang baik pada masyarakat, maka diperlukan pola perubahan dan evaluasi manajemen pelayanan publik terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sehingga capaian pelayanan publik dapat dilaksanakan secara optimal dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

## **F. References**

Abdul Wahab, Solichin, (1997), Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Penerbit PT Bumi Aksara Abidin,

Arief, Syaiful, (2006), Demokrasi: sejarah, praktik, dan dinamika pemikiran Averroes Press, Jakarta.

B. Matthew dan A. Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. (Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press Muhyadi. 1989. Organisasi: Teori, Struktur dan Proses. Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK.

- Chandra, Eka, dkk. (2003). *Membangun Forum Warga. Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil*. Bandung: Akatiga.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denzin, Norman K., dan Yonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. California-USA: Sage Publication.
- Dun, Willian N, (1981). *Public Policy Analysis : An Intruduction*, Prentce\_Ha, Inc, Englewood Cliffs, NJ.07632.
- Dye R Thomas. (2008). *Understanding Public Policy*. Pearson Education' Upper Saddle River' NewJersey
- Edwar III, George C.(1980).*Implementing Public Policy*.Washington,DC,Congressional Quarterly Press Gaventa,
- Gortner, Harold F. (1984). *Adinistration in The Public Sector*. New York,
- Grindle, S. Merilee, (1980). *Politics, Policy Implementation in the Thirld World*
- Hatifah Sj. Sumarto. (2004). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatisi di Indonesia*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayat, Misbah.L. (2007). *Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Islamy.
- Humaniora Anderson, James, A. (1997). *Public Policy Making Third Edition*, USA, Penerbit Houghton Mifflin Company A.R.

- Irfan, M. (1994). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Islam,
- Kusnaka & Hikmat, Harry. (2003). Participatory Research Appraisal. Pengabdian dan Peberdayaan Masyarakat. Bandung:
- John dan Valderama, Camilo. (2001). Mewujudkan Partisipasi: Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21. The British Council dan New Economics Foundation.
- Jhon Willy Hamengkubuwono ke X, Sultan. 2007. Merajut Kembali ke Indonesia Kita. Gramedia Jakarta: Pustaka Umum.
- Jones, Charles O.(1996). Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Ricky Ismanto, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Lalolo, Loina. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Online ([http://www.goodgovernancebappenas.go.id/konsep\\_files/good%20governance.pdf](http://www.goodgovernancebappenas.go.id/konsep_files/good%20governance.pdf).) Diakses, 06 November 2006.
- Lewis, Phillip, Organizational Communication, Columbus, Ohio: Grid Publishing, Inc, (1980) <http://www.transparansi.or.id>. Masyarakat Transparansi. 2007. Diakses,
- Koontz, Harold and Cryill O'Donnel. (1972), Principle of Management an Analysis of Management Function, 5th Edition, New York. Mc Graw-Hill Book Company  
Krina P, April 2009.
- Kadji, Yulianto.(2008). Impelemntasi Kebijakan Publik melalui MSN Approach, Jurnal Teknologi dan Manajemen Indonesia, Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008,
- Mustapadijaja. (1992). Studi Kebijakanaksanaan, Perkembangan dan Perepannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan. Jakarta, LP-FEUI.

- Manan. Bagir. (1995), Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung
- Mardiasmo, (2002), Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, Andi
- Majchrzak, Ann. 1984. Methods For Policy Research, (Applied Social Research Methods Series 3), SAGE Publication 275 South Beverly Drive Beverly Hills, California Miles,
- Mustopadidjaja , AR. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Penerbit LAN.
- Naihasya, Syahrir. (2006). Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Nakamura, Robert. T and Frank Smallwood, 1980, The Politics of Policy Implementation, New York, St. Martin's Press.
- Presthus, (1960), Public Administration, The Ronald Press Company New York
- Richard J, (1992), Public Administration ( Concepts and Cases), Houghton Mifflin Company, Boston, USA Publication.
- Roumeen. (2006). Does More Transparency Go Along With Better Governance, Jurnal Compilation, Black Whell Publishing Ltd. 9600 Garsington Road, Oxford, USA
- John Pffifner dan Robert V.
- Said Zainal, (2004), Kebijakan Publik, Jakarta Pancar Siwah. Adimihardja,
- Shafritz, j.M. and E.W. Russel. (1997). Introducing Public Administration. New York: Addison-Wesley Educational Publishers.

- Siagian, Sondang, P. (1996), Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta Syafie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sinambela, Poltak, Lijan. (2006). Reformasi Pelayanan Publik. Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Smith, Rex Deighton. (2004). Regulatory Transparency in OECD Countries : Overview, Trends and Challenges. Australian: Journal of Public Administration
- Straus, Ansel L dan Yulief Corbin. (1990). Basic of Qualitative Research. . London: Sage
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Jogjakarta : Pustaka Pelajar
- Sugandha, Dann. (1989). Administrasi, Strategi, Taktik dan Penciptaan Efisiensi. Jakarta: Intermedia.
- Suhirman. 2003. Partisipasi Dalam Pembuatan Kebijakan: Analisis Atas Kerangka Hukum dan Praktek Pembuatan Kebijakan Ketenagakerjaan. Online (<http://www.pegasus.or.id/Reports/129%20Paper-Suhirman.pdf>). Diakses, 15 Februari 2007.
- Tangkilisan, S Nogi, Hessel. (2002). Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Balirung & Co...2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta:Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BADAN KOORDINASI DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BKKS) DI ERA PANDEMI COVID 19 DI DKI JAKARTA

Budiharjo, Budiharjo; Harry Nenobais; T. Herry Rachmatsyah

Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)  
budiharjo@dsn.moestopo.ac.id

---

## **ABSTRACT**

*Covid-19 does not only expose the deadly virus to one country, continent or region. However, the world health organization (WHO) has stated that the SAR-CoV 2 virus has evolved into a pandemic that has attacked the entire world, including in Indonesia under the name COVID-19. As of this writing (November 2020) the Covid pandemic has occurred, where as many as 50.4 million people have recovered a total of 33 million and 1.26 million people have died worldwide (<https://www.worldometers.info/coronavirus/>). Meanwhile, in Indonesia alone, 438,000 people were exposed, with a total recovery of 368,000 and resulted in 14,614 deaths (<https://www.covid-19.go.id>). Therefore, it is the duty and obligation of the Indonesian government to find various solutions to deal with this deadly Covid-19 pandemic. Communication, coordination, and support from the community, local government and related agencies to produce synergy to face the Covid-19 pandemic. One of the related agencies and has a strategic function related to social problems is the SOCIAL WELFARE COORDINATION AND ACTIVITIES BOARD or abbreviated as BKKKS (<http://www.bkkks-jakarta.or.id/>). The provincial government of DKI Jakarta together with the BKKKS can coordinate for the realization of a systematic handling of the Covid-19 pandemic. Therefore, this research is aimed at developing and improving three aspects for BKKKS in dealing with and dealing with the spread of the Covid-19 pandemic, especially in the DKI Jakarta area. By finding a policy formulation in handling the distribution of Covid-19, it is hoped that it can help local*

*governments to minimize the problems that occur as a result of the SAR-Cov 2 virus. With the formulation of the three aspects of the BKKKS, it is hoped that the handling of the Covid-19 pandemic in the DKI Jakarta area can be realized. Research activities were carried out at BKKKS from July to September 2020. The instruments used for data collection were interviews, observation, documentation, and literature study. The informants used consisted of 4 (four) layers, including the Chairman of the BKKKS, the Secretary, 3 Heads of the Division, and 2 people from volunteers. The research method used is qualitative constructivism approach and data analysis techniques include 3 (three) activities, including data reduction; data display; conclusion and verification.*

*Thus, through data analysis techniques, research results are obtained that lead to 3 (three) aspects, including policy direction, policy scope, and performance aspects.*

*Keywords: Covid-19, local government, management governance, public policy*

## **ABSTRAK**

Covid-19 tidak saja memaparkan virus mematikan kepada satu negara, benua, atau wilayah saja. Namun, organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menyatakan bahwa virus SAR-COV 2 ini telah berevolusi menjadi pandemi yang telah menyerang seluruh dunia, termasuk di Indonesia dengan nama COVID-19. Sampai tulisan ini dibuat (November 2020) pandemi Covid telah terjadi memaparkan sebanyak 50,4 juta orang dengan total kesembuhan 33 juta dan 1,26 juta orang meninggal di seluruh dunia (<https://www.worldometers.info/coronavirus/>). Sedangkan di Indonesia sendiri sebanyak 438.000 orang terpapar dengan total kesembuhan sebanyak 368.000 orang dan mengakibatkan 14.614 orang meninggal (<https://www.covid-19.go.id>). Oleh karenanya, merupakan tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menemukan berbagai solusi untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang mematikan ini. Komunikasi, koordinasi, dan dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait untuk menghasilkan sinergisitas untuk menghadap pandemi Covid-19 ini. Salah satu dinas terkait dan memiliki fungsi yang strategis berkaitan dengan permasalahan sosial kemasyarakatan adalah BADAN KOORDINASI DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL atau disingkat dengan BKKKS (<http://www.bkkks-jakarta.or.id/>). Pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta bersama dengan BKKKS dapat berkoordinasi demi terwujudnya

penanganan yang sistematis terhadap pandemi Covid-19 ini. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk membangun dan meningkatkan tiga aspek bagi BKKKS dalam menghadapi serta menangani sebaran pandemi Covid-19, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dengan ditemukan rumusan kebijakan dalam kegiatan penanganan sebaran Covid-19 ini, maka diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat yang ditimbulkan oleh virus SAR-Cov 2 ini. Dengan dirumuskannya tiga aspek dari BKKKS ini diharapkan penanganan pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta dapat terwujud. Kegiatan penelitian dilakukan di BKKKS pada Juli hingga September 2020. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan yang digunakan terdiri atas 4 (empat) lapis, di antaranya Ketua BKKKS, Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, dan 2 orang dari relawan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme dan teknik analisis data meliputi 3 (tiga) kegiatan, di antaranya reduksi data; display data; kesimpulan dan verifikasi. Sehingga, melalui teknik analisis data didapatkan hasil penelitian yang mengarah kepada 3 (tiga) aspek, antara lain arah kebijakan, ruang lingkup kebijakan, dan aspek kinerja.

Kata kunci: Covid-19, kebijakan publik, pemerintah daerah, tata kelola manajemen

## **LATAR BELAKANG**

Covid-19 tidak saja memaparkan virus mematikan kepada satu negara, benua, atau wilayah saja. Namun, organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menyatakan bahwa virus SAR-COV 2 ini telah berevolusi menjadi pandemi yang telah menyerang seluruh dunia, termasuk di Indonesia dengan nama COVID-19. Sampai tulisan ini dibuat (November 2020) pandemi Covid telah terjadi memaparkan sebanyak 50,4 juta orang dengan total kesembuhan 33 juta dan 1,26 juta orang meninggal di seluruh dunia (<https://www.worldometers.info/coronavirus/>). Sedangkan di Indonesia sendiri sebanyak 438.000 orang terpapar dengan total kesembuhan sebanyak 368.000 orang dan mengakibatkan 14.614 orang meninggal (<https://www.covid-19.go.id>). Oleh karenanya, merupakan tugas dan kewajiban pemerintah Indonesia untuk menemukan berbagai solusi untuk menghadapi pandemi Covid-19

yang mematikan ini. Komunikasi, koordinasi, dan dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait untuk menghasilkan sinergisitas untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini. Salah satu dinas terkait dan memiliki fungsi yang strategis berkaitan dengan permasalahan sosial kemasyarakatan adalah BADAN KOORDINASI DAN KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL atau disingkat dengan BKKKS (<http://www.bkkks-jakarta.or.id/>). Pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta bersama dengan BKKKS dapat berkoordinasi demi terwujudnya penanganan yang sistematis terhadap pandemi Covid-19 ini. Oleh karenanya, penelitian ini ditujukan untuk membangun dan meningkatkan tiga aspek bagi BKKKS dalam menghadapi serta menangani sebaran pandemi Covid-19, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan telah diterbitkan pada 31 Maret 2020. Pada waktu yang tidak terlalu lama diterbitkan pula Peraturan Presiden No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020 pada 3 April 2020. Kedua kebijakan di atas sebagai bentuk responsif pemerintah Indonesia atas penanganan pandemi Covid-19 yang meliputi 9 (sembilan) elemen: tanggap awal; bidang kesehatan; bidang sosial; kebijakan fiskal dan insentif pajak; kebijakan perdagangan ekspor-impor; usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); pembatasan sosial berskala besar (PSBB); bidang hukum; dan kebijakan atau fasilitas lainnya.

**Tanggap Awal.** Berdasarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 13 Maret 2020; dan Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020 dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Pemerintah membentuk Tim Gerak Cepat (TGC), khususnya di wilayah otoritas pintu masuk negara, antara lain di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara (PLBDN). Pemerintah juga memberlakukan kebijakan pemeriksaan kesehatan pada 135 titik bandar udara, darat, dan pelabuhan dengan menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan. Pada sisi lain, Kementerian Kesehatan mengembangkan pedoman kesiapsiagaan sesuai dengan pedoman yang disyaratkan oleh World Health Organization (WHO). Layanan yang dapat

diberikan, seperti membuka kontak layanan yang dapat diakses umum dan mengomunikasikan hal-hal terkait Covid- 19.

Kebijakan penundaan penerbangan yang berlaku mulai 5 Februari 2020 dan menghentikan sementara impor hewan hidup dari Cina dilakukan sebagai bagian dari kebijakan sinergisitas dengan kementerian lain. Pemerintah memulangkan WNI dari provinsi Hubei, Cina yang sebagian besar adalah mahasiswa dengan tetap menjaga protokol kesehatan. **Bidang Kesehatan.** Pemerintah memberikan prioritas kepada perlindungan tenaga kesehatan dalam berbagai bentuk. Seperti pengadaan APD, test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Pemerintah menaikkan kualitas 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien Covid-19, termasuk Wisma Atlet. Pada sisi anggaran, pemerintah memberikan insentif kepada dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya serta memberikan santunan kematian bagi tenaga medis. **Bidang Sosial.** Kementerian Sosial memberikan dukungan logistik dalam bentuk sembako dan kebutuhan pokok kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan kartu sembako, kartu prakerja, dan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah melalui bidang terkait membebaskan biaya listrik selama 3 bulan untuk daya listrik sebesar 450VA dan memberikan bantuan 50% untuk yang berdaya 900VA serta pemberian tambahan insentif bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

**Kebijakan Fiskal dan Insentif Pajak.** Pemerintah membuat berbagai kebijakan fiskal dan pajak yang berdampak kepada defisitnya APBN sebesar 5,07%. Kebijakan-kebijakan tersebut, seperti pemerintah menanggung 100% PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun; pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah; pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah; merestitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha; penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat; menurunkan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022; dan berbagai dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk pemulihan ekonomi.

**Kebijakan Perdagangan Ekspor-Impor.** Pemerintah melakukan penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, larangan terbatas (lartas impor), dan percepatan layanan proses ekspor-impor melalui *national logistic ecosystem*. **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).** Pemerintah memberikan stimulus kepada debitur melalui penilaian kualitas kredit, restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit, dan restrukturisasi kredit UMKM dengan kualitas yang dapat langsung menjadi lancar. **Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).** Sebagai langkah-langkah preventif atas paparan pandemi Covid-19, pemerintah membuat berbagai kebijakan yang tertuang melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai berikut (Riant Nugroho, 2012). Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 31 Maret 2020. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada 3 April 2020, seperti meliburkan kegiatan sekolah dan tempat kerja; membatasi kegiatan keagamaan; kegiatan di tempat atau fasilitas umum; kegiatan sosial budaya; moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. **Bidang Hukum.** Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah membebaskan 22.158 orang narapidana dan anak melalui program asimilasi, hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas.

**Kebijakan atau Fasilitas Lainnya.** Pemerintah membangun fasilitas observasi, penampungan, dan karantina untuk mengendalikan infeksi Covid-19 di Pulau Galang. Pemerintah juga menginisiasi agar Wisma Atlet Kemayoran diresmikan menjadi rumah sakit darurat Covid-19.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan sosial setiap warganegaranya pada berbagai situasi dan kondisi, termasuk pada pandemi Covid-19, khususnya kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pandemi Covid-19 telah melambatkan pertumbuhan sosial dan ekonomi, di mana akses terhadap penguasaan ekonomi semakin terasa berat bagi PMKS. Pemerintah melalui dinas terkait membuat berbagai kebijakan yang ditujukan bagi program preventif, kuratif, rehabilitatif, perlindungan, penunjang dan pengembangan serta

rujukan. Implementasi kebijakan perundang undangan No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 merupakan tahapan yang sangat penting dalam struktur kebijakan dalam penanganan meluasnya wabah pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat melaksanakan fungsi sosialnya kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial. Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut, maka Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DKI Jakarta sebagai mitra pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial diharapkan dapat membantu untuk mengatasi permasalahan warga yang terdampak Covid-19 secara sistematis, holistik, dan terarah.

## **METODOLOGI**

Penelitian dilakukan di Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) pada Juli hingga September 2020. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan yang digunakan terdiri atas 4 (empat) lapis, di antaranya Ketua BKKKS, Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, dan 2 orang dari relawan (Indiantoro & Supomo, 1999). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme dan teknik analisis data meliputi 3 (tiga) kegiatan, di antaranya reduksi data; display data; kesimpulan dan verifikasi (Sutopo, 2002) (Rachmat, 2002) (Supranto, 2000) (Sugiyono, 2016) (Irawan, 2006) (Soeharto, 1995).

## **HASIL PENELITIAN**

Temuan atau hasil penelitian yang didapat melalui proses olah data terdiri atas deskripsi obyek penelitian BKKKS DKI Jakarta dan data fokus penelitian.

### **Deskripsi Obyek Penelitian BKKKS DKI Jakarta**

Deskripsi obyek penelitian terdiri atas 4 (empat) bab. Bab I yang mengurai antara lain: a) kajian atau deskripsi umum, b) kelembagaan BKKKS dalam KESOS, c) arah dan strategi, d) faktor peluang, e) organisasi ideal dalam sistem tata nilai budaya, dan f) indikator mengukur produktifitas. Deskripsi obyek penelitian pada Bab

I disebutkan bahwa eksistensi BKKKS merupakan perwujudan dalam memberikan respon terhadap berbagai kondisi sosial, khususnya dalam penanganan PMKS dan urbanisasi (Abdul Wahab Solichin, 1991) (Hogwood and Gunn, 1986).

Pada faktanya timbul ketidakseimbangan antara pertumbuhan permasalahan Kesos dengan penanganannya. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan pemerintah, sekaligus memberikan ruang kepada partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, hubungan BKKKS dengan pemerintah daerah merupakan kemitraan antara *rowing* dan *steering committee*. BKKKS didaulat berada di garis depan, sebagai pelaku strategis, modal sosial, potensi dan sumber daya bagi penyelenggara Kesos berbasis kemasyarakatan. BKKKS memiliki posisi, arah dan aspek layanan, sasaran serta kemitraan pada Orsos atau LKS di bidang sosial. Semisal pemberdayaan sosial, bencana, pendidikan, kesehatan, dunia usaha, pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan demikian terbentuklah arah dan strategi yang diperankan oleh BKKKS. Arah dan strategi yang meliputi koordinasi, kemitraan, rentang kendali, sistem layanan, kemitraan sosial, dan kelembagaan dengan organisasi sosial lainnya. Pada saat bersamaan memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi berlandaskan regulasi agar dukungan publik semakin baik. Akhirnya, terbangun struktur yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan dinamika sosial. Pada sisi lain terbangun pula pola sistem, mekanisme, strategi, regulasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, dan budaya organisasi, serta kepercayaan publik. Semua pembangunan ini memerlukan indikator untuk keperluan penilaian performansi BKKKS.

Pada Bab II diulas sisi kondisi internal dan eksternal BKKKS, isu-isu strategis, dan ruang lingkup kegiatan organisasi. BKKKS belum secara optimal melakukan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga koordinatif dalam penanggulangan permasalahan sosial. Hal ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan SDM, pengurus, dan tingkat ketergantungan kepada pemerintah daerah. Pada sisi lain ditemukan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang signifikan yang berimbas kepada berbagai persoalan sosial secara kuantitatif. Oleh karenanya, dibutuhkan penguatan agar BKKKS dapat melaksanakan fungsi dan perannya secara optimal melalui budaya organisasi, optimalisasi pemberdayaan kelembagaan, komunikasi sosial, dan koordinasi yang intents dengan dinas sosial. Penguatan-penguatan tersebut

dibutuhkan untuk membangun citra strategis yang berkaitan dengan organisasi BKKKS, layanan, budaya kerja, SDM, tata kelola organisasi, sistem informasi manajemen, dan membangun jejaring (Wahyudi Kumorotomo, 1992). Sehingga, ruang lingkup peran dan tugas BKKKS dapat terealisasi secara maksimal dalam menanggulangi berbagai isu sosial.

Pada Bab III, BKKKS memberi fokus kepada strategi perubahan organisasi agar dapat bertahan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial masyarakat (McCalman, 1989). Model manajemen yang memberi fokus kepada beberapa tingkatan hierarki keorganisasian. Pertama, identifikasi kebutuhan dan berbagai peluang untuk perubahan. Kedua, sosialisasi rumusan visi dan misi secara implementatif. Ketiga, memobilisasi berbagai dukungan dan keempat, kegiatan evaluasi dan pengembangan strategi. Pada Bab IV dianalisis penataan dan penguatan organisasi BKKKS, khususnya yang berkaitan dengan berbagai perubahan lingkungan strategis. Semisal, tekanan publik, politik, organisasi internasional, krisis ekonomi, lingkungan, ideologi, dan sosial.

## **Data Fokus Penelitian**

Pada temuan yang berkaitan dengan data fokus penelitian diarahkan kepada kebijakan dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh BKKKS pada era pandemi Covid-19 (Riant Nugroho, 2012). Hal ini dilakukan agar terwujudnya kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh penduduk di wilayah DKI Jakarta.

Oleh karenanya diharapkan agar organisasi BKKKS dengan segala perencanaan dan kegiatannya dapat menunjukkan kinerja yang unggul bagi kemaslahatan orang banyak.

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

Pembahasan penelitian difokuskan kepada 3 (tiga) hal, antara lain arah kebijakan BKKKS, ruang lingkup kebijakan, dan kinerja badan BKKKS dalam menghadapi pandemi Covid-19, khususnya dalam ruang lingkup lokus di wilayah DKI Jakarta. Pertama, arah kebijakan BKKKS. Pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta merumuskan kalimat visinya: "Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang

berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.“ Kedua, atas rumusan kalimat visi tersebut dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada Pasal 13 ayat (1) huruf c. Dalam hal ini BKKKS memiliki komitmen untuk menyelenggarakan dan menegakkan Kebijakan Kesejahteraan Sosial Badan Koordinasi dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Bersama dengan pemda, BKKKS turut menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya *new normal* kota Jakarta sebagai kota jasa, kota perdagangan dan kota pariwisata yang masyarakatnya nyaman, aman dan tenteram. Aspek ketiga adalah kinerja organisasi atau BKKKS yang dilakukan secara sistematis, efektif, dan berpandangan ke depan (David Osborne dan Ted Gaebler, 1999). Dengan demikian, peningkatan kinerja BKKKS diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan dengan melakukan berbagai kedisiplinan dan pengawasan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Dengan demikian, BKKKS dapat menciptakan yang optimal.

Pengawasan merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan yang memiliki ruang lingkup perencanaan, rancangan sistem informasi, dan umpan balik dengan membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian berkaitan dengan kinerja implementasi kebijakan BKKKS pada era pandemi Covid-19 terurai kepada 3 (tiga) aspek, yakni arah kebijakan, ruang lingkup, dan kinerja (Budi Winarno, 2012). Arah kebijakan yang telah dikembangkan oleh BKKKS dalam menghadapi pandemi Covid-19 di wilayah DKI Jakarta dinilai baik, progresif, dan terarah. Pada aspek ruang lingkup kebijakan, khususnya pada tatanan *new normal*, DKI Jakarta dinyatakan sebagai kota layak huni dan modern. Pada bagian akhir aspek kinerja, BKKKS memiliki eksistensi dan posisi yang penting serta strategis untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat demi terwujudnya tata kelola kota yang bersih, nyaman, tertib, aman, dan indah.

## Saran

Demikian pada sub bab saran diarahkan kepada tiga hal. Pertama pada aspek arah kebijakan yang diimplementasikan oleh BKKKS diharapkan dapat memberikan solusi terbaik bagi penanganan penyebaran Covid-19 di wilayah DKI Jakarta (Budi Winarno, 2012). Kedua, BKKKS diharapkan dapat memberikan motivasi atau dorongan yang signifikan demi terwujudnya tata kelola kota yang sistematis, holistik, dan strategis.

Pada aspek ketiga, faktor-faktor yang mampu untuk meningkatkan performansi BKKKS dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah kedisiplinan dan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

H.B. Sutopo (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Press

H.B. Sutopo (2002). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Press.

Hogwood and Gunn, (1986). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press

Indiantoro & Supomo, (1999). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

J. Supranto M. A. (2000). *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1, Edisi Keenam*. Erlangga, Jakarta.

Jalalludin, (2002). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Kumorotomo, Wahyudi (1992). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press

Nugroho D, Riant. (2012). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:Gramedia

Osborne, David dan Gaebler, Ted (1999). *Mewirauahakan Birokrasi* (Terjemahan Abdul Rasyid). Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo

Prasetya Irawan, (2006). *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*.

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Research and Development*. Bandung: PT Alfabet.

Suharto, Edi (1995). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi 2010. *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat* . Bandung: PT Refika Aditama.

Wahab Solichin, Abdul (1991). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta. CAPS

<http://www.bkkks-jakarta.or.id/> diakses pada November 2020

<https://www.covid-19.go.id> diakses pada November 2020

<https://www.worldometers.info/coronavirus/> diakses pada November 2020

Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020

Keputusan Presiden No.7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020 pada 3 April 2020

# STRATEGI PEMBELAJARAN DARING DI TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG

Franky, Franky; Zahera Mega Utama; Watriningsih

Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

franky@dsn.moestopo.ac.id

---

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to formulate online learning strategies, especially at the elementary and secondary education level during the COVID-19 pandemic in Tangerang city. In fact, the learning process can continue consistently without obstacles. However, there are many conditions that can interfere with the learning process. One of them is the COVID-19 pandemic, which has infected more than 200 countries in the world. Indonesian was not avoided from this Corona virus exposure. Almost all lines of human life are negatively affected, including the education sector. Change is a necessity, therefore anticipatory steps become absolute to always be prepared. This study uses qualitative methods, data collection techniques by studying various secondary data, data analysis using the Miles and Huberman models. The participants are educators, students, and parents at the level of primary and secondary education in the city of Tangerang. The findings of online learning strategy research at the elementary and secondary education levels refer to 2 (two) sides, such as technology and human resources, especially educators. In order to achieve that online learning process can take place well, firstly have to support by the latest learning technology is absolutely necessary, both from hardware and software. Secondly on the other hand, the readiness, skills and competence of educators in the online learning process, especially teachers are absolutely necessary.*

*Keywords: human resource, learning, online, strategy*

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat rumusan strategi pembelajaran daring, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah pada masa pandemi COVID-19 di kota Tangerang. Sejatinya, proses pembelajaran dapat terus berlangsung secara konsisten tanpa hambatan. Namun demikian, terdapat banyak kondisi yang dapat mengganggu proses pembelajaran tersebut. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang telah menjangkiti lebih dari 200 negara di dunia. Negara Indonesia pun tidak luput dari paparan virus Corona ini. Hampir semua lini kehidupan manusia terdampak secara signifikan negatif, termasuk sektor pendidikan. Perubahan adalah keniscayaan, oleh karenanya langkah-langkah antisipasi menjadi keutamaan untuk selalu dipersiapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan melakukan kajian berbagai data sekunder, analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman dengan partisipan pendidik, peserta didik, dan orangtua di jenjang pendidikan dasar serta menengah di kota Tangerang. Hasil temuan penelitian strategi pembelajaran daring di jenjang pendidikan dasar dan menengah ini merujuk kepada 2 (dua) sisi, yaitu teknologi dan sumber daya manusia (SDM), khususnya pendidik. Disarankan agar proses pembelajaran daring dapat berlangsung dengan baik, maka dukungan teknologi pembelajaran terkini mutlak diperlukan, baik dari perangkat keras dan lunak. Pada sisi yang lain, kesiapan, keterampilan, dan kompetensi SDM dalam proses pembelajaran daring, khususnya guru mutlak dimiliki.

Kata kunci: daring, strategi, sumber daya manusia, pembelajaran

## **LATAR BELAKANG**

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar atau hakiki setiap manusia yang ada di dalam dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian dan komitmen yang serius berkaitan dengan sektor pendidikan ini dengan adanya rumusan atau landasan hukum yang mengikat. Landasan hukum tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

Pada Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan telah terjangkit wabah pandemi virus 2019-nCoV sebagai SARS-CoV-2 yang telah berlangsung sejak Desember 2019 di Kota Wuhan, Tiongkok. COVID-19 menyerang dan dapat merusak paru-paru manusia, gangguan pernapasan akut, dan sistem pernapasan manusia yang dapat mengakibatkan orang terpapar virus ini dapat meninggal. Pada saat tulisan penelitian ini dibuat (<https://covid19.go.id/p/berita>, Selasa, 28 Juli 2020) terdapat informasi sebagai berikut.

Tabel 1 Data Penyebaran COVID-19

<b>Global</b>	<b>Indonesia</b>
Jumlah negara terkonfirmasi: 216	Terkonfirmasi positif: 100.303
Terkonfirmasi positif: 16.114.449	Sembuh: 58.173
Meninggal: 646.641	Meninggal: 4.838

Pandemi COVID-19 tidak saja mengakibatkan bencana kemanusiaan dengan terpaparnya jutaan orang di seluruh dunia. Namun mengubah secara fundamental platform hampir seluruh lini kehidupan manusia, seperti ekonomi bisnis, politik, budaya, kerjasama luar negeri, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Proses bisnis telah berubah secara fundamental atau medasar dengan adanya serangan pandemi COVID-19 ini. Pandemi yang mengubah secara radikal cara manusia berinteraksi, bersosialisasi, atau berinteraksi.

Pada konteks pendidikan terjadi perubahan yang signifikan sebagai akibat pandemi COVID-19 ini, di mana proses penyelenggara pendidikan belum dapat menggunakan teknik atau metode klasik. Teknik atau metode klasik di mana proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas melalui tatap muka antarpendidik atau guru dengan peserta didik. Pandemi COVID-19 yang memiliki protokol kesehatan yang harus ditaati oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, kondisi interaksi manusia berubah secara drastis dan berdampak secara signifikan terhadap proses pembelajaran di sekolah. Guru dan peserta didik belum dapat berinteraksi di dalam kelas-kelas pembelajaran secara klasikal untuk membahas pelajaran. Penyelenggara-penyelenggara pendidikan

belum diizinkan membuka sarana pendidikannya, akibat pembatasan gerak dan fisik untuk menghindari potensi terpaparnya COVID-19.

Peserta didik dan guru belum dapat diperbolehkan untuk belajar dengan menggunakan metode tatap muka. Namun, proses pembelajaran tidak dapat dihentikan dan harus berlangsung secara sistematis dan progresif. Inilah tantangan dalam dunia pendidikan yang harus mendapatkan jalan keluar dari permasalahan global ini, di mana interaksi fisik dibatasi, namun proses pembelajaran harus tetap berlangsung sebagaimana mestinya, sampai hadirnya pendekatan proses pendidikan atau pembelajaran jarak jauh.

Pembatasan interaksi antarmanusia, khususnya dalam bidang pendidikan, berimbas kepada komunitas interaksi antara peserta didik, pendidik, sarana pendidikan, dan faktor-faktor penunjang lain dalam proses pendidikan. Sekolah, kampus, dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan lainnya ditutup. Namun demikian, proses pembelajaran harus berlangsung dan tidak diperkenankan untuk berhenti, apa pun risikonya. Pemerintah seantero dunia melakukan berbagai kajian secara teknik untuk mengupayakan agar proses pembelajaran di sekolah atau di kampus dapat berlangsung pula di rumah masing-masing. Pendidikan jarak jauh harus tetap berlangsung dengan dukungan berbagai metode dan aplikasi pembelajaran.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, negara Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum yang terdapat dijadikan landasan atas penyelenggaraan konsep pembelajaran ini. Landasan-landasan hukum tersebut terdapat pada beberapa dokumen kebijakan pemerintah Indonesia sebagai berikut.

1. *Undang-Undang Perguruan Tinggi nomer 12 Tahun 2012 Pasal 31 tentang Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)*
2. *Permendikbud No. 109 Tahun 2013 Pasal 2*
3. *Draft Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Tahun 2014*
4. *Rencana Strategis KemenristekDikti Tahun 2015-2019*
5. *Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*
6. *Peraturan BAN PT Nomor 4 Tahun 2017 Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi*

7. Permenristekdikti No 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Dengan adanya landasan hukum tersebut, maka proses pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan sistematis dan terarah. Lalu, bagaimana strategi pembelajaran jarak jauh, *online*, atau daring (dalam jaringan) ini dapat dilakukan secara komprehensif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di tengah wabah pandemi Covid-19?

## **METODOLOGI**

### **Situasi Sosial dan Partisipan**

Situasi sosial terdiri atas 3 (tiga) elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergisitas. Situasi sosial dalam penelitian ini meliputi pendidik, peserta didik, dan orang tua di jenjang pendidikan dasar serta menengah di kota Tangerang dalam konteks pembelajaran yang dilakukan secara daring.

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah pendidik, peserta didik, dan orang tua pada jenjang pendidikan dasar serta menengah di kota Tangerang yang telah ditentukan (*purposive sampling*) atau dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

### **Instrumen, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, dan Metode Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara dengan *opened and deep question* kepada pendidik, peserta didik, dan orang tua pada jenjang pendidikan dasar serta menengah di kota Tangerang. Catatan lapangan dan dokumen dapat juga digunakan sebagai instrumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, kajian artikel, dokumen, dan catatan lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang umum digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Miles dan Huberman berpendapat bahwa kegiatan analisis data pada penelitian

dengan metode kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu (Miles dan Huberman dalam Sugiono, 2020).

## HASIL PENELITIAN

### Gambaran Umum Obyek yang diteliti

Pandemi *COVID-19* telah mengeneralisasi permasalahan di setiap bidang kehidupan manusia, termasuk pada sektor pendidikan di luar maupun di dalam negeri Indonesia. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, Kecamatan, Kelurahan, atau desa), penyelenggara pendidikan (negeri dan swasta), guru, orangtua peserta didik, peserta didik, dan lingkungan pembelajaran lainnya.

Namun pada penelitian ini difokuskan kepada pendidik, peserta didik, orangtua, dan infrastruktur teknologi. Keempat domain ini terkena dampak yang signifikan dari pandemi *COVID-19* yang telah mengubah proses pembelajaran secara fundamental. Di mana proses pendidikan diselenggarakan melalui interaksi yang intens antara pendidik dan peserta didik, harus digantikan dengan *platform* teknologi yang 'terkesan' jauh dari kultur budaya pembelajaran, khususnya di Indonesia.

Proses pembelajaran yang sedianya menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan interpersonal, menjadi terkendala dengan adanya berbagai pembatasan pertemuan dalam jumlah, ruang, dan waktu. Proses pembelajaran di mana adanya keterhubungan dan keterbukaan antara pendidik dan peserta didik harus diganti dengan keterhubungan melalui jaringan internet. Masyarakat dunia, khususnya di Indonesia, termasuk di Kota Tangerang tidak pernah berpikir akan terjadi perubahan yang mendasar dan fundamental ini. Oleh karena, setiap domain diharapkan dapat menempatkan proses pembelajaran tetap menjadi kebutuhan yang harus dilakukan secara konsisten. Tentunya, harus ditemukan metode pembelajaran yang kondusif antarpendidik dan peserta didik agar proses pembelajaran dapat terap berlangsung dengan baik.

Dengan demikian, gambaran umum dari obyek penelitian ini berfokus kepada domain pendidik, peserta didik, orangtua, dan kesiapan infrastruktur. Penelitian yang mengulas berbagai kendala yang dihadapi oleh pendidik, peserta didik, orangtua, dan kesiapan infrastruktur akan menjadi landasan pembahasan penelitian selanjutnya.

## **Pendidik**

Pendidik atau guru di kota Tangerang memiliki kendala dan permasalahan yang sama dengan rekan seprofesinya di seluruh dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi yang tidak pernah diduga, maka manusia tidak memiliki perencanaan atau antisipasi di dalam menghadapi pandemi tersebut. Semua kegiatan pembelajaran harus berlangsung dengan menggunakan berbagai metode atau teknik agar proses belajar dan mengajar dapat tetap berlangsung.

Pada kesempatan lain, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan bahwa: "Dinas pendidikan atau guru harus jemput bola untuk bisa mengatasi masalah ini." Pernyataan pendapat atau usulan Gatot Wibowo ini merupakan salah satu solusi yang dapat menjadi pilihan demi keberlangsungan proses pembelajaran, khususnya kepada peserta didik agar tidak tertinggal kegiatan pembelajaran. Pandemi Covid-19 adalah salah satu hal. Namun demikian, diperlukan inovasi-inovasi yang solutif dalam menghadapi permasalahan pandemi Covid-19 yang mengganggu proses pembelajaran.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh sekolah atau guru dalam hal ini dapat mendatangi kediaman peserta didik dan dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok belajar. Tentunya, usulan ini dilaksanakan tetap dalam menjaga protokol kesehatan secara ketat. Kita tidak ingin dengan diimplementasikannya salah satu usulan ini, malah menambah jumlah kluster baru paparan Covid-19.

Dengan demikian, baik pemerintah melalui dinas-dinas terkait, para penyelenggara pendidikan, dan orangtua dapat berjibaku untuk bersama-sama menemukan alternatif-alternatif solusi agar proses pembelajaran bagi setiap peserta didik dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Dibutuhkan sinergisitas di antara pihak-pihak terkait demi terselamatkannya proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19 ini.

## Peserta Didik

Peserta didik merupakan perangkat yang penting dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik memiliki dua dimensi dalam kegiatan belajar mengajar. Dimensi yang pertama adalah sebagai obyek dan dimensi kedua adalah sebagai subyek. Peserta didik sebagai obyek pembelajaran membutuhkan dukungan lingkungan pembelajaran yang signifikan dalam menumbuhkembangkan aspek keilmuan dan keterampilan serta lebih dari pada itu adalah peningkatan karakter yang baik. Sedangkan dalam perspektif subyek, peserta didik diharapkan dapat bertindak sebagai sumber pembelajaran bagi lingkungannya, baik kepada rekan maupun kepada pendidiknya. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab dari peserta didik memiliki eksistensi yang penting dalam rangkaian kegiatan pembelajaran. Apalagi di masa pandemi Covid-19, di mana terjadi disrupsi yang signifikan terhadap seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah. Inilah momentum yang sangat kondusif untuk melihat sekaligus menilai apakah proses pembelajaran yang telah berlangsung selama ini dapat mengantisipasi disrupsi akibat pandemi Covid-19 ini.

Petikan wawancara dengan Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota Tangerang, Sudarmawan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kondisi atau keadaan kegiatan belajar mengajar yang berdampak kepada peserta didik. Pertama, Sudarmawan menyampaikan bahwa sebagian besar peserta didiknya tidak memiliki perangkat atau gawai yang terhubung dengan internet. Perangkat-perangkat lainnya yang notabene diperlukan dalam proses pembelajaran, seperti laptop, *personal computer* (PC), dan tablet tidak dimiliki oleh sebagian peserta didik. Kedua, Sudarmawan menambahkan bahwa persoalan yang berkaitan dengan proses pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi dan peserta didik adalah dukungan atas ketersediaan kuota. Pengadaan kuota berarti berkaitan dengan dana.

Dalam temuan penelitian ini, Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota Tangerang menemui banyak peserta didik yang mengalami kesulitan biaya untuk membeli pulsa yang notabene merupakan keharusan yang sedianya digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Temuan penelitian juga mendapatkan seorang peserta didik asal dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota

Tangerang, Nurisma(13) mengatakan bahwa tidak memiliki gawai yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Demikian juga yang dialami oleh seorang peserta didik dari SMPN di Rembang, Dimas Ibnu Alias, mengatakan bahwa ia terpaksa belajar di sekolah sendirian akibat tidak memiliki handphone untuk mengikuti pelajaran dari sekolah yang dilakukan secara daring.

Pelaksana tugas harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin mengatakan bahwa peserta didik pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Tangerang mulai digero-goti rasa jenuh saat belajar dari rumah dengan metode daring. Jamal mengatakan bahwa rasa bosan yang dialami oleh peserta didik usia sekolah di Kota Tangerang menjadi kendala terbesar dalam proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19.

Data KPAI menyebutkan bahwa sebanyak 79,9% peserta didik mengeluhkan minimnya interaksi dengan guru-guru mereka dalam pembelajaran dengan metode daring. Interaksi yang terjadi digantikan dengan layar monitor yang kaku, membosankan, dan melelahkan. Tugas yang banyak, konten yang sulit, dan ditambah dengan minimnya interaksi di antaranya, semakin membuat proses pembelajaran jarak jauh menjadi tidak relevan dengan kegiatan belajar mengajar yang seharusnya.

Pada akhirnya, Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai bahwa dengan adanya momentum pandemi Covid-19 ini secara tidak langsung membuka pemahaman bagi banyak pihak. Pemahaman untuk mengetahui bagaimana tingkat dan kualitas guru-guru yang ada di Tangerang Selatan. Tidak sedikit para pendidik di Tangerang Selatan yang masih gagap dengan teknologi pembelajaran daring. Tentunya, hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang memerlukan solusi yang tepat guna bagi kalangan pendidik.

## **Orangtua**

Anggota Komisi IX DPR RI dan sekaligus sebagai Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay Partaonan menyebutkan adanya 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan yang dialami oleh orangtua dalam mengikuti dan membantu proses pembelajaran dengan metode *online* putra-putrinya. Pertama, orangtua yang memiliki lebih dari satu anak akan mengalami tingkat kesulitan yang luar biasa dalam memberikan

bantuan kepada anak-anaknya untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara daring. Kedua, peserta didik yang belajar dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh atau proses pembelajaran yang dilakukan di rumah masing-masing, terkesan tidak atau kurang memiliki kedisiplinan atau ketertiban belajar. Ketiga, pada mata pelajaran tertentu, di mana dibutuhkan kegiatan praktikum atau juga praktik lapangan. Semisal mata pelajaran biologi, kimia, dan fisika yang membutuhkan perlengkapan tambahan untuk kegiatan praktikum. Saleh Daulay Partaonan memberikan komentar bahwa kondisi tersebut menjadi tidak adil bagi kalangan orangtua dari peserta didik.

Data dari KPAI menyebutkan bahwa peserta didik mendapatkan perlakuan yang tidak seimbang dari pendidik, di mana beban tugas yang harus dikerjakan di rumah meningkat dan berbeda dengan metode tatap muka secara klasik. Orangtua mendapatkan dampak yang sama dengan anak-anak mereka, di mana ikut membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut. Pada sisi lain, KPAI juga menyampaikan bahwa orangtua terbebani dengan penyediaan kuota internet yang tidak murak. Dengan demikian, profil orangtua saat pandemi setidaknya memiliki 3 (tiga) hal, yakni terbebani dengan proses pembelajaran, konten mata pelajaran tertentu, dan perihal pembiayaan.

## **Pemerintah**

Pemerintah di seluruh belahan dunia berjibaku untuk dapat menemukan solusi agar kegiatan proses pembelajaran dapat berlangsung sebagaimana mestinya di tengah situasi pandemi Covid-19. Pada konteks penelitian ini yang mengambil lokus di Kota Tangerang Selatan, di mana Walikota Tangerang, Bapak Arief R. Wismansyah menyampaikan dua strategi dalam proses pembelajaran yang dapat diimplementasikan oleh seluruh sekolah yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Dua strategi tersebut adalah 1) guru dapat menggunakan beragam media pembelajaran dengan pendekatan teknologi, dan 2) guru dapat memperbaiki teknik pembelajaran di masa pandemik Covid-19 sesuai dengan kemampuan para peserta didik. Tentunya, strategi yang disampaikan memerlukan perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang sistematis, holistik, dan terarah.

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tidak hanya berfokus kepada guru atau pendidik dalam menyiasati proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa guru atau pendidik merupakan elemen utama dalam proses keberlangsungan pendidikan di satuan-satuan pendidikan di tanah air, khususnya di Kota Tangerang Selatan ini. Namun demikian, diperlukan sinergisitas antara guru dengan pihak-pihak lainnya demi terwujudnya proses pembelajaran yang ideal. Pihak-pihak yang dibutuhkan sebagai bagian sinergisitas bagi guru atau pendidik, antara lain peserta didik, kebijakan sekolah, orangtua, dinas pendidikan terkait, dan infrastruktur atau fasilitas.

Pemerintah daerah bekerja sama dengan para operator seluler demi terwujudnya bantuan jaringan internet agar aplikasi *virtual* yang digunakan oleh pendidik diakses oleh semua peserta didik. Pemerintah memberi dukungan penuh kepada peserta didik dalam bentuk bantuan kuota telepon seluler tertentu. Sehingga, peserta didik dapat menerima proses pembelajaran dengan baik dan menyenangkan.

Pada temuan lain disebutkan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Masyati Yulia memiliki 2 (dua) pendekatan strategis demi terwujudnya proses pembelajaran yang merata bagi semua peserta didik di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini. Strategi pertama adalah dengan melakukan pembagian setiap kelas menjadi 2 (dua) dua kelompok waktu belajar. Artinya, akan dilakukan proses pembelajaran dengan metode tatap muka atau klasik, namun tetap menjadikan aturan protokol kesehatan secara tertib. Strategi kedua yang dikemukakan oleh Masyati Julia adalah mengimplementasikan atau menerapkan proses belajar *online* melalui aplikasi Tangerang *Live*. Aplikasi Tangerang *Live* merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk dapat mengakomodir proses pembelajaran dapat tetap berlangsung. Tangerang *Live* menyediakan konten-konten pembelajaran yang dapat diakses oleh semua guru dan peserta didik. Strategi Masyati Julia seiring dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, H. Saifullah. Beliau menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang telah menyiapkan langkah-langkah dengan menggunakan sistem ganjil-genap berdasarkan absensi siswa dalam pembelajaran tatap muka mendatang. Sekali lagi, usulan strategi ini untuk mengakomodir kedua hal yang telah disebutkan di

atas, yakni proses pembelajaran dapat berlangsung di bawah pengetatan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 ini. Strategi yang dilaksanakan oleh Masyati Julia dan Saifullah merujuk kepada Keputusan Bersama Empat menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama, di mana disebutkan bahwa maksimal ruang kelas apabila akan digunakan dengan model tatap muka secara klasik harus 50 persen atau di bawahnya.

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

Pada bagian pembahasan penelitian, peneliti akan memadukan model HUNGER yang dikembangkan oleh Wheelen & Hunger dengan pendekatan *online learning framework* yang diperkenalkan oleh *United Nation* sebagai landasan dalam membuat rumusan manajemen strategi pembelajaran daring. Kedua paduan pendekatan tersebut dikaitkan dengan temuan penelitian untuk dapat menghasilkan rumusan strategi pengembangan pembelajaran dengan metode *virtual*, daring, atau *online*. Berdasarkan kedua pemodelan dalam kaitannya dengan temuan-temuan penelitian, maka dibangun rumusan pengembangan strategi pembelajaran dengan metode *virtual*, daring, atau *online* pada pembahasan penelitian di bawah ini.

### **Pendidik**

Pada temuan penelitian telah disebutkan bahwa para pendidik di Kota Tangerang memiliki beberapa kendala dalam proses pembelajaran dengan metode daring, *online*, atau *virtual*. Permasalahan tersebut adalah perihal infrastruktur, *lack of technology skills* – keterbatasan pengetahuan tentang teknologi, kesiapan yang rendah, *digital immigrant* atau keterasingan dengan dunia teknologi digital, daya kreativitas dan inovasi yang rendah, minim interaksi dengan peserta didik, adanya kejenuhan atau kebosanan, dan keterbatasan dalam melaksanakan berbagai kegiatan praktikum. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi desain untuk mengakomodir segala permasalahan yang dihadapi oleh para pendidik di Kota Tangerang seperti yang telah disebutkan di atas. Peneliti menyampaikan 3 (tiga) strategi yang dapat dijadikan solusi atas analisis permasalahan-permasalahan, antara lain infrastruktur, *enhance technology knowledge* atau peningkatan

pengetahuan teknologi, dan adaptasi pengetahuan serta keterampilan pemelajaran dengan metode daring.

Pertama, diperlukan desain infrastruktur yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses pemelajaran daring. Lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan seyogyanya dapat menyediakan berbagai kebutuhan perlengkapan dan peralatan demi terselenggaranya proses pemelajaran secara daring. Infrastruktur yang dimaksud antara lain pengadaan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan internet yang memadai, pelatihan penggunaan perlengkapan dan peralatan tersebut. Kedua, *enhance technology knowledge* atau peningkatan pengetahuan teknologi. Penyelenggara pendidikan diharapkan memiliki perencanaan atau desain untuk mengembangkan pengetahuan para pendidik, khususnya pada proses dan teknik pemelajaran daring (*brain-ware*). Pengetahuan, kemampuan, dan penguasaan para pendidik atas berbagai peralatan serta perlengkapan, baik dalam bentuk *hardware* dan *software* perlu untuk dikembangkan secara sistematis. Ketiga, adaptasi pengetahuan dan keterampilan pemelajaran dengan metode daring. Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak proses bisnis yang dilakukan oleh manusia, termasuk pada sektor pendidikan.

Pada tahapan pengembangan diharapkan para pendidik dapat terus meng-*update* dan meng-*upgrade* diri dengan perkembangan infrastruktur pemelajaran daring. Peningkatan kualitas diri dengan terus melakukan adaptasi terhadap perkembangan *software* yang digunakan dalam pemelajaran *online*. Sehingga, pendidik dapat menggunakan berbagai aplikasi yang memiliki nilai kebaruan secara andal. Pengembangan lainnya adalah pada aspek model-model pemelajaran daring. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki serta terus mengembang kualitas diri yang dilakukan oleh pendidik, maka berbagai terobosan dalam mengimplementasikan model-model pemelajaran daring dapat berlangsung secara signifikan. Pada akhirnya, proses evaluasi dapat dilakukan untuk melihat kinerja proses pemelajaran yang sedang berlangsung, monitoring pelaksanaan, dan implementasi nilai-nilai yang memiliki kebaruan atau kualitas tinggi.

## **Peserta Didik**

Pada temuan penelitian telah disebutkan bahwa peserta didik di Kota Tangerang memiliki beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran dengan metode daring. Keterbatasan atau permasalahan tersebut adalah yang berkaitan dengan infrastruktur, keterbatasan kuota, kejenuhan atau kebosanan, *digital Native* – akrab dengan dunia teknologi, namun terbatas dalam implementasi, minim interaksi, kurang disiplin, keterbatasan dalam kegiatan praktikum, dan beban pekerjaan sekolah yang meningkat.

Pada domain atau perspektif peserta didik yang memiliki beberapa kendala yang sudah disebutkan di atas, maka diperlukan setidaknya 4 (empat) strategi desain, antara lain infrastruktur, dukungan kuota, adaptasi proses pembelajaran dengan metode daring, dan mengimplementasikan proses pembelajaran secara mandiri. Pada domain peserta didik tidak dibuat desain dalam konteks penguasaan dan keterampilan dalam pembelajaran daring. Hal ini dilakukan berdasarkan landasan berpikir bahwa peserta didik yang didominasi oleh kaum atau generasi Z tidak terlalu menemui kesulitan dalam proses pembelajaran secara daring. Mereka adalah generasi yang dekat dengan teknologi dan cepat dalam adaptasi sebuah perubahan.

Sejajar dengan desain pada perspektif pendidik, para peserta didik pun diharapkan dapat cepat dalam melakukan adaptasi terhadap proses pembelajaran dengan metode daring. Kejenuhan atau kebosanan diharapkan dapat semakin tereliminir dengan berbagai inovasi proses pembelajaran yang dilakukan bersama dengan para pendidik. Oleh karenanya, pada desain adaptasi proses pembelajaran daring ini diharapkan terbentuknya sinergisitas antara pendidik dan peserta didik. Sehingga, desain pembelajaran tersebut akan membentuk komunitas belajar yang mandiri, baik dari sisi pendidik dan juga peserta didiknya. Dengan demikian, pandemi Covid-19 tidak saja selalu dilihat dari sisi negatif yang berdampak kepada terganggunya proses pembelajaran.

## Orangtua

Temuan penelitian menyebutkan bahwa para orangtua peserta didik di Kota Tangerang menghadapi beberapa permasalahan, antara lain *lack of technology skills* – keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan teknologi digital yang digunakan dalam proses pembelajaran, beban lain sebagai guru dan sekaligus sebagai orangtua, *lack of knowledge* – terbatasnya pengetahuan beberapa mata pelajaran tertentu yang diajarkan oleh sekolah, dan tentunya beban ekonomi termasuk di dalamnya.

Permasalahan yang kompleks sebenarnya dihadapi oleh para orangtua., mulai dari aspek pengetahuan, keterampilan, ekonomi, dan keluarga. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh orangtua berkenaan dengan adanya pandemi Covid-19 khususnya pada aspek pembelajaran anak-anak mereka perlu untuk segera diteemukan solusi yang solutif. Orangtua yang memiliki banyak keterbatasan jika dikaitkan dengan konteks persekolahan akan berdampak kepada tanggung jawab yang lain.

Berdasarkan landasan permasalahan-permasalahan tersebut, perlu dibangun dan dirumuskan desain strategi untuk membantu orangtua dalam membantu proses pembelajaran daring anak-anaknya selama masa pandemi Covid-19. Di antara strategi yang dapat dirumuskan dan dikembangkan antara lain *enhance technology knowledge* – pendampingan untuk meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi pembelajaran, membantu dari segi anggaran pembelajaran daring, dan menyediakan berbagai kanal untuk membangun komunikasi serta koordinasi dengan guru dan orangtua peserta didik lainnya. Pada tahapan pengembangan, implementasi, dan evaluasi difokuskan kepada proses pendampingan pembelajaran bagi orangtua, dan koordinasi serta komunikasi dengan guru dan rekan orangtua lainnya. Hal ini dipandang perlu agar orangtua mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam membantu anak-anaknya dalam proses pembelajaran daring selama pandemi Covid-19 ini.

## Pemerintah

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah berkaitan dengan pengadaan infrastruktur secara nasional, kebaruan dalam implementasi dan inovasi teknologi pembelajaran, mempersiapkan dan merencanakan penganggaran, melakukan kerjasama-kerjasama atau koordinasi dengan berbagai pihak, dan menertapkan serta merumuskan kebijakan-kebijakan strategi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh penyelenggara pendidikan di seluruh Indonesia.

Pemerintah daerah Kota Tangerang perlu untuk membuat desain strategi untuk mengurai setiap permasalahan yang terjadi di dalam ruang lingkup tanggung jawab kerjanya. Pemerintah daerah Kota Tangerang dapat berkoordinasi dengan para ahli yang memiliki latar belakang pengetahuan dan keterampilan teknologi komputer untuk sama-sama membuat desain perencanaan sarana dan prasarana pembelajaran di era pandemi Covid-19 ini. Pemilihan perlengkapan, peralatan, dan *software* serta berbagai aplikasi menjadi fokus awal desain strategi ini dengan melihat kondisi penduduk yang berdomisili di Kota Tangerang.

Desain strategi berikutnya adalah dapat mengimplementasikan kebaruan-kebaruan dan inovasi teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini dipandang perlu, karena berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh pasar harus menjawab kebutuhan dari pendidik, peserta didik, dan tentunya orangtua agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Satu hal yang lain adalah teknologi itu merupakan proses bisnis yang cepat berubah, oleh karenanya pemerintah daerah perlu mempertimbangkan waktu dari waktu ekonomis yang ditawarkan oleh salah satu aplikasi pembelajaran daring. Kegiatan dalam mempersiapkan dan merencanakan penganggaran demi keberlangsungan proses pembelajaran era Covid-19 ini pun harus dikerjakan secara simultan dan dalam waktu yang tidak lama.

Pemerintah daerah Kota Tangerang juga diharapkan memiliki rumusan desain untuk melakukan berbagai kerjasama atau koordinasi dengan banyak pihak yang tentunya dapat memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk bersama-sama menghasilkan solusi. Kerjasama dan koordinasi pemerintah daerah Kota Tangerang dapat dilakukan dengan pemerintah-pemerintah daerah di kota lain, kerjasama dengan industri, kerja sama dengan akademisi, dan koordinasi dengan

lembaga-lembaga yang ada di pemerintah pusat, khususnya pada departemen pendidikan dan kebudayaan nasional. Pada akhirnya, pemerintah daerah dapat membuat, menetapkan, dan merumuskan langkah-langkah melalui berbagai kebijakan untuk menguatkan strategi pembelajaran, khususnya di Kota Tangerang. Kebijakan yang mendukung dan memperlengkapi sekolah-sekolah, guru, orangtua, dan peserta didik dalam mengimplementasikan program pembelajaran dengan metode daring di era Covid-19 ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan penelitian agar terbangunnya rumusan strategi pembelajaran daring yang tepat di tingkat pendidikan dasar dan menengah pada masa pandemi di kota Tangerang memiliki kepada 4 (empat) fokus, domain, atau perspektif. Fokus atau domain tersebut adalah pendidik, peserta didik, orangtua, dan pemerintah. Fokus atau sasaran keempat domain tersebut di antaranya kepada pengadaan infrastruktur yang sistematis, peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknologi, kesiapan atau adaptasi proses pembelajaran daring, implementasi dan inovasi teknologi pembelajaran, anggaran, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, dan menerapkan serta merumuskan berbagai kebijakan strategi pembelajaran.

### Saran

Berdasarkan kajian dan analisis serta pembahasan penelitian, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang konstruktif demi terwujudnya proses pembelajaran yang ideal pada masa pandemi Covid-19. Masukan atau saran-saran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mengubah paradigma berkaitan dengan perubahan proses pembelajaran, dari konvensional atau klasik menjadi teknologi *minded*. Perubahan paradigma ini diarahkan bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Kedua, meningkatkan literasi teknologi. Ketiga, memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengimplementasi sebuah terobosan. Keempat, dukungan anggaran yang bersifat ABC atau *activities based costing* – anggaran yang memiliki dasar kegiatan nyata atau konkret.

## DAFTAR PUSTAKA

Franky, Franky. 2019. *Manajemen Strategi: Dalam Konteks Pengetahuan, Keterampilan, dan Pengaplikasian*. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Gagne, Miles Robert & Driscoll, Marcy Perkins. 1988. *Essentials of Learning for Instruction*. USA: PrenticeHall

Haw, Su-Kheng; Haw, Su-Cheng; Wong, Chee-Onn; Lim, Yan-Peng. 2015. *LearnCube: A Conceptual Framework for E-Learning Implementation in Secondary School*. Indian Journal of Science and Technology Vol 8(32)

[https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/OLF\\_2018\\_v14\\_0.pdf](https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/OLF_2018_v14_0.pdf)

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>

<https://www.kemdikbud.go.id/>

<https://covid19.go.id/p/berita>

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/>

<https://www.merriam-webster.com/dictionary/online>

Ong Chee Bin, Johnson. *This new ecosystem transforms education institution into an smart and integrated education producing ecosystem*. AUN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23  
TAHUN 2006 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK SATUAN  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

*Soundering, Stephen. 2017. Management – from hiring and firing to imparting new skills, an essential guide to management strategies 101. USA: Adams Media*

*Sugiono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. Bandung: Penerbit Alfabeta*

*Spradley, James P. 1980. Participant Observation. Holt, Rinehart and Winston*

*Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*

*Whellen, Thomas & Hunger, David. A Descriptive Model of Strategic Management*

# PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP KINERJA BADAN KERJASAMA USAHA SOSIAL WARGA TAMA (BERSAMA)

Budiharjo, Budiharjo; Harry Nenobais, T Herry Rachmatsyah

budiharjo@dsn.moestopo.ac.id

---

## **ABSTRACT**

*Performance or results are indicators to assess the progression of an organization. If the performance or results achieved exceed the targets that have been previously set, then the organization will grow significantly. But on the contrary, if the performance or achievements do not meet the targets that have been mutually agreed upon, it can be said that there is a decrease or negative correction of the organization's performance. Of course, the progression of the organization based on the calculation between results and targets has several indicators. For example, organizational communication, working spirit, leadership, organizational systems, and so on. However, on the other hand, there are indicators that can act as an external part that is strongly integrated into the growth and development of organizational performance. The external environment of the organization in question is, for example, world economic conditions that have an impact on domestic industry, political, social conditions, technological developments, and so on. The BADAN KERJASAMA USAHA SOSIAL WARGA TAMA, called BERSAMA is an organization that focuses on services provided to the community or focuses on public services. As an agency close to public interests, BERSAMA has a strategic function and role in building a leading organization. Therefore, the support and participation of many parties is needed to make this happen, one of which is the positive contribution of workers or employees working at BERSAMA. The research was conducted at the*

BERSAMA from July to September 2020. The research method used was quantitative with an associative causality study paradigm and an explanatory survey approach (Bambang and Lina Miftahul Jannah, 2005). The population used in the study were 50 employees who worked at BERSAMA. The sampling technique used was saturated sampling based on primary and secondary data. While the research instrument used a tabulated questionnaire with a Likert scale (Sugiyono, 1994) (Sugiyono, 2006). The research variables consisted of 2 (two) independent variables, namely X1 = Organizational Communication and X2 = Working Spirit and 1 (one) dependent variable, namely Y = Performance. The data collection techniques used in the study were observation, questionnaires, interviews, and literature studies. The data processing technique is done by editing the data that has been collected, tabulated into tables or grouping, and calculating using the SPSS program.

The results stated, among others: 1) there was an influence of organizational communication (X1) on the performance of (Y) at BERSAMA; 2) there is an influence of working spirit (X2) on the performance of (Y) at BERSAMA; and 3) there is an influence of organizational communication (X1) and working spirit (X2) together on the performance (Y) at BERSAMA.

*Keywords: organizational communication, performance, public services, working spirit*

## **ABSTRAK**

Kinerja, capaian, atau hasil merupakan indikator untuk menilai kemajumuduran suatu organisasi. Jika kinerja atau hasil yang dicapai melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka organisasi tersebut bertumbuh secara signifikan. Namun sebaliknya, jika kinerja atau capaiannya tidak memenuhi target yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka dapat dikatakan bahwa terjadi penurunan atau koreksi negatif atas kinerja organisasi tersebut. Tentunya, kemajumuduran organisasi yang dilandaskan perhitungan antara hasil dan target memiliki beberapa indikator. Semisal, komunikasi organisasi, semangat

atau *spirit* kerja, kepemimpinan, sistem berorganisasi, dan lain sebagainya. Namun pada sisi lainnya ditemukan indikator yang dapat berlaku sebagai bagian eksternal yang terintegrasi secara kuat terhadap tumbuh kembangnya kinerja organisasi. Lingkungan eksternal organisasi yang dimaksud semisal keadaan ekonomi dunia yang berdampak kepada industri dalam negeri, kondisi politik, sosial, perkembangan teknologi, dan lain-lain. Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama atau disingkat BERSAMA merupakan organisasi yang memiliki fokus kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau fokus kepada *public service*. Sebagai badan yang memiliki kedekatan dengan kepentingan publik, BERSAMA memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam membangun organisasi unggulan. Oleh karenanya, dibutuhkan dukungan dan partisipasi banyak pihak untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah kontribusi positif dari pekerja atau pegawai yang bekerja di BERSAMA. Penelitian dilakukan di Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA) pada Juli hingga September 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma studi asosiatif kausalitas dan pendekatan survei eksplanatif (Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2005). Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah pegawai yang bekerja pada BERSAMA yang berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh dengan landasan data primer dan sekunder. Sedangkan instrumen penelitian menggunakan tabulasi kuesioner dengan skala likert (Sugiyono, 1994) (Sugiyono, 2006). Variabel penelitian terdiri atas 2 (dua) variabel bebas, yakni X1=Komunikasi Organisasi dan X2= Semangat Kerja dan 1 (satu) variabel terikat, yakni Y=Kinerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, penyebaran kuesioner atau angket, wawancara, dan studi literatur. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing data yang telah dikumpulkan, ditabulasikan ke dalam bentuk tabel atau pengelompokan, dan dilakukan perhitungan dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian menyebutkan, antara lain: 1) terdapat pengaruh komunikasi organisasi (X1) terhadap kinerja (Y) Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA); 2) terdapat pengaruh semangat kerja (X2) terhadap kinerja (Y) Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA); dan 3) terdapat pengaruh

komunikasi organisasi (X1) dan semangat kerja (X2) secara bersama-sama terhadap kinerja (Y) Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA).

Kata kunci: Kinerja, komunikasi organisasi, pelayanan publik, semangat kerja

## LATAR BELAKANG

Organisasi merupakan organisme yang menunjuk adanya eksistensi kehidupan di dalamnya. Kehidupan yang digerakkan oleh manusia, sistem, dan relasi antarkeduanya (Danandjaja, Andreas A., 1994). Dengan demikian, organisasi memerlukan interaksi yang intensif dengan lingkungannya agar aktivitas keorganisasian dapat berlangsung secara simultan. Pada sisi lain, kondisi atau dinamika sosial akan turut menentukan arah dan tujuan organisasi. Sebagai implikasinya adalah semua kebijakan strategis organisasi perlu mewedahi kebutuhan beradaptasi dalam rangka penentuan eksistensi organisasi dalam hubungan antarinststitusi atau antarlembaga. Pada bagian di atas telah disebutkan bahwa organisasi adalah organisme dan *spirit* atau semangat di dalam organisasi tersebutlah yang menggerakkan roda organisasi bertumbuh kembang sebagaimana mestinya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan total manusia-manusia organisasi di dalamnya.

*Spirit* atau semangat kerja merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh setiap individu sebagai seorang pekerja (Moekijat, 1997). Kondisi yang dapat dibangun secara pribadi dan bersifat individual (Gates at all, 1992). *Spirit* atau semangat kerja memang dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem sekitarnya. Namun, pada prinsipnya semangat kerja harus ditumbuhkembangkan secara pribadi (Koontz, Harold dalam Malayu Hasibuan, 1999). *Organisasi dan Motivasi Sebagai Dasar Meningkatkan Semangat Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara. Oleh karenanya, sebagai organisasi yang memiliki kehidupan, manusia-manusia organisasi diharapkan dapat memiliki pandangan, wawasan, dan paradigma yang logis berkaitan dengan semangat kerja ini (George, Claude S., 1994). Hal ini diusahakan dengan sistematis karena dengan adanya semangat kerja dalam diri setiap individu, maka sebagai karyawan atau pegawai akan berdampak kepada kesungguhan individu dalam

melaksanakan pekerjaannya dan pada akhirnya berakibat kepada peningkatan kinerja organisasi (Budiharjo, 2000) (Nitisemito, Alex S.,1992).

Pada akhirnya akan memberikan kontribusi dalam bentuk kinerja yang positif dan konstruktif bagi tercapainya tujuan organisasi secara utuh. Kinerja organisasi selalu memiliki ukuran atau indikator, agar supaya dapat terlihat, terukur, dan terawasi tumbuh kembangnya. Komunikasi organisasi yang kondusif sangat dibutuhkan oleh setiap karyawan atau pegawai yang bekerja di dalam sebuah organisasi demi tercapainya kinerja yang telah ditetapkan. Demikian dengan semangat kerja terhadap kinerja baik secara individu maupun tergabung di dalam suatu kelompok kerja pun memberikan kontribusi dalam pencapaian tingkat kinerja tertentu. Pada faktanya, terdapat organisasi pemerintah maupun swasta telah menyadari bahwa Komunikasi organisasi dan semangat kerja merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi kinerja organisasi.

Namun, tidak sedikit yang hanya berhenti sebagai jargon dan tidak diteruskan dalam langkah-langkah strategis yang bersifat operasional.

Demikian pada organisasi Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA) di mana pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari belum menunjukkan sebagai sebuah organisasi yang kondusif dan berkembang. Sehingga, dapat berdampak kepada rendahnya semangat kerja pegawai yang bekerja di dalam BERSAMA. Salah satu fakta empirisnya adalah masih adanya ego sektoral antarunit kerja di dalam organisasi tersebut. Hal ini berdampak kepada menurunnya kinerja masing-masing unit kerja. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BERSAMA antara lain: 1) komunikasi di dalam organisasi yang tidak atau kurang kondusif. Hal ini ditandai dengan adanya sekitar 60% perlakuan atasan kepada bawahan yang kurang adil. Pada sisi lain, terdapat 70% jumlah pegawai yang tidak profesional dan 65% menyampaikan informasi yang belum teruji kebenarannya kepada atasan; 2) kurang atau tidak adanya kordinasi antaraunit kerja yang ditandai dengan lemahnya komunikasi antarunit organisasi dan bagian yang saling terkait sekitar 75%; 3) kurang atau tidak adanya pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan. Hal ini ditandai dengan 50% pimpinan kurang melakukan pengawasan langsung atau kegiatan sidak atau inspeksi mendadak yang dilakukan

oleh pimpinan di tempat pekerjaan; 4) 65% pegawai memiliki semangat kerja yang rendah. Hal ini ditandai dengan adanya pegawai yang sering tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, mengerjakan sesuatu yang tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan utamanya, dan terjadi kelambanan dalam menyampaikan laporan hasil pekerjaan.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas yang berkaitan dengan permasalahan kinerja, maka menjadi acuan peneliti untuk melakukan analisis tentang faktor-faktor yang mengakibatkan kinerja menurun, khususnya berkaitan dengan komunikasi organisasi dan semangat kerja organisasi di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti hendak menguji penelitian ini lebih komprehensif dalam tulisan ilmiah yang diberi judul: Pengaruh komunikasi organisasi dan semangat kerja terhadap kinerja pada Badan

Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA).

## **METODOLOGI**

Penelitian dilakukan di Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA) pada Juli hingga September 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan paradigma studi asosiatif kausalitas dan pendekatan survei eksplanatif (Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2005). Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah pegawai yang bekerja pada BERSAMA yang berjumlah 50 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh dengan landasan data primer dan sekunder. Sedangkan instrumen penelitian menggunakan tabulasi kuesioner dengan skala likert (Sugiyono, 1994) (Sugiyono, 2006). Variabel penelitian terdiri atas 2 (dua) variabel bebas, yakni X1=Komunikasi Organisasi dan X2= Semangat Kerja dan 1 (satu) variabel terikat, yakni Y=Kinerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, penyebaran kuesioner atau angket, wawancara, dan studi literatur. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing data yang telah dikumpulkan, ditabulasikan ke dalam bentuk tabel atau pengelompokan, dan dilakukan perhitungan dengan menggunakan program SPSS.

## HASIL PENELITIAN

Temuan atau hasil penelitian yang didapat melalui proses olah data atas 3 (tiga) variabel penelitian disajikan dalam bentuk data skor, yang terdiri dari satu variabel terikat yaitu kinerja dan dua variabel bebas, antara lain komunikasi organisasi (X1) dan semangat kerja

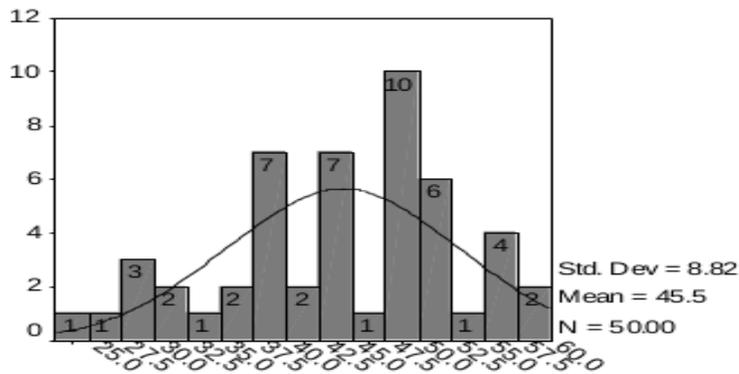
(X2). Jumlah data yang dianalisis berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada pegawai BERSAMA sebanyak 50 responden. Data yang dideskripsikan dalam pembahasan ini merupakan data obyektif yang didapatkan dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian yang valid dan reliabel. Instrumen untuk variabel kinerja (Y) sebanyak 15 butir (13 valid); instrumen untuk variabel komunikasi organisasi (X1) sebanyak 15 butir (14 valid); dan instrumen untuk semangat kerja (X2) sebanyak 15 butir (12 valid). Sebanyak 50 orang responden telah memberikan tanggapan secara obyektif. Sehingga, data yang diperoleh dari 50 orang responden dapat dijadikan dasar pengukuran terhadap masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya, untuk lebih memberikan gambaran mengenai dasar pengukuran dari masing-masing variabel penelitian, dalam penelitian ini dilakukan pengukuran variabel penelitian menggunakan skala Likert terhadap data yang masih berupa skala ordinal. Melalui skala Likert ini, setiap variabel penelitian dapat dinyatakan dalam ukuran tertentu dan yang lebih penting adalah bahwa ukuran tersebut dapat dikuantitatifkan.

Pada skala pengukuran ini, setiap tanggapan atau sikap terhadap suatu obyek tertentu diberikan skala kontinum mulai dari skor 1 sampai dengan skor 5. Berdasarkan skala tersebut terdapat skor minimum dan skor maksimum. Pertama, variabel kinerja (Y) dengan 13 butir valid dari instrumen diperoleh skor minimum:  $1 \times 13 = 13$  dan skor maksimum:  $5 \times 13 = 65$ . Kedua, variabel komunikasi organisasi (X1) dengan 14 butir valid dari instrumen diperoleh skor minimum:  $1 \times 14 = 14$  dan skor maksimum:  $5 \times 14 = 70$ . Ketiga, variabel semangat kerja (X2) dengan 12 butir valid dari instrumen diperoleh skor minimum:  $1 \times 12 = 12$  dan skor maksimum:  $5 \times 12 = 60$ . Pendeskripsian data hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa data tersebut menunjukkan sifat-sifat atau adanya kecenderungan-kecenderungan tertentu. Dalam pengujian statistik selanjutnya, sangat dipersyaratkan bahwa data yang di analisis menggunakan

alat statistik harus memenuhi persyaratan di mana salah satunya adalah bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena itu, agar pendeskripsian data dapat memberi gambaran mengenai kecenderungan-kecenderungan tertentu dan memenuhi persyaratan normalitas data, maka pendeskripsian data dimulai dari analisis kecenderungan memusat (*central tendency*) berupa rata-rata (*mean*), *median*, *mode*; distribusi (*distribution*) berupa *skewness* dan kurtosis; dan distribusi frekuensi beserta grafik histogram dan kurva normal. Adapun langkah-langkah pendeskripsian data tersebut secara bertahap dimulai dari variabel kinerja (Y), komunikasi organisasi (X1), dan semangat kerja (X2).

### Variabel Kinerja (Y)

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpul data yang berkaitan dengan variabel kinerja (Y) dengan skor terendah adalah sebesar 26 dan skor tertinggi (maksimum) sebesar 61 dengan rentangan sebesar 35 dengan jumlah data sebanyak 50, maka di dapatkan hasil akhir melalui tabel di bawah ini.



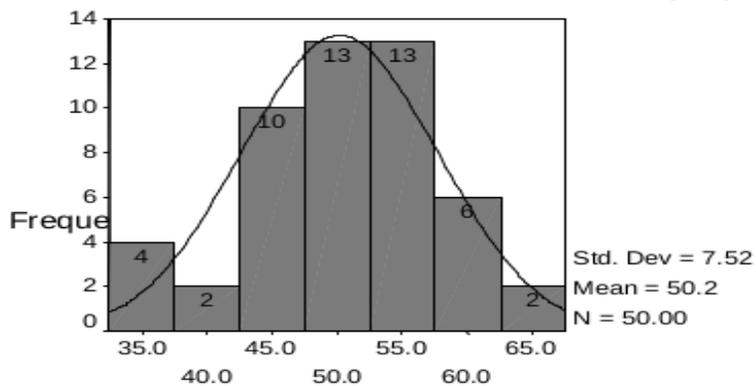
Gambar 1. Kurva Kinerja Pegawai BERSAMA

Gambar di atas menunjukkan terdapat kurva distribusi sedang atau mesokurtik atas variabel kinerja pegawai BERSAMA dan atas dasar perhitungan analisis nilai indikator terdapat indikator pengendalian struktur yang ideal memiliki nilai tertinggi sebesar 184,3. Di antara indikator lainnya, seperti komunikasi yang

harmonis (181,0), keikutsertaan pegawai (177,0), imbalan yang adil (173,5), dan tekanan pekerjaan yang membutuhkan nalar (150,0).

### Variabel Komunikasi Organisasi (X1)

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpul data yang berkaitan dengan variabel komunikasi organisasi (X1), maka terdapat skor terendah (minimum) sebesar 33 dan tertinggi (maksimum) sebesar 66 dengan range 33 berdasarkan jumlah data sebanyak 50 responden, maka di dapatkan hasil akhir melalui tabel di bawah ini.

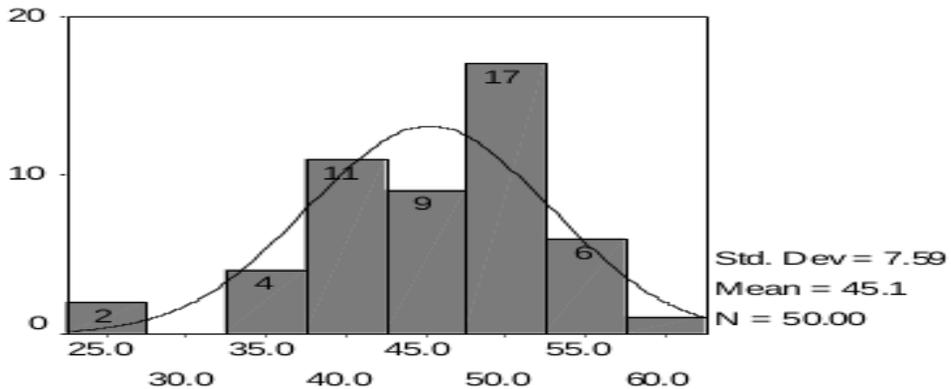


Gambar 2. Kurva Komunikasi Organisasi BERSAMA

Gambar di atas menunjukkan kurva distribusi sedang atau mesokurtik stas variabel komunikasi organisasi pegawai BERSAMA dan atas dasar perhitungan analisis nilai indikator terdapat indikator disiplin memiliki nilai tertinggi sebesar 192,3. Di antara indikator lainnya, seperti giat bekerja (190,8), menciptakan gagasan atau ide (166,5), dan tanggung jawab (161,0).

## Variabel Semangat Kerja (X2)

Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpul data yang berkaitan dengan variabel semangat kerja (X2), maka terdapat skor terendah (minimum) sebesar 24 dan tertinggi (maksimum) sebesar 58 dengan range sebesar 34 berdasarkan jumlah data sebanyak 50 responden, maka di dapatkan hasil akhir melalui tabel di bawah ini.



Gambar 3. Kurva Semangat Kerja BERSAMA

Gambar di atas menunjukkan kurva distribusi sedang atau mesokurtik stas variabel komunikasi organisasi pegawai BERSAMA dan atas dasar perhitungan analisis nilai indikator terdapat indikator faktor psikologis memiliki nilai tertinggi sebesar 192,8. Di antara faktor lainnya, seperti faktor organisasi (191,0) dan faktor individual (176,7).

## PEMBAHASAN PENELITIAN

Dengan menggunakan aplikasi program SPSS, maka pembahasan penelitian ini terbagi atas 3 (tiga) uraian hipotesis, di antaranya: 1) terdapat pengaruh komunikasi organisasi (X1) terhadap kinerja (Y) Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA); 2) terdapat pengaruh semangat kerja (X2) terhadap kinerja (Y) Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA); dan 3) terdapat pengaruh komunikasi organisasi (X1) dan semangat kerja (X2) secara bersama-sama terhadap kinerja (Y) Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA).

**Hipotesis 1:** terdapat pengaruh komunikasi organisasi (X1) terhadap kinerja (Y) Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA).

Hubungan fungsional antara variabel komunikasi organisasi (X1) dan kinerja (Y) ditunjukkan dengan adanya persamaan regresi linier:  $\hat{Y} = 3,475 + 0,976X1$ . Dengan demikian dari hasil pengujian keberartian dan linieritas dapat disimpulkan bahwa hubungan fungsional antara variabel komunikasi Organisasi (X1) dan variabel kinerja (Y) yang ditunjukkan oleh persamaan regresi linier:  $\hat{Y} = 3,475 + 0,976X1$  adalah signifikan terdapat hubungan yang linier. Hal ini mengindikasikan adanya persamaan regresi tersebut dapat digunakan sebagai hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan. Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa pada angka konstansta kinerja sebesar 3,475, artinya setiap penambahan satu satuan komunikasi organisasi akan berpengaruh kepada peningkatan kinerja sebesar 0,976 satuan.

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh independen variabel X1 dan X2 secara partial terhadap dependen variabel Y dalam persamaan regresi linear berganda, maka harus dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode statistik. Korelasi antara variabel komunikasi organisasi (X1) dengan variabel kinerja (Y) adalah 0,8320. Hal ini menunjukkan adanya korelasi parsial sebesar 0,7838. Angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel komunikasi organisasi (X1) dengan variabel kinerja (Y) turun sebesar 0,482, bila dikontrol oleh semangat kerja (X2).

**Hipotesis 2:** terdapat pengaruh semangat kerja (X2) terhadap kinerja (Y) Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA).

Hubungan fungsional antara variabel semangat kerja (X2) dan variabel kinerja (Y) ditunjukkan oleh persamaan regresi linier:  $\hat{Y} = 18,021 + 0,608X2$ . Dengan demikian dari hasil pengujian keberartian dan linieritas dapat disimpulkan bahwa hubungan fungsional antara variabel semangat kerja (X2) dan variabel kinerja (Y) ditunjukkan oleh persamaan regresi linier:  $\hat{Y} = 18,021 + 0,608X2$  adalah signifikan dan memiliki hubungan yang linie. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat persamaan regresi yang dapat digunakan sebagai hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan. Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa

pada angka konstansta kinerja sebesar 18,021 yang memiliki arti bahwa setiap penambahan satu satuan semangat kerja akan berpengaruh kepada meningkatkan kinerja sebesar 0,608 satuan. Untuk mengatahui signifikansi pengaruh independen variabel X1 dan X2 secara partial terhadap variabel Y dalam persamaan regresi linear berganda, maka harus dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan metode statistik parsial. Korelasi antara variabel semangat kerja (X2) dan variabel kinerja (Y) adalah 0,5230. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel semangat kerja (X2) dengan variabel Kinerja (Y) turun sebesar 0,2220 apabila dikontrol oleh variabel komunikasi organisasi (X1).

**Hipotesis 3:** terdapat pengaruh komunikasi organisasi (X1) dan semangat kerja (X2) secara bersama-sama terhadap kinerja (Y) Badan Kerjasama Usaha Sosial Warga Tama (BERSAMA).

Hubungan fungsional antara variabel komunikasi organisasi (X1) dan semangat kerja (X2) dengan variabel kinerja (Y) ditunjukkan oleh persamaan regresi linier:  $\hat{Y} = 8,342 + 0,877X1 + 0,217X2$ . Dengan demikian dari hasil pengujian keberartian dapat disimpulkan bahwa hubungan fungsional antara variabel komunikasi organisasi (X1), semangat kerja (X2), dan variabel kinerja (Y) ditunjukkan oleh persamaan regresi linier:  $8,342 + 0,877X1 + 0,217X2$  adalah signifikan yang berarti bahwa persamaan regresi tersebut dapat digunakan sebagai hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan. Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa angka regresi tersebut menunjukkan bahwa tanpa komunikasi organisasi dan semangat kerja diperoleh angka konstanta kinerja sebesar 8,342. Sementara itu, setiap penambahan satu satuan komunikasi organisasi akan meningkatkan sebesar 0,877 satuan kinerja dan penambahan satu satuan X2 akan meningkatkan 0,217 satuan variabel kinerja. Angka regresi menunjukkan bahwa komunikasi organisasi dan semangat kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel kinerja. Sebagai konklusinya. Pertama, hubungan secara bersama-sama antara variabel komunikasi organisasi (X1) dan variabel semangat kerja (X2) dengan variabel kinerja (Y), merupakan peringkat pertama dengan koefisien korelasi ( $R_{y12}$ ): 0,848 dan koefisien determinasi ( $R_{y122}$ ): 0,720 sebesar 72%.

Kedua, hubungan antara variabel komunikasi organisasi (X1) dan variabel kinerja (Y) merupakan peringkat ketiga dengan koefisien korelasi ( $r_{y1}$ ): 0,832 dan koefisien determinasi ( $r_{y1^2}$ ): 0,832 sebesar 69,2%. Ketiga, hubungan antara variabel semangat kerja (X2) dan variabel kinerja (Y) merupakan peringkat kedua dengan koefisien korelasi ( $r_{y2}$ ): 0,523 dan koefisien determinasi ( $r_{y2^2}$ ): 0,523 sebesar 27,4%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja BERSAMA. Pengaruh tersebut ditunjukkan oleh adanya persamaan regresi:  $\hat{Y} = 3,475 + 0,976X_1$ . Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan apabila komunikasi organisasi meningkat, maka kinerja akan meningkat.
2. Terdapat pengaruh semangat kerja terhadap peningkatan kinerja BERSAMA. Pengaruh tersebut ditunjukkan oleh persamaan regresi:  $\hat{Y} = 18,021 + 0,608X_2$ . Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan apabila semangat kerja meningkat, maka kinerja akan meningkat.
3. Terdapat pengaruh komunikasi organisasi dan semangat kerja secara simultan terhadap kinerja BERSAMA. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan regresi ganda:  $\hat{Y} = 8,342 + 0,877X_1 + 0,217X_2$ . Persamaan regresi tersebut menunjukkan terdapat kecenderungan apabila komunikasi organisasi dan semangat kerja secara simultan meningkat, maka kinerja akan meningkat.

## Saran

Dengan adanya hubungan atau pengaruh positif antara komunikasi organisasi (X1) terhadap kinerja (Y) dan pengaruh semangat kerja (X2) terhadap Kinerja (Y), maka dengan demikian perlu upaya atau perhatian yang lebih terhadap komunikasi organisasi (X1) dan Semangat Kerja (X2). Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Perbaiki kinerja perlu untuk dilakukan dengan peningkatan komunikasi yang harmonis. Komunikasi yang dibangun secara baik antara karyawan dengan karyawan dan karyawan dengan pimpinan serta antarpimpinan. Pemberian kepercayaan dalam bentuk delegasi dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Oleh karenanya, pimpinan diharapkan memiliki kemampuan untuk mengoordinasikan keterlibatan karyawan pada beberapa kegiatan yang sesuai. Sehingga, terdapat kontribusi dan pengalaman yang dapat diambil dan diberikan oleh karyawan.
2. Perlu dilakukan upaya perbaikan komunikasi organisasi yang fokus kepada tanggung jawab dengan meminta koordinasi secara rutin, baik secara tertulis maupun tertulis. Penerapan program *reward* and *punishment* diharapkan dapat memberikan motivasi demi terpenuhinya kebutuhan kerja dan kesejahteraan pegawai. Hal ini dimaksudkan agar semua sivitas organisasi termotivasi dan giat bekerja dalam menciptakan gagasan atau ide yang konstruktif dan mendatangkan keuntungan organisasi secara maksimal.
3. Yang perlu dilakukan terhadap peningkatan semangat kerja yaitu dengan fokus kepada faktor individual. BERSAMA dapat memenuhi beberapa kebutuhan yang krusial, antara lain pendapatan yang sesuai, tunjangan yang memadai, dan fasilitas kerja.

Pada sisi lain dibutuhkan dukungan terhadap faktor psikologis, seperti suasana dan lingkungan kerja yang kondusif; keteladan dan wibawa pimpinan. Ditambah dengan adanya faktor Organisasi yang mampu memberikan yang terbaik buat para pekerja. Sehingga, organisasi mempunyai *portfolio* yang baik di kalangan pekerja organisasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang dan Lina Miftahul Jannah, (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Grafindo Persada
- Budiharjo, (2000). *Kinerja Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Danandjaja, Andreas A. (1994). *Budaya Perusahaan*. Makalah Kerja Disampaikan dalam Acara Seminar Budaya Perusahaan Industri Strategis Grand Hyatt. Jakarta
- Gates at all, (1992). *Penilaian Kinerja Pegawai*. Jakarta: Sinar Harapan
- George, Claude S. dalam Hani Handoko , (1994). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE
- Handyaningrat, (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Manajemen*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1996
- Koontz, Harold dalam Malayu Hasibuan, (1999). *Organisasi dan Motivasi Sebagai Dasar Meningkatkan Semangat Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moekijat, (1997). *Manajemen tenaga kerja dan hubungan kerja*. Bandung: CV Pioneer
- Nitisemito, Alex S. (1992). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia, 1992

Poerwadarminto, W.J.S.(1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Sugema, Bambang (1991). *Motivasi Dalam Organisasi*. Jakarta : LAN RI

Sugiyono, (1994). *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono, (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta

Suryobrata, Sumadi (1994). *Mengukur Semangat Kerja Pegawai*. Jakarta: Rineka Cipta

Thoha, Mithaf (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainun, (1992). *Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung

# IMPLEMENTASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR JILID-I DALAM KONTEKS MANAJEMEN BENCANA (STUDI DI KOTA JAKARTA SELATAN)

Bhakti Nur Avianto<sup>1</sup>; Muhammad Burhan Kamil<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik,  
Universitas Nasional <sup>1,2</sup>

e-mail: bh4kti.nur@gmail.com <sup>1</sup>; burhankamil13@gmail.com <sup>2</sup>

---

## Abstrak

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Jilid 1 (PSBB) di Jakarta di harapkan mampu memberi efek pemutusan mata rantai dari penyebaran wabah virus Covid-19, dengan mengurangi aktifitas di tengah-tengah masyarakat dari sekolah, perkantoran, hingga pusat-pusat perbelanjaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan informasi menerapkan metode wawancara, pengamatan, serta dokumentasi. Penganalisisan data menggunakan model miles dan Huberman yaitu pengumpulan informasi, mereduksi data, representasi data, serta verifikasi data. Selain itu digunakan untuk mengetahui seberapa efektifitas program kebijakan PSBB Jilid 1 sehingga bisa di temukan tingkat efektifitas dan efisiensi dari program tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PSBB jilid 1 di Provinsi DKI Jakarta masih belum berjalan dengan efektif namun dari program kebijakan tersebut patut untuk di apresiasi. Hal ini dikarenakan dilihat dari pengawasan yang kurang maksimal dalam program kebijakan dan pengendalian, kejelasan strategi, pencapaian tujuan, dan tersedianya sarana dan prasarana. Hal ini sering terjadi dikarenakan komunikasi antar Lembaga pemerintah ke pemerintah maupun dari pemerintah ke masyarakat kurang efektif. Dengan adanya program PSBB jilid 1, dengan berbagai kelebihan dan kekurangan diharapkan pemerintah

terus berupaya untuk memutus mata rantai dari penyebaran wabah virus Covid-19 yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: Kebijakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Covid-19, Efektivitas dan efisien

## **Pendahuluan**

Bencana bukanlah fenomena asing bagi masyarakat. Kata “bencana” cukup familiar didengar dan digunakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Bencana merupakan sebuah ide mengenai keberfungsian masyarakat yang memberi dampak bagi kerugian masyarakat baik material ataupun lingkungan yang diluar kapasitas masyarakat yang menjadi korban bencana serta harus menghadapi dengan sumber daya yang mereka miliki (Rautela, 2015; Kusumasari, 2016; Kelman, 2016). Bencana terjadi di keadaan rusak serta guncangan yang memberi sebab hancurnya structural sosial hingga populasi didalamnya sehingga kurang mampu dalam melakukan pengentasan fenomena dan memerlukan uluran tangan eksternal. Bencana adalah sebuah peristiwa yang muncul tanpa prediksi sehingga mengakibatkan kehancuran maupun kerusakan bagi penderitaan individu (Fadmawaty & Wasludin, 2021; Setyawati & Ningrum, 2021). Kebencanaan merupakan fenomena yang muncul bersamaan tanpa atau dengan dengan ada atau tidaknya gejala yang mengakibatkan adanya kerusakan ataupun ancaman bagi masyarakat dalam jumlah kecil atau besar dan diperlukan adanya usaha perpindahan dalam memberi akses layanan gawat darurat yang resmi dalam Hukum (Kusumasari, 2014; Fadmawaty & Wasludin, 2021; Setyawati & Ningrum, 2021). Dari penjelasan mengenai bencana dan manajemen bencana pada awal tahun 2020 dunia di gemparkan dengan bencana non alam yang hampir menyerang seluruh dunia yaitu merupakan virus jenis baru bernama COVID-19 yang menjadi skala pandemic termasuk di Indonesia. Ketika terjadinya pandemic COVID-19 terutama di Indonesia membuat kegiatan sosial dimasyarakat ikut terdampak, seperti kegiatan perkantoran, kegiatan sekolah, kegiatan keagamaan, UMKM, serta kegiatan di moda transportasi.

Dampak dari bencana non alam tersebut pemerintah membuat sebuah regulasi terkait pandemic yaitu PSBB sebagai upaya pelayanan manajemen bencana dengan level mitigasi serta tanggap bencana PSBB adalah sebuah jalan regulasi kebijakan manajemen bencana dari pemerintah sehubungan kondisi pandemi covid 19 untuk akselerasi penanganan hal tersebut. PP Nomor 21 di Periode 2020 Pasal 1, yang dimaksudkan dengan PSBB merupakan suatu pembatasan dalam kegiatan spesifik masyarakat di sebuah area yang telah dipandang mengalami infeksi COVID-19 sehingga dilakukan pencegahan yang menutup celah penyebaran virus tersebut. Dalam PSBB dilandaskan atas pertimbangan diantaranya: a) Distribusi COVID-19 di angka kasus dan kematian yang mengalami kenaikan dan perluasan lintas kewilayahan memiliki dampak dalam berbagai aspek kesejahteraan negara Indonesia; b) Dampak distribusi COVID-19 memberi akibat adanya keadaan secara khusus yang perlu penanggulangan melalui PSBB; c) Didasarkan atas penimbangan di atas, diperlukan penerapan PSBB oleh Peraturan Pemerintah sebagai akselerasi penanggulangan COVID-19 (Suharmanto, 2020; Prime, Wade, & Browne, 2020; Syadidurrahman et al., 2020; Lestari & Paripurno, 2020; Kuswanti, Munadhil, Zainal & Oktarina, 2020). Dalam PP No. 21 di Tahun 2020 ini mengatur PSBB dalam Menteri Kesehatan dan pemerintah daerah didasarkan atas persetujuan menteri Kesehatan. Maka dari itu terbitlah Pergubda Jakarta nomor 33 di periode 2020 tentang PSBB dalam upaya penanggulangan pandemi di daerah Jakarta. Setelah Menkes menerbitkan Keputusan HK.01.07/MENKES/239/2020 kemudian diterapkannya PSBB di Jakarta demi akselerasi penggulungan COVID-19. Dari peraturan yang sudah diberlakukan selama PSBB Jilid I kasus yang terjadi sampai 7.203 klien pertanggal 23 April 2020.

Penerapan PSBB jilid I di Jakarta terdapat beberapa masalah selain kepadatan penduduk dan mobilitas penduduk, salah satunya yaitu komunikasi pemerintah pusat maupun daerah tidak sinkron satu sama lain serta tidak konsisten sehingga tidak menemukan kedudukan yang jelas. Dari permasalahan tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait penerapan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut. Dimana tidak sinkron dan tidak konsisten pemerintah diakibatkan adanya kesulitan dalam menemukan titik perbedaan kepentingan terkait isu sosial dan kesehatan. Sehingga kerumitan ini dapat mengalami peningkatan

apabila pengaturan yang diwujudkan belum dilakukan perumusan kejelasan dari kompromi kepolitikan yang diwarnai proses dari perumusan PSBB itu (Ashidiqie, 2020; Ganong & Coleman, 2020)

Pandemi COVID-19 masih berlangsung sehingga dari Implementasi PSBB Jilid I di Jakarta Selatan itu sendiri bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah setempat apakah kebijakan tersebut sudah terealisasi sampai ke level terbawah seperti Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW). Sebab dari keterbatasan informasi kebijakan COVID-19 yang di sampaikan oleh para pelaku gugus tugas akselerasi penanggulangan COVID-19 implementer sudah sampaikan informasi kebijakan maupun program itu kepada masyarakat terutama pada masyarakat padat penduduk, dan sudah memahami atau belum apa isi dari kebijakan Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar. Karena sebetulnya, pengimplementasian yang mengikutkan elemen-elemen seperti kualitas hingga kapasitas dalam melakukan implementasian serta kualitas SDM ditujukan dalam pengimplementasian ketetapan instrumen guna menuju tujuan kebijakan. Dalam banyak kasus bencana terutama di negara-negara berkembang, pemerintah daerah menyatakan bahwa bencana menggambarkan adanya biaya yang sangat tinggi yang harus dikeluarkan serta adanya inefisiensi yang dikarenakan pengambilan keputusan terpusat. Dimana ketika terjadinya bencana juga menunjukkan bahwa adanya keluhan tentang kekuatan dan tanggung jawab yang tepat dalam merespons situasi krisis dan darurat. Mengacu uraian tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan serta menganalisis Implementasi PSBB Jilid I di Jakarta Selatan Dalam Konteks Manajemen Bencana (Green et al., 2009; Fadmawaty & Wasludin, 2021).

## **Literature review**

### ***Implementasi Kebijakan***

Ada beragam pendefinisian terkait kebijakan public yang ada di literature bisang politik. Setiap definisi telah memberikan sebuah penekanan yang berbeda. Hal ini dimunculkan akibat setiap ahli telah memiliki perbedaan latar belakang dengan intervensi dan model yang berbeda pula sehingga menentukan pendefinisian

kebijakan public yang ia keluarkan. Menurut Pasolong (2013:39), kebijakan public merupakan seperangkat opsi yang memiliki keterkaitan yang diciptakan oleh lembaga pemerintahan di bidang yang terkait dengan tugasnya, seperti pertahanan, kesehatan dan keenergian, kependidikan, penjejahteraan masyarakat, dan aspek kriminalitas. Hal yang sama diungkapkan Rusli (2015:38) bahwasanya kebijakan bangsa terkait pilihan oleh pemerintah baik dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Masih menurut Rusli (2015:40) memberikan pendefinisian atas kebijakan public yaitu seperangkat kegiatan dalam keputusan yang bertolak belakang. Atas definisi-definisi tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya kebijakan public ialah sebuah opsi pemerintah dalam menindak dengan tujuan mengentas masalah yang dihadapi menuju kepentingan kolektif.

Implementasi dikaitkan dengan tujuan sebuah kebijakan kepada hasil dalam kegiatan. Ketidakberhasilan implementasi diakibatkan keterbatasan SDM maupun structural dan koordinasi didalamnya. Oleh sebab itu, implementasi kebijakan perlu ditekankan ahli sebagai bagian kebijakan public (Anggara, 2012:530). Definisi implementasi kebijakan sederhananya merupakan perumusan Wahab dikutip dari Anggara (2012:530) yakni proses tata laksana kebijakan berbentuk UU dan sejenisnya. Kemudian, menurut Van Meter dan Van Horn dikutip dari Rusli (2015:91) memberi pendefinisian pengimplementasian sebuah kebijakan yakni: Penindakan dilaksanakan secara perorangan maupun kolektif yang dilakukan pengarahannya terhadap pencapaian tujuan yang sudah ada dalam suatu keputusan dalam kebijakan. Sedangkan pendapat Rusli (2015:90) pengimplementasian sebuah kebijakan merupakan jalan demi ketercapaian tujuan. Berdasarkan pendefinisian ahli-ahli, penulis memberi kesimpulan bahwasannya pengimplementasian kebijakan yaitu tahapan melaksanakan kebijakan yang dilakukan agen pelaksana kepada kebijakan yang dipilih dalam pemerintahan supaya target tercapai. Namun demikian, Dalam pengimplementasian kebijakan terdapat hambatan-hambatan yang memberikan pengaruh atas kebijakan public. Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolog (2013:59), hambatan itu dapat secara mudah dibedakan atas faktor internal dan eksternal, yakni: a) Hambatan internal dari kualitas penginputan yakni SDM, pendanaan, structural organisasi, sarana dan fasilitas, informasi yang diberikan, sistem dan procedural aturan yang ada; dan b) Hambatan eksternal yakni

kekuatan yang membawa pengaruh baik secara langsung atau tidak langsung terhadap proses pengimplementasikan kebijakan daalm kecenderungan aspek-aspek kehidupan.

## **Manajemen Bencana**

Pengelolaan bencana terdapat tahap kegiatan Respons/Daya tanggap, dimana tindakan yang dilakukan segera sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kerusakan harta benda, dan meningkatkan pemulihan awal dari insiden tersebut (Kaddi, Lestari & Adrian, 2020; Situmorang, 2020; Kusumasari, 2016). Pada tahap ini kunci utama dari sebuah respons terhadap bencana alam meliputi kegiatan kesiapsiagaan di daerah rawan, keterlibatan masyarakat lokal, koordinasi penilaian kebutuhan, serta berbagi informasi antara multi pemangku kepentingan dan ahli-ahli logistik (Suharmato, 2020; Situmorang, 2020; Kusumasari, 2016). Fungsi respons dalam manajemen bencana adalah tindakan yang diambil untuk membatasi cedera, hilangnya nyawa, serta kerusakan harta benda dan lingkungan. Tindakan ini dilakukan sebelum, selama, dan segera setelah bencana terjadi. kegiatan respons sendiri dapat dilakukan melalui peringatan, evakuasi, dan penyediaan tempat penampungan. Respons adalah tahapan yang paling kompleks dari tahapan manajemen bencana karena respons dilakukan dalam periode stres yang sangat tinggi, lingkungan yang sangat terbatas, serta waktu dan informasi yang terbatas pula. Respons tidak hanya meliputi kegiatan pembatasan pada hal-hal, seperti cedera, hilangnya nyawa, serta kerusakan harta benda, tempat tinggal, dan lingkungan, tetapi juga mencakup sistem yang dikembangkan untuk mengoordinasikan dan mendukung upaya-upaya tersebut. Respons juga termasuk menghidupkan kembali infrastruktur-infrastruktur penting dengan sangat cepat, misalnya membuka kembali jalur transportasi, pemulihan jaringan komunikasi dan listrik, serta juga memastikan pendistribusian makanan dan air bersih. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memungkinkan pemulihan dilakukan, mengurangi kondisi cedera lebih lanjut dan hilangnya nyawa, serta mempercepat kembalinya masyarakat untuk berfungsi normal.

## Method

Pendekatan dalam penelitian saat ini yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan sebuah prosedur dalam penelitian dengan menghasilkan data deskriptif kata-kata atau lisan pengamatan perilaku. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial (Moleong, 2017; Sugiyono, 2016). Dalam Teknik pengumpulan data dilakukan berbagai cara. metode pengumpulan data ialah bagian dari instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu penelitian. Pada hal ini sangat di perlukan adanya teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dengan cepat secara sesuai dengan masalah yang sedang peneliti selidiki dengan mengacu pada tujuan dari pada penelitan. Oleh karena itu, demi memperoleh informasi yang berkesesuaian terhadap fokus dalam penelitian, akan diperlukan teknik pengumpulan datanya. Adapun teknik dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dari pengamatan, akan mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat re- checking atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya.
- b. Wawancara juga dilakukan untuk dapat mengumpulkan data primer ataupun sekunder melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki kaitan terhadap PSBB Jilid I di Provinsi DKI Jakarta Selatan dalam konteks manajemen bencana dengan target 500 responden (*survey data monkey*).
- c. Studi dokumen ialah pelengkapan penerapan metode pengamatan dan wawancara dalam sebuah metode kualitatif. Hasil dari pengamatan ataupun wawancara akan dilengkapi oleh pendukung dokumen-dokumen dari narasumber.
- d. Data utama yang penulis gunakan di bagi dalam dua jenis, yakni: 1) Data Primer ata ini penulis peroleh melalui wawancara dan observasi di lapangan

Maka dalam penelitian ini, informan berasal dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Rukun Tetangga, dan Rumah Sakit Agung. Data Sekunder: Data sekunder artinya data yang dijadikan menjadi bahan pendukung penulisan serta penelitian ini. Asal berita yang didapatkan tidak secara eksklusif mendapatkan data dan informan yang terkait dengan penelitian. Data ini diperoleh melalui internet, jurnal, buletin dan berita relevan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pada awal tahun 2020 lalu, dunia digemparkan dengan mewabahnya pandemic baru yang berasal dari Wuhan, provinsi Hubei, China yang kemudian menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia. Wabah pandemi ini disebut Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2 (SARS-CoV-2). Penyebaran wabah ini memberikan dampak yang sangat luas baik secara sosial maupun ekonomi disetiap negara. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hingga saat ini terus menunjukkan eskalasi yang sangat luar biasa dan menakutkan, hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah orang yang telah dinyatakan positif terpapar covid-19, peningkatan angka kematian serta penyebaran wabah yang meluas bahkan terjadi juga di lintas wilayah. Di Indonesia, hampir seluruh provinsi yang ada telah dinyatakan sebagai zona merah pandemic Covid-19 khususnya pada wilayah DKI Jakarta. Melihat situasi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan sebagai bentuk respon. Pemerintah untuk menanggulangi wabah Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 di Tahun 2020 mengenai PSBB, Permenkes No. 9 di Tahun 2020 mengenai Pedomen PSBB, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Beberapa kebijakan tersebut dibuat dalam rangka akselerasi penanganan COVID-19. Beserta Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 di Tahun 2020 mengenai pelaksanaan PSBB sebagai upaya penanganan COVID- 19 di Provinsi DKI Jakarta

Saat covid-19 sudah mulai terdeteksi di Negara Indonesia, sangat banyak terdengar wacana tentang lockdown, karantina wilayah, ataupun *social distancing* mulai mengundang berbagai argument, bahkan sebagian pendapat juga menginginkan diberlakukannya darurat sipil. Namun pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui PP No.21 Tahun 2020. Dalam kebijakan PSBB ini masih dimungkinkan adanya pergerakan dalam mobilitas masyarakat, seperti melaksanakan kegiatan sehari-hari, tetapi kegiatan masyarakat tersebut telah dibatasi sesuai dengan penanggulangan bencana Covid-19. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembatasan kegiatan masyarakat yang dimaksud itu meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan ditempat umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pada kebijakan PSBB jilid 1, beberapa layanan yang menyangkut hajat hidup masyarakat masih dapat berjalan seperti pasar, toko, penjualan BBM, komunikasi, layanan medis, keuangan dll. Apabila kita mengkaji dalam konteks Manajemen Bencana, pemerintah pusat terkesan lambat untuk memutuskan kebijakan apa yang akan dikeluarkan untuk menanggulangi kasus pandemic yang sudah menyebar di Negara Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan pemberlakuan PSBB ini patut diapresiasi sebagai suatu proses politik hukum pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

### ***Komunikasi***

Komunikasi dapat meningkatkan koordinasi, informasi serta kebutuhan sosial. Maka, komunikasi dapat mendukung guna mencapai tujuan suatu kebijakan jika komunikasi berjalan secara efektif dan efisien. Komunikasi juga sangat mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik yang terlaksana secara efektif jika pembuat keputusan paham mengenai apa yang akan dijalani, informasi yang diketahui oleh para pembuat keputusan hanya bisa dilakukan jika adanya komunikasi yang baik. Dalam hal ini, komunikasi meliputi transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Berdasarkan hasil eksplorasi penulis, dapat diketahui bahwa indikator komunikasi dalam Implementasi PSBB Jilid 1 belum terencana

dengan baik. Hal ini dikarenakan dengan rencana dan tujuan PSBB Jilid 1 masih kurangnya pelaksanaan pengawasan, beserta sosialisasi kepada masyarakat yang akhirnya tujuan kebijakan PSBB Jilid 1 tidak mencapai targer sasaran. Dikarenakan kurangnya consensus kebijakan tujuan kebijakan publik, kepentingan politik, serta adanya menghindari pertanggung jawaban kebijakan.

Faktor-faktor yang mendorong terhambatnya informasi dalam implementasi kebijakan publik biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya consensus mengenai tujuan kebijakan publik, kepentingan politik, serta adanya kecenderungan menghindari pertanggungjawaban kebijakan. Mencapai PSBB Jilid I yang efektif maka solusi dari kurangnya pemahaman mengenai kebijakan ini adalah melakukan sosialisasi yang intens kepada seluruh masyarakat dan komponen Negara terkait mengenai dasar hukum, sistem satu komando, serta sanksi. Komitmen terhadap regulasi penanganan pandemi Covid-19 dan komirmen pimpinan dari seluruh pihak juga merupakan salah satu yang perlu ditingkatkan guna melengkapi sarana penanganan Covid-19. Tentu tidak akan ada pemerintah yang bisa bekerja dengan sempurna, akan selalu ada kelemahan dan kekurangan, tetapi harus meminimalisir kesalahan dari hal-hal yang sesungguhnya bisa diantisipasi, salah satunya adalah koordinasi komunikasi kebijakan yang harus jelas, argumentative, dan dirasakan niat baik serta niat politiknya untuk membangun pemahaman yang sama.

### ***Sumber Daya***

Poin ini mencakup kualitas SDM, kuantitas SDM, pelatihan, petunjuk teknis, motivasi, anggaran, fasilitas, dan wewenang. Menurut Nur Baity, Ketua Rukun Tetangga 006 Tebet Barat, sumber daya memiliki pengaruh yang harus dipertimbangkan dalam mencapai suatu tujuan serta tujuan tersebut disesuaikan dengan sumber daya dukung yang ada. Kebijakan publik yang optimal idealnya direncanakan dan dapat dipertanggung jawabkan serta mendapat alokasi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Tapi, masalah dalam PSBB Jilid I ini adalah ketika sumber daya manusia tersebut dikurangi. Hubungan masyarakat merupakan kegiatan yang dipicu dari hubungan dan hubungan tersebut mencakup orang-orang. Dengan adanya pengurangan sumber daya, maka kemampuan hubungan amsyarakat untuk melakukan pekerjaannya sangat terbatas. Dalam imlementasi

kebijakan publik, khususnya PSBB Jilid I, sumber daya manusia merupakan faktor yang relatif paling penting meskipun adanya anggaran, fasilitas yang memadai, dan wewenang yang dimiliki untuk mengelola kebijakan tersebut. Tetapi jika sumber daya manusia dari sisi jumlah, motivasi, dan kualitas kurang memadai maka kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Maka, sumber daya perlu diperhatikan dengan baik yang mencakup staf, informasi dalam implementasi kebijakan, wewenang, dan fasilitas. Kurangnya pemahaman mengenai kebijakan PSBB Jilid I menunjukkan bahwa perlu ditingkatkannya profesionalisme sumber daya manusia serta diadakannya pelatihan yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu: 1) Pengetahuan, yaitu pengetahuan apa yang dituntut masa ini dan masa yang akan datang; dan 2) Keahlian, yaitu apa yang dituntut masa ini dan masa yang akan datang dalam kaitan dengan kebijakan publik dengan keahlian fungsional, keahlian memecahkan masalah, dan keahlian dalam berhubungan dengan manusia lain.

### ***Disposisi***

Disposisi merupakan suatu petunjuk atau perintah mengenai tindak lanjut suatu kebijakan publik. Dalam hal ini Penulis melakukan wawancara dengan Staf Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu Ahmad Sodikin. Beliau menyatakan, dalam penerapan kebijakan PSBB Jilid I yang menimbulkan munculnya disposisi adalah sebagai berikut:

- Tidak semua masyarakat dan komponen Negara memahami mengenai dasar hukum PSBB;
- Tidak semua masyarakat dan komponen Negara memahami regulasi PSBB yang nyata nya belum satu komando;
- Tidak semua pemimpin daerah memahami perbedaan antara kebijakan PSBB dan lockdown;
- Belum adanya sanksi yang jelas bagi pelanggar PSBB;
- Belum sepenuhnya komitmen melaksanakan PSBB dengan sepenuh hati sesuai protokol kesehatan; dan
- Belum adanya mekanisme lockdown dan PSBB terkait dampak terhadap ekonomi.

Disposisi dalam implementasi kebijakan PSBB Jilid I bersifat segera, yang mana perintah tersebut harus segera dilakukan dan dikerjakan sesuai petunjuk dan perintah. Dengan adanya disposisi, kita dapat mengetahui tanggapan dari surat masuk yang diterima dan mengetahui bagaimana tindaklanjutannya.

### ***Struktur Birokrasi***

Struktur birokrasi dapat ditingkatkan dengan menetapkan Standar Operation Procedure (SOP). Dalam konteks manajemen bencana, pemerintah tidak tanggap dan terkesan lamban memberikan respon terkait pandemi ini. Hal ini disebabkan oleh lemahnya struktur birokrasi dan disposisi yang tidak adaptif dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan Kesehatan khususnya yang datang dengan gelombang besar seperti pandemi Covid-19, sehingga karena lemahnya birokrasi pemerintah, dalam hal ini masih ada aturan-aturan yang tidak konsisten dan masih bertabrakan dalam menanggulangi pandemic Covid-19 di wilayah DKI Jakarta. Ahmad Sodikin juga menyatakan bahwa tata kerja matriks dalam PSBB perlu ditingkatkan di kalangan birokrasi untuk pengambilan keputusan dan respons serba cepat yang meliputi focus kebijakan, koordinasi horizontal dan vertikal serta kolaborasi. Cara inilah penghantar birokrasi pada kinerja yang responsive menangani perkara darurat. Dalam hal ini, cara kerja matriks telah diatur karena berhubungan dengan pencegahan dampak risiko dengan memberi jaminan perlindungan bagi warganya hingga aspek terkecil. Ada 2 (dua) kebutuhan nasional yang mendesak yang perlu diatasi oleh pemerintah selama PSBB Jilid I sebelum dampak dari pandemi semakin mempersulit peluang penanganan, yaitu:

- Jaminan layanan dasar. Masyarakat membutuhkan jaminan kebutuhan dasar seperti listrik, pangan, layanan kesehatan, dan kesempatan bekerja. Di masa ini, semua kebutuhan public memang berubah drastis, namun dengan adanya kebijakan PSBB telah mengatur soal pelayanan public yang mengurangi resiko, melindungi warga, dan pemulihan guna tanggung jawab dan pengelolaan kondisi darurat.
- Program pemulihan. Pemulihan sendi nasional kehidupan perlu diciptakan serta memproduksi kebijakan dan program pendukung.

Lambatnya struktur birokrasi akan membuat lemahnya jaringan pengamanan sosial ekonomi, padahal tanpa koordinasi dan kolaborasi, semua akan tertatih. Masyarakat akan bingung dengan kebijakan pemerintah yang ada, sedangkan birokrasi kewalahan mengatasi semuanya sendiri. Jika dilihat dari beberapa tinjauan kebijakan PSBB yang dipilih oleh pemerintah pusat dalam menghadapi kasus Covid-19 yang sedang mewabah saat ini, di wilayah DKI Jakarta sendiri masih belum dapat dikatakan bentuk upaya maksimal pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta.

Keberhasilan implementasi kebijakan public tergantung pada sumber daya manusianya, seperti bagaimana struktur organisasi penanggulangan bencana itu dibentuk dan koordinasi dari pihak-pihak yang terkait sudah optimal. Apabila kita melihat realita yang terjadi di Indonesia, lambatnya pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan berimplikasi pada terlambatnya implementasi penanganan COVID-19, dimana lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan pun menjadi tantangan dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Hal ini terjadi karena sistem negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai pemangku kepentingan utama dalam hal kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana non-alam termasuk Kesehatan (Agustino, 2016). Selain bentuk negara kesatuan, dalam system politik di Negara Indoensia, kita juga mengenal konsep otonomi daerah yang mengamanatkan seluruh urusan dapat dijalankan oleh pemerintah daerah kecuali, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Bagi pemerintah daerah, urusan Kesehatan adalah urusan yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah, meskipun secara konseptual urusan Kesehatan merupakan urusan yang bersifat concurrent yang dapat diurus Bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Akan tetapi, ketika Sebagian pemerintah daerah melakukan Langkah proaktif dalam menyampaikan informasi dan penyuluhan mengenai pandemic COVID-19, pemerintah pusat mengkritik Langkahlangkah proaktif pemerintah daerah yang telah dilakukan tersebut.

Selanjutnya yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan PSBB Jilid 1 di wilayah DKI Jakarta yaitu ketidak acuhan warga DKI Jakarta atas himbuan pemerintah. Hambatan ini muncul dikarenakan masyarakat Indonesia

yang tidak Homogen, masyarakat kita adalah Heteronom (tidak sama) oleh karena itu kita tidak dapat menyamakan pemikiran semua masyarakat. Hal ini merupakan satu masalah lain yang menjadi indikator DKI Jakarta saat itu kurang optimal dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Masalah ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang berada di tempat umum yang telah dihimbau larangan pemerintah. Setelah dari awal pemerintahan sudah melakukan pengarahannya terhadap pemberlakuan social distancing dikarenakan distribusi virus covid 19 dapat melalui ludah. Apabila setiap orang tidak menjaga jarak, dan diketahui bahwa lawan bicara memiliki infeksi yang memiliki potensi dalam memberikan penularan terhadap orang lain serta melakukan distribusi terhadap pihak lain, begitupun seterusnya. Namun arahan dari pihak pemerintah hanyalah formalitas yang hampir sebagian masyarakat tetap memilih berkerumun seakan tidak memiliki kekhawatiran terhadap penyebaran virus dan cenderung mementingkan kegiatan masing-masing. Arahan dari pihak pemerintah mengenai penggunaan masker sudah sering dilanggar begitu pula terhadap ajakan aja kan lain seperti pencucian tangan. Hal tersebut dikarenakan pandangan realita dimana terdapat tiga alasan yaitu:

- Ketidaktahuan warga akan bahaya yang sangat mematikan dari COVID-19, kekurangtahuan tersebut ditimbulkan akibat adanya kelemahan sosialisasi dari pihak pemerintah daerah sehingga belum maksimal dalam memberikan sosialisasi mengenai hidup sehat dan bersih seperti penggunaan masker, pencucian tangan, serta penerapan social distancing disetiap aktivitas masyarakat. Mungkin Sebagian besar masyarakat tahu tentang akibat dari virus COVID-19, namun mereka memperoleh informasi terkait hal tersebut bukan berasal atas sosialisasi dari pihak pemerintah namun upaya secara mandiri dari diri sendiri. dampak ketidaktahuan ini menjadikan warga tidak menghiraukan arahan dari pemerintah dikarenakan kurang memahami lebih dalam terhadap dampak dari virus COVID-19.
- Adanya keperluan dalam pemenuhan kebutuhan keseharian masyarakat Hal ini membawa akibat arahan pemerintah untuk *social distancing* dihiraukan oleh warga DKI Jakarta. Hal ni dapat dilihat pada saat diterapkan PSBB jilid I di Jakarta, diawal implementasi PSBB jilid 1 di daerah DKI Jakarta menunjukkan

penurunan kasus migrasi secara signifikan, namun setelah beberapa saat situasi relatif memiliki persamaan dengan masa sebelum PSBB. Hal ini dikarenakan keperluan masyarakat dalam melakukan pemenuhan keperluan ekonomi keseharian, PSBB hanyalah memfokuskan pada migrasi untuk warga dikalangan menengah ke atas, disamping masyarakat dengan kondisi sosioekonomi dibawah harus tetap berjuang untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari apabila mereka dipaksa untuk berdiam diri dirumah saja, solusinya adalah negara harus menanggung seluruh kebutuhan ekonomi masyarakat dikalangan kelas ekonomi menengah kebawah tersebut, namun hal itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah melihat begitu besar jumlah pengeluaran dana apabila hal itu dilakukan, sedangkan masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain juga yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

- Dalam pengimplementasian PSBB di wilayah DKI Jakarta belum adanya sanksi yang tegas untuk mengatur masyarakat yang melanggar. Melihat sanksi yang diterapkan oleh gubernur DKI Jakarta yaitu masuk ke peti mati penyediaan dalam wadah yang sudah ditentukan, menurut penulis sanksi tersebut sangat kurang efektif untuk dilakukan karena tentunya masyarakat akan lebih tidak menghiraukan arahan pemerintah, disamping itu juga pembelian peti mati jenazah sangat membuang dana untuk penanggulangan COVID-19

Hasil diskusi lainnya yang bisa menjadikan bahan penelitian selanjutnya pertama, pemerintah seharusnya selain menerapkan kebijakan PSBB Jilid 1 ini dibarengi dengan dilakukannya tes swab antigen/PCR secara massif di masyarakat, agar pemerintah mengetahui juga data pasti orang-orang yang telah terinfeksi, jika kebijakan PSBB jilid 1 ini tidak dibarengi dengan dilakukannya tes swab antigen/PCR secara massif maka sudah pasti kurva pendistribusian virus COVID-19 di area Jakarta akan selalu meningkat, dan dalam hal aturan sebaiknya pemerintah di daerah dan pusat berkoordinasi untuk pembuatan suatu tata aturan karena akibat dari ketidaksiapan pemerintah menghadapi pandemic COVID-19 ini timbul banyak peraturan yang tidak konsisten dan masih bertabrakan. Kedua, Satgas penanggulangan COVID-19 di masing-masing wilayah seharusnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap PSBB yang diterapkan di masyarakat, karena seperti yang kita ketahui pemerintah tidak bisa menghetikan mobilitas masyarakat

khususnya untuk masyarakat yang berada di kalangan ekonomi menengah kebawah, mereka masih harus memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, selain melakukan pengawasan yang ketat pemerintah juga dapat menugaskan satgas penanggulangan COVID-19 untuk melakukan sosialisasi terkait bahayanya virus COVID-19, untuk mengurangi mobilitas tersebut satgas dapat melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah untuk mengurangi kerumunan yang terjadi di masyarakat.

## Kesimpulan

Didasarkan atas penjabaran, pembahasan, serta Analisa diatas terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

- Pemberlakuan aturan PSBB di wilayah DKI Jakarta belum bisa dikatakan upaya optimal pemerintah dalam menanggulangi pandemic Covid-19. Dalam konteks manajemen bencana, pemerintah tidak tanggap dan terkesan lamban memberikan respon terkait pandemic ini. Hal tersebut diakibatkan adanya kelemahan struktural dalam birokrasi dan disposisi yang kurang beradaptasi terhadap permasalahan terkait aspek kesehatan khususnya yang datang dengan gelombang besar seperti pandemic COVID-19, sehingga karena lemahnya birokrasi pemerintah, dalam hal ini masih ada aturan- aturan yang tidak konsisten dan masih bertabrakan dalam menanggulangi pandemic COVID-19 di wilayah DKI Jakarta.
- Masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi di dalam implementasi kebijakan PSBB di wilayah DKI Jakarta, hambatan terbesarnya adalah ketidakpedulian warga DKI Jakarta terhadap arahan pemerintah menyebabkan kurang pengoptimalan dalam penanggulangan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Ketidakmauan masyarakat untuk menerapkan protocol Kesehatan seperti memakai masker, tidak mencuci tangan serta menerapkan *social distancing* menjadi penghambat penanganan COVID-19.

## Daftar Pustaka

- Ashidiqie, M. L. I. I. (2020). Peran Keluarga Dalam Mencegah Coronavirus Disease 2019. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(10), 911-922.
- Bevaola Kusumasari, (2016), *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Fadmawaty A., & Wasludin, W. (2021), The Effect of The Belief System, Family Organizations and Family Communication on Covid-19 Prevention Behavior: The Perspective of Family Resilience. *International Journal fo Disaster Management*, Vol.4 No.2 pp.9-22
- Ganong, L. H., & Coleman, M. (2002). Introduction to the special section: Family resilience in multiple contexts. *Journal of Marriage and the Family*, 346-348.
- Green, L. W., Ottoson, J. M., Garcia, C., & Hiatt, R. A. (2009). Diffusion theory and knowledge dissemination, utilization, and integration in public health. *Annual review of public health*, 30, 151-174.
- Kaddi, S. M., Lestari, P., & Adrian, D. (2020). Komunikasi keluarga dalam pencegahan coronavirus disease 2019. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 63-74.
- Kelman, I. (2015), Climate change and the Sendai framework for disaster risk reduction, *Internasional Journal of Disaster Risk Science*. 6 (2), <http://dx.doi.org/10.1007/s13753-015-0046-5>
- Kuswanti, A., Munadhil, M. A., Zainal, A. G., & Oktarina, S. (2020). Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi COVID-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7, 707-22.

- Lestari, P. & Paripurno, E. T. (2020). Strategic Family Communication On The COVID-19 Pandemy Through Heart-To-Heart Communication. LPPM UPN"Veteran" Yogyakarta Conferences Series *Proceeding on Political and Social Science (PSS)*. Volume 1 Number 1 (2020): 263-272.
- Moleong, L.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Pasolong, H. (2013), *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Prime, H., Wade, M., & Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. *American Psychologist*, 75(5), 631-643.
- Rautela, P. (2015), Lack of scientific recordkeeping of disaster incidences: A big hurdle in disaster risk reduction in India, *International Journal of Disaster Risk Reduction*. 15 DOI:10.1016/j.ijdr.2015.12.005 pp.73-79
- Rusili, B., (2015), *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*, Cimahi: Hakim Publishing.
- Situmorang, C.H. (2014), *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatifkualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharmanto. (2020). Perilaku Masyarakat dalam Pencegahan Penularan COVID-19. JK Unila, Volime 4 Nomor 1, Oktober 2020, halaman 91-96
- Setyawati, D., & Ningrum, M. Y. (2021). Community Knowledge and Compliance in Doing Prevention of COVID-19. *South East Asia Nursing Research*, 3(1), 16-22.

Syadidurahman, F., Muntahaya, F., Islamiyah SZ., Fitriani, TA., Nisa, H. (2020). Perilaku Physical Distancing mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada masa pandemic COVID-19. Perilaku dan promosi kesehatan: *Indonesia Journal of Health Promotion an Behaviour* 2(1): 29-37.

### **Internet:**

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/18/13085251/kasus-positif-covid-19-di-jakarta-tembus-30000-ini-sebarannya-di-jakarta>, diakses pada 27 September 2020.

<https://news.okezone.com/read/2011/03/18/58/436189/tata-kelola-bencana>, diakses pada 28 September 2020.

<https://kompas.id/baca/riset/2020/09/04/wilayah-padat-ibu-kota-jadi-pusatpertarungan-hadapi-covid-19/>, diakses pada 28 September 2020.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/18/07233831/empat-wilayah-jakartamasuk-zona-merah-depok-kini-zona-oranye?page=all>, diakses pada 29 September 2020.

<https://covid19.go.id/p/berita/lengkapi-informasi-dan-pengetahuan-covid-19-darisumber-resmi>, diakses pada 09 Oktober 2020

# PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2020 (STUDI KASUS DI KOTA BEKASI)

Yuswarni Yuswarni<sup>1</sup>; Dhea Apelya<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Nasional<sup>1,2</sup>

e-mail author1; e-mail author2; e-mail author3 etc. (Cambria fonts 10)

---

## Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program pembinaan anak terlantar pada dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif karena metode kualitatif di gunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan masih kurangnya pengawasan sehingga banyaknya kendala dalam pemilihan sasaran program pembinaan terhadap anak terlantar. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya anak yang melakukan aktivitas di jalanan. Hal ini beralasan bahwa anak-anak terlantar tersebut mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal. Selain itu masalah keterlantaran semakin nampak dalam situasi terbatasnya/minimnya ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat.

Keywords: Pembinaan Anak Terlantar, Kesejahteraan Sosial, Ekonomi Keluarga.

## Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 tentang kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: Rehabilitas sosial, jasmani sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pada pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 menjelaskan bahwa mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Pada ayat 1 menjelaskan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam. Penanggung jawab dalam pengasuhan anak merupakan kedudukan selaku kedua orang tuanya sendiri. Tetapi dalam kedudukan orang tuanya sendiri jadi sesuatu permasalahan yang jadi anaknya sampai terlantar. Dalam bentuk-bentuk penelantaran anak sebetulnya sangat banyak serta bermacam-macam alibi dalam wujud perekonomian serta sosialnya.

Jumlah kasus anak terlantar di Kementrian Sosial (Kemensos) menyebutkan bahwa jumlah mencapai 4,1 juta anak, dan jumlah itu bertambah. Dalam kondisi itu mencerminkan amanat konstitusi agar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara belum sepenuhnya terwujud. Bahkan Kemensos juga menyebutkan sedikitnya 35.000 anak mengalami eksploitasi. Keberadaan anak-anak terlantar tersebut antara lain minimnya rumah singgah atau Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan belum semua provinsi memiliki RSPA tersebut. Dari juta anak terlantar tersebut mencerminkan kondisi ketimpangan sosial di Tanah Air. Dalam resiko dapat tercatat masih relative tinggi yakni mencapai 0,394%, resiko ini memaknakan bahwa pemerataan kesejahteraan menjadi personal yang mengkhawatirkan.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Anak Terlantar di Kota Bekasi Tahun 2016 – 2020**

No	Tahun	Jumlah
1	2016	681
2	2017	374
3	2018	459
4	2019	252
5	2020	380

*(sumber: Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2020)*

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bekasi Jawa Barat menjelaskan bahwa jumlah anak terlantar di Kota Bekasi pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan hamper menjapai 307 orang dan pada tahun 2018 posisi angka nya jauh meningkat mencapai 459 orang, namun dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang memiliki jumlah penurunan 252 orang sampai dengan naiknya angka mencapai 380 orang pertahun. Dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi (BPSP) Jawa Barat bahwa jumlah anak terlantar di Kota Bekasi pada tahun 2016 sekitar 681 orang anak terlantar. Sehingga banyaknya anak terlantar disebabkan dari orang tua karena faktor kemiskinan dalam perekonomiannya tanpa kurangnya tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang menjadi begitu banyak terjadi di daerah Bekasi.

Contoh kasus yang terjadi di Kota Bekasi Jawa Barat pada tahun 2017 dalam kasus penelantaran anak dan kekerasan kepada sepasang suami istri yang bernama Utomo Permono (45) dan Nurindria sari (42). Dari tinggal dan menginap di pos satpam perumahan, DA (8) tidak di izinkan oleh kedua orang tuanya untuk pergi kesekolah, begitu pula kakak kembarnya LS (10) dan CK (10) tidak diperkenankan pergi kesekolah sebulan belakangan ini. Saat DA tidur di pos satpam, kedua orang tua nya melarang mereka berangkat kesekolah dan orang tuanya mengatakan bahwa anak-anaknya tidak perlu lagi mengecap Pendidikan di

sekolah. Dan sejak empat hari tinggal di Citra Grand Cibubur Kota Bekasi . Setelah kejadian itu ternyata ada kasus lagi yang menimpa mereka seperti rumah yang sering mendengar teriakan DA yang kesakitan dan warga melihat punggung DA tampak luka lebam. Meski begitu warga sekitar melaporkan kekerasan ini pada pihak berwajib maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau Komisi Nasional Perlindungan Anak. Berdasarkan contoh kasus tersebut dalam penelantaran anak yang terjadi di Bekasi sebagaimana telah dijelaskan, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penelantaran anak dan kekerasan yaitu kurangnya interaksi antara orang tua dengan anak.

## **Kajian Pustaka**

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana program tersebut dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program. (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983 dalam Satries, 2011). Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) dalam Satries (2011) bahwa evaluasi efektivitas program dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti. Kata program berasal dari Bahasa Inggris “programe” yang artinya acara atau rencana. Secara konseptual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program diartikan sebagai rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu. Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan definisi oleh beberapa ahli. Siagian (2006:17) mengatakan perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungan dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan. Jones (2002) pengertian program adalah cara yang disahkan

untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang terdapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu: a) Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program; 2) Program biasanya memiliki anggaran sendiri, program biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran; 3) Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa didalam setiap program dijelaskan mengenai: 1) Tujuan kegiatan yang akan dicapai; 2) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan; 3) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui; 4) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan; dan 5) Strategi pelaksanaan. Menurut Budiani (2007:53) mengatakan bahwa untuk mengukur mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel sebagai berikut: 1) Ketepatan sasara program: sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya; 2) Sosialisasi Program: kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya; 3) Tujuan program: sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya; dan 4) Pemantauan program: kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Kata pembinaan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri yaitu “usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan manfaat yang positif” (KBBI, 1990:134).

Pada dasarnya pembinaan juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Miftah (1989:7) bahwa “pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, ataupun pernyataan yang lebih baik”. Secara lebih luas, pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan dapat diartikan sebagai pengelola kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Pengelola

kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap saat yang dilakukan. Menurut Suparlan (1990:109) mengatakan bahwa, “pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil semaksimal mungkin. Disisi lain, pembinaan dapat diartikan bukan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan melainkan adanya unsur organisasi yang saling terkait dan terkoordinasi sehingga tujuan yang diinginkan dapat terwujud dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2004:209) yaitu: “pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksanakan secara berdaya guna berhasil guna. Unsur-unsur organisasi itu mencakup peraturan, kebijakan, tenaga penyelenggaraan, staf dan pelaksana, bahan dan alat (material), biaya dan perangkat lainnya. Pembinaan adalah suatu usaha, proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang dilakukan secara keseluruhan melalui unsur organisasi seperti peraturan atau kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan pelaksana, bahan dan alat (material), biaya dan perangkat lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, hasil yang baik serta maksimal. Suud (2006) kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok: 1) Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan; 2) Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan; 3) Kesejahteraan sosial sebagai ilmu. Sedangkan Suharto (2006:3), Kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian layanan sosial dan tunjangan sosial.

## **Method**

Metode yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif disebut juga penelitian inkuiri naturalistic atau alamiah karena situasi lapangan penelitian yang bersifat natural (wajar), apa adanya, tidak

dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes. Penelitian dapat menyimpulkan bahwa metode adalah suatu cara yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan sekaligus sebagai teori untuk memecahkan masalah, sehingga suatu penelitian dapat dipecahkan secara masal. Sumber data ialah subjek dalam penelitian untuk melakukan pengumpulan data melalui data primer dan sekunder. Data primer melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, baik informan maupun responden. Data Skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang atau lewat dokumen, yaitu mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku. hasil penelitian yang berwujud laporan yang sebagainya. Dalam hal ini menjadi data skunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dokumen-dokumen yang berisi informasi penting. Penelitian ini menentukan informan yang menggunakan purposive (secara sengaja), yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Terkait dalam informan yang jelas untuk penelitian ini diambil target sampel sebanyak 100 orang.

## **Results and Discussion**

Lorem ipsum magnificent, Lorem ipsum magnificent, Lorem ipsum magnificent,  
Lorem ipsum magnificent, Lorem ipsum magnificent, Lorem ipsum magnificent,  
Lorem ipsum magnificent, Lorem ipsum magnificent, Lorem ipsum magnificent,

## **Conclusion**

Lorem ipsum magnificent, Lorem ipsum magnificent, Lorem ipsum magnificent,  
Lorem ipsum magnificent, Lorem ipsum magnificent, Lorem ipsum magnificent,  
Lorem ipsum magnificent, Lorem ipsum magnificent, Lorem ipsum magnificent,

## Reference

- Hisakata, R., Nishida, S., & Johnston, A. (2016). An adaptable metric shapes perceptual space. *Current Biology*, 26(14), 1911–1915. doi: 10.1016/j.cub.2016.05.047
- Hogue, C. W. V. (2001). Structure databases. In A. D. Baxevanis & B. F. F. Ouellette (Eds.), *Bioinformatics* (2nd ed., pp. 83–109). New York, NY: Wiley-Interscience.
- Musk, E. (2006, August 2). The secret Tesla Motors master plan (just between you and me). Retrieved September 29, 2016, from Tesla Blog website: <https://www.tesla.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me>
- Sambrook, J., & Russell, D. W. (2001). *Molecular cloning: a laboratory manual* (3rd ed.). Cold Spring Harbor, NY: CSHL Press.

# PENGARUH PARTISIPASI PENUMPANG PESAWAT UDARA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI ELECTRONIC HEALTH ALERT CARD (E-HAC)

Erna Ermawati Chotim<sup>1</sup>, Vira Rahma Armelia<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik,  
Universitas Nasional<sup>1,2</sup>,

e-mail: ernachotim@yahoo.com<sup>1</sup>; vrahma17@gmail.com<sup>2</sup>;

---

## Abstrak

Penelitian ini terkait partisipasi penumpang pesawat yang memiliki ketentuan menjadi pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card atau e-HAC pada masa pandemi Covid-19 untuk menekan jumlah penyebaran sebagaimana Surat Edaran Nomor SR.03.04/II/5825/2020. Tujuan pada penelitian ini guna mengetahui seberapa besar partisipasi penumpang pesawat udara terhadap efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma Tahun 2021. Aplikasi e-HAC berfungsi sebagai sistem peringatan dini dengan pendeteksian secara cepat melalui Card yang dibuat oleh pengguna nya dengan pengisian identitas serta terkait suatu gejala yang dirasakan. Partisipasi penumpang pesawat selaku masyarakat juga sebagai penumpang pesawat sangat dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas aplikasi e-HAC. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang memuat data-data berupa angka dan penggunaan teknik Accidental Sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh partisipasi sebesar 62,8 % terhadap efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC dan selebih nya sebesar 37,2 % pengaruh dari variabel lain yang tidak dapat diketahui.

Kata Kunci: Partisipasi, Efektivitas, Pelayanan, Aplikasi e-HAC.

## Pendahuluan

Setiap hari individu memiliki kegiatan dalam urusan memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam hal layanan. Layanan ini merupakan sebuah aktivitas untuk memproses suatu kebutuhan tertentu, tak terkecuali termasuk pelayanan sektor publik. Pelayanan publik adalah sebuah aktivitas pemenuhan kebutuhan layanan yang ditujukan pada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa negara berkewajiban melayani atas hak dan kewajiban warga negara. Regulasi tersebut sebagai upaya mengayomi terhadap penyediaan layanan publik yang mengacu pada peraturan yang berlaku dan dapat memberikan payung (perlindungan) hukum untuk setiap warga negara. Pelayanan publik juga merupakan langkah strategis demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang berasaskan kepastian hukum, partisipatif, akuntabel, transparansi, efektif dan efisien. Hal tersebut merujuk pada prinsip-prinsip *Good governance* ketika memberikan pelayanan publik secara prima yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah.

*Good governance* diwujudkan pada penerapan pelayanan publik yang berkualitas, efektif juga efisien, salah satunya pengelolaan sistem informasi secara menyeluruh dengan skala nasional. Penyedia informasi yang wajib dilakukan oleh penyelenggara untuk masyarakat secara terbuka dan mudah diakses (Rozikin, Hesty & Sulikah, 2020; Mulyadi, 2016; Irawan 2013; Mery, 2016; Nugraha, 2018). Akses yang dimaksud adalah jalan yang digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah proses dalam mendapatkan informasi dalam pelayanan publik. Sedangkan Pemerintah mengelola sistem informasi berbasis elektronik dalam memberikan dukungan informasi layanan publik yang dapat menunjang kebutuhan untuk dapat dijangkau dalam skala nasional. Hal ini menyangkut dengan inovasi dalam pelayanan publik untuk memberikan informasi, mempermudah proses komunikasi dengan teknologi atau biasa disebut *Information Communication and Technology (ICT)*. Inovasi ICT dituntut dengan perkembangan yang terjadi saat ini berpacu pada kemajuan teknologi atau digital yang dituntut untuk serba cepat, berdampak pada kehidupan sehari-hari yang membutuhkan teknologi sebagai solusi demi mewujudkan proses/kehidupan yang efektif serta efisien (Oktora &

Muhtasib, 2019; Abeliensky & Hilbert, 2017; Nath & Liu, 2017). Oleh sebab itu inovasi ICT diperlukan dalam penerapan layanan publik, mengingat pemberian informasi sebagai kebutuhan untuk kemudahan akses dan jangkauan juga secara tidak langsung meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien.

Dalam penerapan pelayanan publik berbasis pada aplikasi ini terdapat kelebihan dan kekurangannya tersendiri, kartu kewaspadaan kesehatan ini sebelumnya digunakan secara manual menggunakan kartu berupa kertas dalam pengisian *form* (Wibowo, 2014; Irawan 2013; Dwiningrum; 2011). Beralih menjadi versi elektroknik atau digital menjadi e-HAC, tentu hal ini membuat sebagian orang kurang mengerti jika sosialisasi pada penggunaan e-HAC kurang atau tidak diterapkan dengan baik. Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai penumpang pesawat udara yang melakukan perjalanan pada masa pandemi, pada awal diterapkan penggunaan aplikasi e-HAC (Agustus 2020) terjadi penumpukan antrian Check In pada aplikasi e-HAC di Bandar udara yang menjadi tujuan peneliti. Penyebab penumpukan tersebut karena sebagian calon penumpang belum mengerti penggunaan e-HAC, bahkan ada yang belum mengetahui bahwa penggunaan aplikasi tersebut sebagai salah satu ketentuan perjalanan yang berlaku pada masa pandemi sekarang ini. Hal tersebut menunjukkan ketidaktahuan masyarakat akan adanya aplikasi e-HAC serta peraturan baru yang diterapkan dalam melakukan perjalanan pada masa pandemi dan sosialisasi adanya aplikasi e-HAC sebagai syarat melakukan perjalanan terutama di Bandara terhadap penggunaannya dapat dinilai kurang efektif. Sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara yaitu dengan memasang spanduk langkah-langkah pengguna e-HAC di setiap Bandar Udara keberangkatan ataupun tujuan dan melakukan pemberitahuan pada saat harus Check In HAC. Selain itu aplikasi e-HAC ini harus terkoneksi pada internet, hal ini membuat pengguna harus memiliki koneksi internet yang stabil agar dapat menunjukkan QR Code pada HAC yang telah dibuat pada saat check in. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak bandara harus dapat menunjang penggunaan aplikasi e-HAC termasuk jaringan internet/ WiFi. Serta alat scan QRcode yang digunakan oleh petugas Bandara harus menunjang pada saat check in HAC untuk menghindari penumpukan penumpang saat mengantri *check in*.

Disamping itu dalam penggunaan layanan e-HAC ini diperlukan partisipasi masyarakat dalam hal kejujuran dan kesadaran untuk terus mendukung upaya yang dilakukan pemerintah agar upaya ini dapat berjalan efektif, efisien terutama tidak terjadi manipulasi data. Hal ini menyangkut kemungkinan terjadinya manipulasi data yang cukup besar, terkait pada form ketiga pengisian pada Health Alert Card mengenai ada atau tidak nya gejala atau gangguan kesehatan yang dialami oleh calon penumpang. Partisipasi dan kesadaran masyarakat sebagai calon pelaku perjalanan yang dapat mendukung sistem ini berjalan dengan efektif. Kemungkinan lain nya yang menjadi faktor permasalahan yaitu melihat bahwa penggunaan e-HAC sekedar formalitas semata, jika tidak diikuti partisipasi dengan kesadaran serta kepercayaan pada tiap penumpang yang melakukan perjalanan. Hal-hal tersebut akan menjadi faktor penggunaan aplikasi e-HAC sebagai *early warning system* (Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021) terhadap peningkatan Covid-19 tidak berjalan efektif dikarenakan kemungkinan terjadinya manipulasi data sangat tinggi. Mengingat cara bekerja sistem pada aplikasi ini yakni memantau secara cepat dengan pendataan yang telah diisi oleh calon penumpang pesawat udara. eHAC akan menggunakan lokasi pengguna untuk secara berkala mengizinkan pengguna mengaktifkan layanan lokasi di perangkat masing-masing untuk terus diketahui perkembangan mengenai kemungkinan gangguan kesehatan yang dibawa oleh calon penumpang. Bersumber dari perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan pada penelitian ini guna mengetahui seberapa besar pengaruh partisipasi penumpang pesawat udara terhadap efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC (Electronic Health Alert Card) di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma tahun 2021.

## **Kajian Pustaka**

Unsur pokok pencapaian tujuan yang ditetapkan untuk suatu kegiatan atau kebijakan pada organisasi yaitu efektivitas. Dapat dikatakan efektif apabila suatu pencapaian tujuan sesuai dengan sasaran (Apriyanti, 2018; Gunawan, 2020). Para ahli banyak berpendapat mengenai definisi efektivitas, dimana tiap definisi memiliki perbedaan makna tergantung kepada sudut pandang. Mengacu pendapat

Mahmudi (2010:6): menekankan pentingnya efektivitas organisasi pada pencapaian tujuan dan efektivitas merupakan kunci pada kesuksesan suatu organisasi. Pada konsep nya, efektivitas sangat beragam dimana pembahasannya dapat disesuaikan diberbagai kriteria dalam proses evaluasi (Monoarfa, 2012; Intan & Massadun, 2013). Kriteria atau ukuran suatu efektivitas dapat dinilai pada produktivitas organisasi atau output, fleksibilitas organisasi serta bentuk keberhasilannya dalam beradaptasi dengan perubahan sebab faktor eksternal maupun internal organisasi. Terdapat simpulan bahwa efektivitas merupakan acuan keberhasilan proses dalam pencapai tujuan yang sesuai. Oleh karena itu, efektivitas menentukan hasil dari proses pencapaian tujuan sesuai rencana yang diharapkan, maka hasil tersebut dapat dinilai efektif (Syadzy, 2017; Mulyadi, 2016).

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan dalam konteks perkantoran, (Syadzy, 2017; Apriyanti, 2018) yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini ditujukan agar para pegawai dalam pelaksanaan tugas terarah dan mencapai sasaran yang menjadi tujuan organisasi dapat terwujud.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Langkah-langkah dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran yang ditentukan agar sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap. Hal ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya yakni memutuskan apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat yaitu suatu rencana yang perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat. Jika tidak, para pelaksana tidak akan memiliki arahan untuk bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarasannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Budiani, 2007). Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Begitupula pada program Kementerian Kesehatan dalam meluncurkan e-HAC. Kartu kewaspadaan kesehatan berbasis elektronik atau e-HAC (Electronic Health Alert Card) merupakan aplikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyediakan layanan pelaporan perjalanan bagi warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) di Indonesia. e-HAC merupakan kartu modern berteknologi dibandingkan kartu manual yang digunakan pada sebelumnya. Perkembangan sistem e-HAC dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini Direktorat Pengawasan dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, untuk merespon era globalisasi saat ini yakni mewujudkan e-Government melalui penerapan aplikasi e-HAC.

## **Metode**

Metode kuantitatif merupakan penelitian tersusun sistematis yang memakai langkah tertentu yang bersifat empiris dan terstruktur, logis dengan jelas dari awal penelitiannya (Sugiyono, 2014, Tokunaga, 2016). Pada penelitian kuantitatif dikenal sebagai penelitian dengan cara sederhana atau tradisional, sebab penelitian ini telah lama dipergunakan dalam penelitian. Penelitian eksplanatif memiliki tujuan untuk mendapat informasi data, keterangan tentang hal yang belum diketahui dan mencari gambaran terkait hubungan sebab akibat. Data primer

merupakan perolehan informasi ataupun data secara langsung oleh peneliti, yakni penggunaan observasi dan kuesioner atau angket yang disebarakan kepada 100 responden. Sedangkan data sekunder merupakan perolehan informasi ataupun data secara tidak langsung oleh peneliti, yakni melalui orang lain ataupun dengan menggunakan telaah dokumen (Sugiyono, 2014; Tokunaga, 2016). Pada pengujian ini untuk membuktikan kuat atau lemah korelasi pada variabel independen dan variabel dependen menggunakan koefisien korelasi product moment. Dengan melihat adanya hubungan pada variabel X dan variabel Y dengan penggunaan rumus product moment (pearson) yakni:

$$r_{xy} = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{\sqrt{(n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2)(n \sum_{i=1}^n y_i^2 - (\sum_{i=1}^n y_i)^2)}}$$

Dalam pengujian ini dibutuhkan untuk syarat dalam regresi linier atau analisis korelasi dan pedoman pada uji diketahui bahwa :

- a) Nilai signifikansi > 0,05 yaitu adanya hubungan linear yang signifikan pada variabel X dan variabel Y
- b) Nilai signifikansi < 0,05 yaitu tidak adanya hubungan linear yang signifikan pada variabel X dan variabel Y

## Hasil dan Pembahasan

Pengujian ini dilaksanakan pada variabel partisipasi penumpang pesawat sebagai variabel X dan efektivitas aplikasi e-HAC sebagai variabel Y, sebanyak 100 responden. Tahap pengujian ini suatu penentuan valid atau tidaknya suatu instrument yang dilakukan untuk melanjutkan pada tahap pengujian berikutnya. Uji validitas dengan  $r_{xy} > r_{table}$  daripada  $r_{xy} < r_{table}$  dapat dikatakan bahwa butir pernyataan valid, sedangkan  $r_{xy} < r_{table}$  daripada  $r_{table}$  maka dinyatakan bahwa butir pernyataan tidak valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16 butir pernyataan pada variabel Partispasi (X) yang terdapat 15 butir pernyataan bahwa  $r_{xy} > r_{table}$  (0,39) yang dapat dikatakan bahwa pernyataan tersebut valid. Terlihat 1 butir pernyataan bahwa  $r_{xy} < r_{table}$  (0,39) menunjukkan

pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid. Sedangkan hasil perhitungan hasil dari penghitungan menunjukkan nilai reliabilitas variabel Partisipasi penumpang pesawat sebesar 0,918 dan variabel Efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC sebesar 0,904. Maka dari masing-masing variabel tersebut dinyatakan reliabel, sebab besaran nilainya menunjukkan lebih besar dari 0,600. Selanjutnya pada tabel 1 di bawah ini, diketahui nilai maksimum dari partisipasi (X) sebesar 75 dan nilai minimum sebesar 18 dan mean dari hasil penelitian variabel Partisipasi penumpang pesawat (X) yakni sebesar 61.19.

Tabel 1: Hasil Variabel (X) Partisipasi

Descriptive Statistics									
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
partisipasi	120	57	18	75	7343	61.19	.891	9.758	95.215
Valid N (listwise)	120								

Sumber : Output SPSS Ver.25 data peneliti, 2021

Setelah perhitungan pada variabel X yakni partisipasi, berikutnya penghitungan pada variabel Y yaitu Efektivitas menggunakan perhitungan SPSS ver. 25 dengan output data seperti dibawah ini:

Descriptive Statistics									
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
efektivitas	120	36	14	50	4724	39.37	.552	6.046	36.554
Valid N (listwise)	120								

Sumber : SPSS Ver.25 Output data peneliti, 2021

Tabel 2: Hasil Variabel (Y) Efektivitas

Sebagaimana Tabel 2 di atas, diketahui nilai maksimum dari efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC (Y) sebesar 50 dan nilai minimum sebesar 14 dan mean dari hasil penelitian variabel efektivitas yakni sebesar 39.37. Pada metode analisis data pengujian normalitas berperan dalam melihat kenormalan data atau tidak

pada data yang diuji sekaligus membuktikan bahwa variabel yang sedang dikaji adalah variabel berdistribusi normal. Penggunaan uji Kolmogrov Smirnov pada uji normalitas ini memiliki ketentuan apabila nilai sig. lebih besar 0,05 dinyatakan bahwa persebaran data variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika dibawah dari 0,05 diartikan bahwa persebaran data tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk Dalam uji linearitas guna mengetahui adanya data antar variabel partisipasi penumpang pesawat (X) terhadap variabel efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC (Y) adanya suatu hubungan linear ataupun tidak secara signifikan dilakukan untuk syarat dalam penghitungan regresi linear atau analisis korelasi berikutnya dengan melakukan penggunaan F test dengan ketentuan sebagai berikut: a) Nilai signifikansi lebih besar 0,05 membuktikan bahwa terdapat hubungan; linear yang signifikan pada variabel X dengan variabel Y; b) Nilai signifikansi lebih kecil 0,05 membuktikan bahwa tidak adanya hubungan linear yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Sehingga hasil penelitian menunjukkan Perolehan pada tabel 3 nilai sig. yang tertera pada kolom Deviation from Linearity yaitu  $0,003 > 0,05$ . Hal ini diartikan bahwa adanya suatu hubungan linear pada variabel partisipasi (X) dengan variabel efektivitas (Y) berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Linearitas

**Hasil Uji Linearitas**

			<b>ANOVA Table</b>				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
efektivitas * partisipasi	Between Groups	(Combined)	3453.647	33	104.656	10.043	.000
		Linearity	2731.832	1	2731.832	262.143	.000
		Deviation from Linearity	721.815	32	22.557	2.165	<b>.003</b>
	Within Groups		896.219	86	10.421		
Total		4349.867	119				

Sumber : SPSS Versi 25 Output data peneliti, 2021

Pada pengujian korelasi Perason untuk membuktikan kuat atau lemah korelasi pada variabel Partisipasi penumpang pesawat (X) dan variabel Efektivitas penggunaan aplikasi eHAC (Y). Guna membuktikan adanya hubungan pada variabel X dan variabel Y dengan penggunaan rumus product moment (pearson) yakni:

Tabel 4: Koefisien Korelasi Product Moment

**Hasil Uji**

<b>Correlations</b>			
		partisipa si	efektivit as
partisipasi	Pearson Correlation	1	.792**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	120	120
efektivitas	Pearson Correlation	.792**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	120	120
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			

*Sumber: SPSS Versi 25 Output data peneliti, 2021*

Hasil yang didapat pada tabel 3.3, bahwa hubungan antara variabel partisipasi penumpang dengan variabel efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC sebesar 0,792. Adapun ketentuan interpretasi koefisien korelasi menurut Sugiyono (2014:250) bahwa koefisien korelasi product moment pada variabel partisipasi X terhadap variabel efektivitas Y adanya suatu hubungan yang kuat. Hal ini dibuktikan pada besaran koefisien korelasi pada variabel X dan variabel Y yakni 0,792 dengan signifikasi 0,000. Pada tahapan ini untuk diketahui hubungan yang mempengaruhi variabel partisipasi penumpang (X) dengan variabel efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC (Y) yang dinyatakan pada bentuk persamaan regresi. Maka persamaan regresi ini berperan sebagai penguji yang signifikan terhadap

variabel partisipasi penumpang pesawat (X) dan variabel efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC (Y).

Tabel 5: Hasil Uji T

**Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.320	2.155		4.324	.000
	partisipasi	.491	.035	.792	<b>14.115</b>	.000

a. Dependent Variable: efektivitas

Sumber : SPSS versi 25 Output data peneliti, 2021

Hasil yang diperoleh pada tabel 5 dapat diketahui nilai  $t_{hitung}$  14.115 dari partisipasi sebagai variabel X dan nilai signifikan yakni 0,000. Nilai  $t_{hitung}$  14.115 dengan taraf signifikansi 0,05 atau 95%. Taraf signifikan 5% degrees of freedom (df)  $n - 2 = 120 - 2 = 118$ . Diketahui bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1.657 dan dengan ketentuan hipotesis dan signifikansi lebih kecil 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) yang dinyatakan  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Pernyataan tersebut menyatakan ada nya Pengaruh Partisipasi Penumpang Pesawat Udara Terhadap Efektivitas Penggunaan Aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC) di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma Tahun 2021. Adapun hasil uji hipotesis berikut:

1.  $H_0 \ b_1 < 0$  : Memiliki arti bahwa tidak adanya pengaruh partisipasi penumpang pesawat terhadap efektivitas penggunaan aplikasi eHAC”.
2.  $H_a \ b_1 > 0$  : Memiliki arti bahwa terdapat pengaruh partisipasi penumpang pesawat terhadap efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC”.

Interpretasi Hasil Penelitian ini diperoleh dari hasil uji sebelumnya dengan menggunakan koefisien korelasi antara variabel independen dan dependen dengan menunjukkan apabila  $r_{tabel}$  untuk taraf signifikan 5% degress of freedom (df)  $n - 2 = 120 - 2 = 118$  yang akan memperoleh nilai 0,1793. Maka dari hasil perhitungan

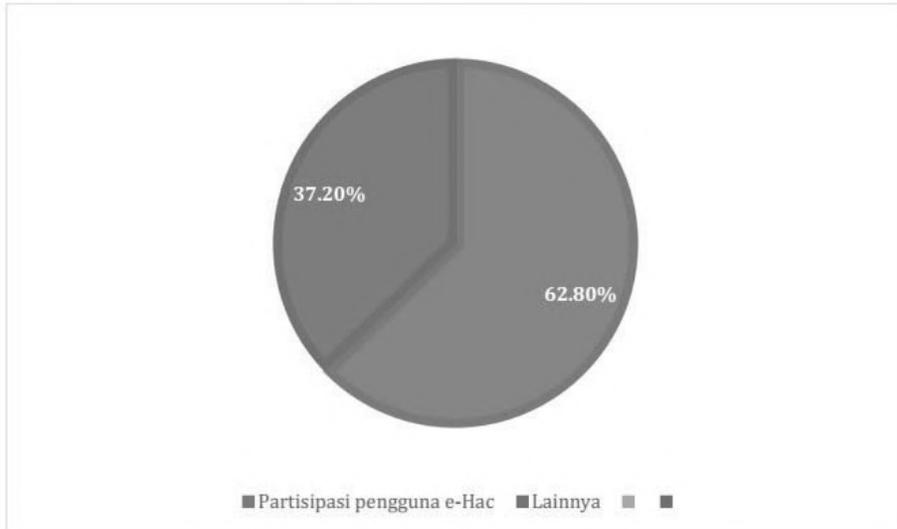
tersebut  $0,792 > 0,1793$  bermakna  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sementara itu pada pengujian hipotesis dengan uji t (parsial) diketahui nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan besaran nilai  $14,115 > 1,657$  bermakna bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan dan signifikansi antara variabel partisipasi penumpang pesawat udara terhadap efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma. Dalam uji regresi linier sederhana memperoleh hasil perhitungan sebesar  $9,320 + 0,491X$  guna mengetahui ada atau tidak nya pengaruh variabel partisipasi penumpang pesawat terhadap efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC. Berdasarkan ketentuan nilai signifikansi lebih besar  $0,05$  yang diketahui nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  bermakna  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kesimpulan dari pernyataan tersebut bahwa terdapat pengaruh partisipasi penumpang pesawat udara terhadap efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma.

Berdasarkan nilai dari R Square  $0,628$  atau  $62,8\%$  membuktikan bahwa adanya pengaruh diantara variabel X partisipasi penumpang pesawat terhadap variabel efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC (Y) sebesar  $62,8\%$  dan  $37,2\%$  penjelasan variabel lain yang tidak diketahui. Pada masing-masing variabel dihitung jumlah skor pernyataan nya dan diketahui jumlah skor pernyataan variabel partisipasi penumpang pesawat (X) berjumlah  $7343$  dengan skor total ideal  $9000 = 81,58\%$ . Sedangkan variabel efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC dengan jumlah skor pernyataan  $4724$  dan skor total ideal  $6000$ . Jumlah tersebut dapat dihitung =  $78,73\%$ . Ditarik kesimpulan bahwa partisipasi sebagai variabel X dapat dinyatakan baik dengan persentase  $81,58\%$  dan  $78,73\%$  untuk persentase efektivitas sebagai variabel Y. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hipotesis yang telah ditentukan memiliki hubungan antara pengaruh partisipasi penumpang pesawat udara terhadap efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma dapat diterima dan tidak ada dalam hal perbedaan dengan populasi yang diduga terhadap data terkumpul dari sampel.

Pada masa pandemi Covid-19 upaya pemerintah demi melakukan pencegahan virus corona menetapkan kebijakan terkait ketentuan pelaku perjalanan domestik pada masa pandemi Covid-19 diberlakukan pada penumpang pesawat udara. Upaya ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan menerapkan

penggunaan aplikasi e-HAC (Electronic Health Alert Card) atau kartu kewaspadaan kesehatan elektronik sesuai dengan Surat Edaran Nomor SR.03.04/II/5825/2020 Tentang Penggunaan Electronic Health Alert Card(e-HAC) serta ketentuan dari Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan bagi efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC. Hal tersebut didasari oleh hasil yang diperoleh melalui penghitungan regresi linier yang telah tersedia guna memahami partisipasi penumpang pesawat mempengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC. Meskipun dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, namun harus ada kesadaran serta kepercayaan terhadap penggunaan aplikasi e-HAC sendiri.

Bentuk partisipasi dari masyarakat terbilang cukup rendah, dikarenakan masyarakat menganggap bahwa aplikasi e-HAC adalah formalitas semata ataupun kurang memberikan manfaat secara keseluruhan bagi penggunaannya. Hal ini berdasarkan temuan data lanjutan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap aplikasi e-HAC sepenuhnya, seperti fungsinya dan manfaat yang akan didapat dari penggunaan aplikasi tersebut. Hal tersebut disebabkan masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait sehingga masyarakat memandang bahwa aplikasi e-HAC sekedar formalitas semata bukan berfungsi sebagaimana fungsinya yaitu upaya untuk mencegah penyebaran covid-19 dengan sistem peringatan dini pada aplikasi e-HAC. Sehingga efektivitas aplikasi harus ditingkatkan kembali agar dapat merasakan manfaatnya serta mewujudkan upaya pemerintah dengan menekan angka sebaran Covid-19. Sementara itu untuk memperkuat pernyataan tersebut, dibuktikan adanya hubungan yang kuat antar variabel berdasarkan nilai 0,792 dan besaran pengaruh partisipasi penumpang pesawat udara terhadap efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC sebesar 62,8 % dan 37,2% penjelasan variabel lain yang tidak diketahui. Maka berikut disajikan grafik lingkaran yang akan memperjelas pernyataan dan hasilnya seperti grafik berikut:



Grafik 1: Besaran Pengaruh Partisipasi terhadap efektivitas penggunaan e-HAC di Bandara Udara Halim Perdana Kusumah, Tahun 2021

Grafik tersebut menguatkan perolehan hitungan pada 62,8% pengguna e-HAC berpartisipasi secara keseluruhan dan menggunakan aplikasi serta mengetahuinya. Sedangkan sisanya yakni 37,8% lainnya memandang bahwa e-HAC hanya formalitas saja. Selanjutnya nilai korelasi yang didapat pada variabel partisipasi masing-masing indikator yakni pada indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan sebesar 0,80. Perolehan tersebut memiliki kesamaan dengan indikator partisipasi pelaksanaan. Kemudian indikator partisipasi pemanfaatan sebesar 0,79 dan indikator partisipasi evaluasi yakni sebesar 0,81. Sementara itu, nilai korelasi yang didapat pada variabel efektivitas masing-masing indikator yakni pada indikator pencapaian tujuan sebesar 0,77. Kemudian perolehan indikator integritas dan adaptasi memiliki kesamaan sebesar 0,79. Maka dengan hasil serta pernyataan berikut dalam peningkatan efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC, diperlukan partisipasi masyarakat sepenuhnya, terutama partisipasi dalam evaluasi yang ditunjukkan pada besaran korelasi yang didapat yakni 0,81. Partisipasi masyarakat mengenai evaluasi ini dianggap penting untuk peningkatan efektivitas aplikasi

e-HAC, yang pada dasarnya aplikasi ini sudah bagus namun perlu peningkatan terhadap efektivitas penggunaannya agar berfungsi sebagaimana fungsi dan manfaatnya juga dapat mewujudkan upaya Pemerintah dalam mengendalikan dan menekan angka penyebaran virus corona.

## Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis atau uji t, bahwa: Partisipasi penumpang pesawat udara secara parsial yaitu  $t_1 = 0,80$   $t_2 = 0,80$   $t_3 = 0,79$   $t_4 = 0,81$  mempengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC dan penjelasan variabel lain yang tidak termasuk variabel penelitian dan tidak dapat diketahui dengan besaran nilai 37,2%.
2. Sesuai dengan hasil perhitungan besaran pengaruh maka partisipasi penumpang pesawat udara secara simultan berpengaruh signifikan yakni 81,58% terhadap efektivitas penggunaan aplikasi Electronic Health Alert Card (e-HAC) di Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma. Sementara persentase 78,73% untuk variabel efektivitas sebagai variabel Y. Dari hal ini dapat memperjelas partisipasi merupakan bagian dari faktor tingkat efektivitas penggunaan aplikasi e-HAC, jika ingin lebih efektif penggunaan aplikasi eHAC tersebut harus ada partisipasi penumpang pesawat yang meliputi kesadaran dan kejujuran dalam penggunaan aplikasi e-HAC. Hal tersebut sangat diperlukan mengingat kemungkinan manipulasi data terhadap penggunaan aplikasi e-HAC tinggi, jika tidak ada kesadaran dari masing-masing penumpang. Hal tersebut mengacu pada indikator partisipasi salah satunya adalah partisipasi dalam pelaksanaan, penumpang pesawat udara sebagai masyarakat perlu berkontribusi guna menunjang pelaksanaan serta membantu penggunaan aplikasi e-HAC berfungsi dengan efektif.

## Daftar Pustaka

- Abeliansky, A. L., Hilbert, M. (2017). Digital technology and international trade: Is it the quantity of subscriptions or the quality of data speed that matters?. *Telecommunications Policy*, Vol. 41, pp. 35-48.
- Aprianty, D.R..(2014). Penerapan Kebijakan e-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4 No.4
- Bambang, I. (2013). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik, *Jurnal Paradigma*, Vol.2 No.1.
- Budiani, N.W. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran KarangTaruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan DenpasarTimur Kota Denpasar”, *Jurnal Ekonomi Dan Sosial*. Vol. 2 No.1.
- Dwiningrum, Siti I.A., (2011), *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Gunawan, B. (2020), Pengaruh Partisiapasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuanga Daerah (Studi pada Kantor DPR Aceh) (*Doctoral dissertation*).
- Intan E. & Massadun, (2013), Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan Mangrove di Desa Bedono, Kecamatan Sayung. *Jurnal Ruang* Vol. 1 No. 1
- Merry, A. (2016), Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pemabngunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)” *Publika* Vol. 4 No. 1

- Monoarfa, H. (2012) Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan” Jurnal Pelangi Ilmu Vol. 5 No.1
- Mulyadi, D. (2016), Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Nugraha, J.T. (2018), E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman), Jurnal Komunikasi dan Kajian Media, Vol. 2 No.1 April 2018: 32-42. h.33129
- Oktora, S.I. (2019), The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on the Indonesian Apparel Export, Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol.13 No.1, Hal: 119-136
- Rozikin, M., Hesti, W., & Sulikah, (2020), Kolaborasi dan e-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi e-Government Pemerintah Daerah, Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No.1. Hal: 61-80
- Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syadzy, A. (2017), Analisis Efektivitas Fundraising Zakat Pada Lazismaz Permata Puri Ngalyan Semarang. Doctoral Dissertation, UIN Walisongo.
- Tokunaga, H.T. (2016). Fundamental Statistic for the Social and Behavioral Science. California: SAGE Publisher.
- Wibowo, C.T., (2014), Efektivitas Pelayanan Pembuatan Paspor Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Tangerang.

# ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TARIF PAJAK PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SATUAN ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) JAKARTA TIMUR TAHUN 2015-2018

Winda Wulandari<sup>1</sup>, Vivi Kurniawati<sup>2</sup>  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI  
**Email :** windawulandari1904@gmail.com1,  
vivikurniawati88@gmail.com2

---

## **Abstract**

*Tax is the main source of state revenue which has an important role in improving and implementing National Development with the aim of increasing the welfare and prosperity of the community. Among other regional taxes, the Motor Vehicle Tax (PKB) is a large tax potential for regional revenue receipts. The purpose of this study is to analyze the implementation of progressive motor vehicle tax rates at the East Jakarta SAMSAT Office and to analyze the obstacles and efforts to revenue at the East Jakarta SAMSAT. The research was carried out in At the One-Stop Administration Unit (SAMSAT) East Jakarta. The research uses qualitative methods. The implementation of the Progressive Tax Policy for Motor Vehicles at the East Jakarta SAMSAT went well, The implementation of the Progressive Tax Policy for Motorized Vehicles at the East Jakarta SAMSAT from 2015-2018 went well it's just that there are some obstacles in its implementation.*

**Keywords :** Policy Implementation, Vehicle Progressive Tax.

## Pendahuluan

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan dan pembangunan nasional.

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan terkait perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan pajak kabupaten /kota yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.

Salah satu sumber penerimaan Pajak Provinsi yang memiliki potensi pajak yang besar bagi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta adalah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena selalu meningkatnya jumlah kendaraan yang terdaftar sebagai objek pajak di DKI Jakarta. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi, sebagai instansi pemungutnya adalah kantor bersama SAMSAT dan Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor dari pemerintah DKI Jakarta.

Data peningkatan wajib pajak kendaraan bermotor yang di dapat pada 2015 s/d 2018 pada unit PKB SAMSAT Jakarta Timur, menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 183.393 wajib pajak, lalu terjadi kenaikan pada tahun 2016 ke tahun 2017 dua kali lipat mengalami kenaikan

dari tahun sebelumnya sebesar 318.368 wajib pajak, dan pada tahun 2018 terjadi kembali kenaikan sebesar 328,763 wajib pajak.

Masalah yang ditimbulkan dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor salah satunya adalah kemacetan yang terjadi dimana-mana khususnya DKI Jakarta. Kerugian akibat kemacetan kendaraan bermacam-macam antara lain waktu yang ditempuh, bertambahnya polusi udara, dan jalanan yang rentan rusak karena banyaknya kendaraan bermotor.

Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta dengan adanya pengenaan tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan Pajak

Kendaraan Bermotor yang diterapkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan kepada setiap wajib pajak yang memiliki jumlah kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Sehingga kenaikan tarif pada setiap kepemilikan kedua dan seterusnya dapat menambah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana implementasi kebijakan tarif pajak progresif kendaraan bermotor, (2). Apa saja kendala yang dihadapi oleh kantor SAMSAT Jakarta Timur dalam implementasi kebijakan tarif pajak progresif kendaraan bermotor pada SAMSAT Jakarta Timur tahun 2015-2018, (3). Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Jakarta Timur untuk mengatasi kendala tersebut.

## **Kajian Literatur**

Sondang P. Siagian (Inu Kencana Syafie, 2010:14) mengemukakan bahwa :“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya” . Irra Chrisyanti Dewi (2011: 3) mengemukakan bahwa :“ Administrasi berasal dari kata *Administratie* (Bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis

menulis atau ketatausahaan atau kesekretarian, meliputi kegiatan : menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan”.

Menurut Pasolong (2012:57) Menjelaskan :” Administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas- tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif”. Pengertian kebijakan publik menurut Indiahono (2009;53) sebagai berikut: “Kebijakan publik merupakan ranah yang dinamis dan menarik untuk dikaji, yang mana kajian multimetode harus memberikan perhatian yang serius kepada masalah (perhatian kepada masalah), pengembangan alternatif, penilaian dan pemberian rekomendasi secara lebih kreatif dan pro ranah nasional dan sensitif kepada lingkungan politik yang dapat mempengaruhi lahirnya kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik”.

Menurut Chairil Anwar (2014;93) Administrasi Pajak adalah : Pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat mencatat dan pembukuan ringan, korespondensi, kesekretariatan, penyusunan laporan dan kearsipan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak baik dilakukan di kantor fiskus maupun kantor Wajib Pajak. Abdul Rahman (2010;183) Administrasi perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik perusahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak.

Menurut Soemitro (Mardiasmo,2019:3): “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Feldmann (Resmi,2016:2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2019:4) menjelaskan fungsi pajak terbagi menjadi dua fungsi pajak, yaitu: Fungsi *Budgetair* (Anggaran) artinya pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan Fungsi *Regulerend* (Mengatur) artinya pajak berfungsi

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2019:16) Pajak Daerah adalah :“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Mardiasmo (2019:17) menjelaskan Pajak Daerah dibagi menjadi dua (2) bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukanaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota yaitu ; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Kota, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Siahaan (2013:175) pajak kendaraan bermotor ialah sebagai berikut:” Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan”. Menurut Darwin (2010:105) pajak kendaraan bermotor ialah :” Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek dari Pajak Kendaraan Bermotor ini adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak”

Menurut Siahaan (2013:182), subjek pajak kendaraan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Menurut Mardiasmo (2019:18), tarif pajak kendaraan bermotor sebagai berikut ; (1). untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen), (2). untuk kepemilikan

Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (3). Tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). (4). Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Menurut Mardiasmo (2013:182-184), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut: Pajak Terutang = tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak.

Menurut Resmi (2014:15) "Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentase tersebut juga makin meningkat. Menurut Mardiasmo (2019: 13) Pajak Progresif adalah "Persentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar".

## **Metode Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam penelitian ini, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja terkait dengan hasil studi tentang Implementasi kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneniltian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Jakarta Timur yang beralamat di Jalan DI Panjaitan Kav. 55, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, RT.12/RW.6, Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410.

Adapun waktu dan proses pengajuan proposal, pengajuan penelitian, pengumpulan data, wawancara, hingga penulis skripsi ini selesai, yaitu dilakukan selama 5 bulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1 1. Analisis Implementasi Kebijakan Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Jakarta Timur Tahun 2015- 2018.**

Dalam penulisan mengenai judul penelitian ini penulis menggunakan teori Analisis Implementasi Kebijakan milik Edward III. Teori tersebut menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan sangat penting dalam memahami pembelajaran mengenai administrasi publik dan kebijakan public. Dengan informasi yang didapat dilapangan, maka penulis mengambil garis besar permasalahan yang relevan dengan kajian teori menurut Edward III. Adapun pembahasan dari hasil penulisan sebagai berikut

#### **a. Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan menurut indikator Edward III dengan

metode komunikasi para implementator dan masyarakat hanya sebagian yang mengetahui informasi tentang berlakunya pajak progresif. Dalam petikan wawancara tersebut menurut metode komunikasi dapat disimpulkan bahwa, dalam hal ini pajak progresif itu pajak kendaraan yang kendaraannya dimiliki masyarakat lebih dari satu (1). Maka dari itu masyarakat tersebut terkena pajak progresif, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tentang pajak progresif kalau masyarakat tersebut tidak datang ke Kantor Samsat Jakarta Timur.

## **b. Sumber Daya**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan, membuat kategorisasi bahwa implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, yaitu

pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan dan faktor individu selaku kelompok target. Dalam sumber daya para implementator sudah melaksanakan implementasi kebijakan pajak progresif dengan baik. Kesimpulan dalam petikan wawancara tersebut bahwa pegawai dan masyarakat merasa terbebani dengan adanya kebijakan pajak progresif tersebut karena mereka harus mencari nama yang lain ketika mereka ingin membeli kendaraan tersebut agar tidak terkena pajak progresif.

## **c. Sikap Pelaksana**

Hasil dari wawancara tersebut adalah bahwa sikap pegawai dalam melayani masyarakat itu sudah baik bahkan mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan tersebut sudah efektif berjalan dengan baik.

#### **d. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard operating procedures atau SOP) SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. Mencakup struktur birokrasi pajak progresif ini adalah bagian dari pajak kendaraan bermotor. Jadi, untuk struktur birokrasi pada pajak progresif itu tidak ada hanya saja pajak progresif memiliki ruangan terkhusus untuk masyarakat yang terkena pajak progresif.

Bahwa kesimpulannya adalah ternyata struktur atau bagan yang melaksanakan kebijakan pajak progresif adalah tidak ada karena pajak progresif itu adalah bagian dari pajak kendaraan bermotor karena jika masyarakat terkena pajak progresif baiayanya itu sudah di satukan di pajak kendaraan bermotor tersebut

### **1 2. Hambatan atau Kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat Jakarta Timur dalam melaksanakan implementasi kebijakan pajak progresif.**

Dalam penelitian ini di dapatkan hasil bahwa faktor penghambatnya yaitu, Data wajib pajak kurang akurat hal ini diakibatkan karena data antara kendaraan bermotor dan pemilik yang tidak sesuai, wajib pajak sudah tidak memiliki kendaraan tersebut karena sudah dijual tetapi tidak lapor, Wajib pajak mempunyai kesibukan sehingga menyebabkan lalai atau lupa, hal ini termasuk kedalam kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor yang

masih kurang, Wajib pajak menunggu adanya program penghapusan denda administrasi, ini merupakan kebiasaan buruk wajib pajak yang menunggak pajak dengan denda yang tinggi sehingga menunggu adanya penghapusan denda administrasi, Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai pembayaran melalui layanan Samsat Online atau e-Samsat.

### **1 3. Upaya Yang Dilakukan yang dihadapi oleh Kantor Samsat Jakarta Timur dalam melaksanakan implementasi kebijakan pajak progresif.**

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa upaya yang dilakukan oleh SAMSAT Jakarta Timur yaitu menyediakan ruangan khusus untuk masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan.

## **Kesimpulan**

- 1 1. Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Jakarta Timur tidak mampu untuk mengurangi atau membatasi potensi penambahan jumlah mobil pribadi di Jakarta Timur. Faktor status sosial-ekonomi dari Warga Jakarta Timur, wawasan terhadap penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor pribadi, dan faktor kondisi jasa angkutan umum yang tidak aman dan nyaman untuk digunakan, lebih kuat mempengaruhi perilaku Warga Jakarta Timur untuk cenderung mempertahankan dan menambah jumlah mobil pribadi yang dimilikinya dari pada mengurangi jumlah mobil pribadinya. Oleh karena itu, penerapan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor ini hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI.
- 2 2. Hambatan pada Kantor Samsat Jakarta Timur dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Pajak Progresif:
  - a. Data wajib pajak kurang akurat hal ini diakibatkan karena data antara kendaraan bermotor dan pemilik yang tidak sesuai.
  - b. Wajib pajak sudah tidak memiliki kendaraan tersebut karena sudah dijual tetapi tidak lapor.
  - c. Wajib pajak mempunyai kesibukan sehingga menyebabkan lalai atau lupa, hal ini termasuk kedalam

kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor yang masih kurang. d. Wajib pajak menunggu adanya program penghapusan denda administrasi, ini merupakan kebiasaan buruk wajib pajak yang menunggak pajak dengan denda yang tinggi sehingga menunggu adanya penghapusan denda administrasi.

3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pada Kantor Samsat Jakarta Timur dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Pajak yaitu Membuat surat panggilan pertama apabila selama 2 minggu panggilan tidak dipenuhi maka akan dilakukan surat panggilan kedua selama seminggu tidak dipenuhi juga maka dilakukan surat panggilan terakhir dan selama 3 hari tidak datang, maka langkah selanjutnya pihak kami akan melakukan tindakan tegas. Mendatangi ke alamat penunggak pajak biasanya kita membawa tim media juga agar segera melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Melakukan Razia di jalanan dengan membawa media, hal ini dilakukan agar wajib pajak yang tidak melaksanakan perpajakannya diberi efek jera dan rasa malu sehingga setelah itu dapat membayar.

## Referensi

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Chairil Anwar Pohan. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya.
- Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama.

*Edwards III, George C. dan Ira Sharkansky (1980), Implementing public policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.*

Inu Kencana Syafie. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan, Edisi Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi

Pasolong. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat  
-----2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.

Siagian. 2013. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Bumi aksara.

Peraturan Daerah No.2 tahun 2015 Tarif pajak kendaraan bermotor pasal 6  
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

Peraturan Daerah No.2 tahun 2015 Tarif pajak kendaraan bermotor pasal 6  
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

